BUMN UNTUK INDONESIA

PUPR SIGAP MEMBANGUN NEGERI

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF



JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran,
Pedungan, Denpasar Selatan, Bali 80222

+62 361 725326 +62 361 725327 Hotline Service: +62 361 729999

@jasamargabalitol_official | PT Jasamarga Bali Tol | @tolbalimandara | humas@jasamargabalitol.co.id

MEMBER OF

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.
GROUP

LAPORAN TAHUNAN PT Jasamarga Bali Tol 2021

Highway To **Paradise ...**

JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

LAPORAN TAHUNAN

PT Jasamarga Bali Tol 2021

Sinergi Membangun Negeri



Highway To **Paradise ...**

ᬒᬁ ᬲ᭭ᬯᬲ᭜ᬢ᭜ᬬᬲ᭜ᬢᬶ ᭥᭥

"Om Swastyastu"

ᬚᬮᬦ᭄ᬢᬺᬮ ᬢᬺᬫᬭᬤᬸᬭᬸ ᬫᬸᬤᬭᬭᬸᬦᬸ᭥᭥

Jalan Tol **Bali Mandara**



JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

Laporan Tahunan
PT Jasamarga Bali Tol
Tahun Buku 2021

Highway To ***Paradise . . .***

Mari Satukan Langkah, Berpijak pada Tata Nilai

AKHLAK

dan Terus Berkarya 100% untuk Indonesia

Daftar Isi





















Highway to Paradise
Daftar Isi 4

01 Profil Perusahaan 7

8 Identitas Perusahaan
10 Sekilas Jasamarga Bali Tol
12 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
13 Visi Dan Misi
14 Struktur Organisasi
15 Strategi Perusahaan
15 Tata Nilai Perusahaan
16 Peristiwa Penting dan Daftar Kunjungan
28 Penghargaan Dan Sertifikasi

02 Ikhtisar Keuangan 33

34 Laporan Posisi Keuangan
36 Laporan Laba Rugi Komprehensif
37 Laporan Arus Kas
38 Pencapaian Keuangan
39 Ikhtisar Saham
40 Ikhtisar Keuangan
41 Ikhtisar Operasional

03 Laporan Manajemen 43

44 Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
48 Profil Dewan Komisaris
54 Sambutan Direktur Utama
59 Profil Direksi

04 Laporan Kegiatan 63

65 Laporan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol 2021
108 Pemeriksaan SPM
109 Laporan Kegiatan Bidang Hukum 2021
110 RUPS Perseroan Selama Tahun 2021
119 Penutupan Jalan Tol Hari Raya Nyepi
120 Pembagian Masker dan Handsitizer dalam rangka HUT JBT Ke 10
121 Pembagian Kartu Elektronik Bersama Bank BUMN dan Swasta dan sosialisai Road Safety Rangers

05 Analisa Pembahasan Manajemen 123

124 Laporan Aset
132 Laporan Liabilitas
143 Ekuitas
144 Kinerja Keuangan
153 Laporan Arus Kas

06 Tata Kelola Perusahaan 155

157 Tata Kelola Perusahaan
158 Organ Tata Kelola Perusahaan
159 Kegiatan Manajemen Untuk Mendukung Kegiatan Perseroan

07 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 161

162 Tanggung Jawab Sosial
164 Tanggung Jawab Lingkungan

08 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 167

168 Komposisi Karyawan
170 Program Pengembangan SDM

09 Tanggung Jawab Manajemen 177

178 Realisasi KPI
181 Tanggung Jawab Manajemen

10 Laporan Keuangan 183

Tanggal 31 Desember 2021
beserta laporan auditor independen

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

Jalan Tol

Bali Mandara

Ikon Infrastruktur Indonesia Karya Anak Bangsa

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan 8
Sekilas Jasamarga Bali Tol 10
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 12
Visi Dan Misi 13
Struktur Organisasi 14
Strategi Perusahaan 15
Tata Nilai Perusahaan 15
Peristiwa Penting dan Daftar Kunjungan 15
Penghargaan dan Sertifikasi 28

01

Identitas Perusahaan

JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

PT Jasamarga Bali Tol

Tanggal Pendirian : 22 Agustus 2011

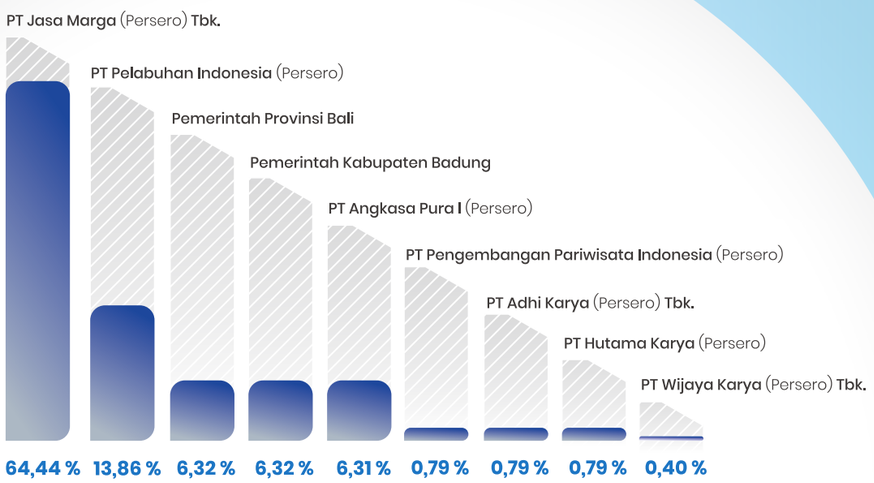
Akta Pendirian Perusahaan
Nomor: 2/2011, oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti, S.H.

Rp. 1.440 Miliar
Modal Dasar

Pengesahan Pendirian
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-57740.AH.01.01.
Tanggal 25 November 2011

Rp. 945 Miliar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Kepemilikan Saham



Alamat Kantor

Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali 80222

Telp.	:	+62-361-725326
Faks.	:	+62-361-725327
Call Center 24 jam	:	(0361) 729999
Website	:	www.jasamargabalitol.co.id
Email	:	humas@jasamargabalitol.co.id

Sosial Media
@jasamargabalitol_official @tolbalimandara PT Jasamarga Bali Tol



Sekilas
Jasamarga Bali Tol



Bali merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki "magnet" untuk menggaet wisatawan dari berbagai belahan dunia. Pulau Dewata ini punya beragam jenis wisata mulai dari alam, budaya, hingga kuliner.

Setiap tahunnya, tidak kurang 10 juta wisatawan membanjiri Bali. Jumlah tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Tak heran Bali dinobatkan sebagai *World's Best Island* tahun 2009 versi Majalah *Travel and Leisure*.

Pada tahun 2017, TripAdvisor menobatkan Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia, menduduki peringkat pertama dan mengalahkan destinasi wisata kelas dunia di Eropa, Amerika dan Timur Tengah.

Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Bali membawa konsekuensi pada pesatnya tingkat kepemilikan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat/lebih.

Peningkatan jumlah kendaraan selama periode 2008-2010 mencapai rata-rata 10% tiap tahunnya.

Peningkatan volume kendaraan ini tidak seiring dengan penambahan jaringan jalan maupun infastruktur dasar lainnya.

Selama ini satu-satunya akses yang menghubungkan wilayah utara dan selatan hanyalah jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai. Jika akses ini terganggu, maka hubungan utara - selatan Bali terputus. Pada tahun 2010, By Pass I Gusti Ngurah Rai kondisinya sudah sangat macet, terutama di persimpangan Dewa Ruci dan persimpangan sebidang (pertigaan) ke arah Bandara Ngurah Rai. Untuk menempuh jarak 10 kilometer saja diperlukan waktu tidak kurang dari 2 (dua) jam.

Kemacetan di Bali tanpa disadari telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)*, terutama konsumsi bahan bakar, oli, pemakaian suku cadang dan yang paling berharga adalah *travel saving time* mengingat tujuan wisatawan ke Bali adalah untuk mengunjungi sebanyak mungkin lokasi-lokasi wisata. Kondisi kemacetan di Bali tidak hanya dikeluhkan oleh wisatawan, namun pengusaha hotel, penyedia jasa transportasi, sampai sopir taksi.

Pemerintah kemudian memerintahkah empat BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/BTDC yang sekarang berubah nama menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC untuk mencari solusi paling efektif mengatasi kemacetan di Bali selatan, dengan menggunakan konsep jalan tol.

Keempat BUMN tersebut kemudian sepakat membentuk konsorsium dan menunjuk Jasa Marga sebagai lead konsorsium dengan pertimbangan Jasa Marga merupakan satu-satunya BUMN yang paling berpengalaman di bidang pengelolaan jalan tol.

Keempat Konsorsium BUMN sepakat membentuk badan usaha jalan tol (BUJT) dengan nama PT Jasamarga Bali Tol, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor AHU-57740.AH.01.01, tanggal 25 November 2011.

Pada tanggal 16 Desember 2011, disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Jasamarga Bali Tol selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Pekerjaan Umum menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

PPJT tersebut kemudian dinotarialkan dengan Akta Nomor 10, tanggal 16 Desember 2011 oleh Rina Utami Djauhari, SH notaris di Jakarta, dengan masa konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 (empat puluh lima) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau terhitung mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 10 September 2057.



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No 42 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dihadapan **Leolin Jayanti, S.H.,M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, Akta perubahan mana yang proses Pemberitahuan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0388959 tanggal 21 Juni 2021.

Para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah dan mufakat mengangkat kembali **Kompyang Raka Swandika, S.H,.M.H** dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan wakil dari Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa jabatan 5 tahun, terhitung sejak 1 Juni 2021, tanpa mengesampingkan hak Rapat umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada tanggal 22 Desember 2021, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengirimkan Surat kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor AA.HC01.1616 perihal Perubahan Pengurus PT Jasamarga Bali Tol, Surat tersebut mengusulkan pemberhentian Saudara **Donny Arsal** sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Bali Tol dan pengangkatan Saudara **Bagus Cahya Arinta B** sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Bali Tol dengan masa jabatan berlaku sejak 23 Desember 2021.

Selanjutnya Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasamarga Bali Tol tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama :	**Direktur Utama :**
Bagus Cahya Arinta B	I Ketut Adiputra Karang
Komisaris :	**Direktur Keuangan :**
Edi Priyanto	I Gusti Putu Arya Budhi Astawa
Anak Agung Ngurah Maha Diptha	
Kompyang Raka Swandika	
Lukman F Laisa	

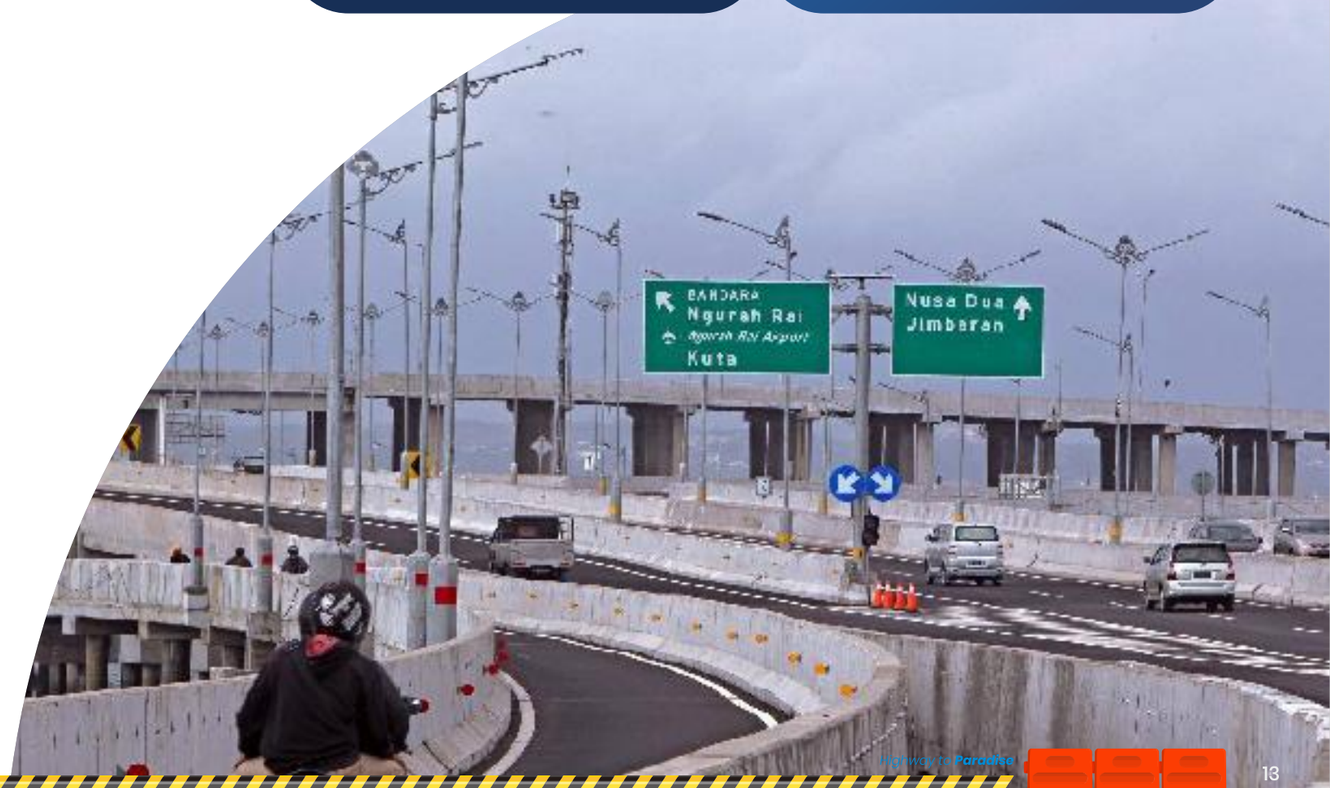
Visi dan Misi

Visi

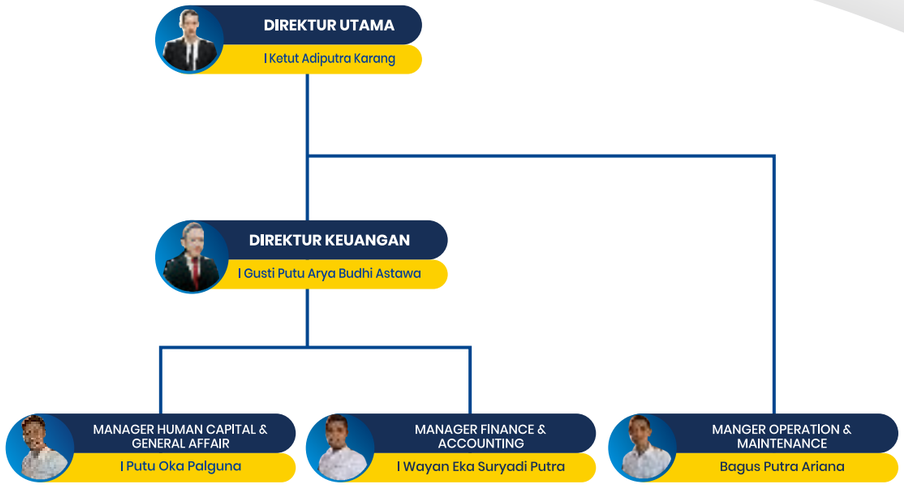
"Menjadi Perusahaan Pengelola Jalan Tol Terkemuka di Indonesia"

Misi

1. Menyediakan jasa layanan jalan tol yang lancar, aman, nyaman, dan efisien.
2. Meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan Keindahan sekitar / lingkungan jalan tol.
3. Mengelola sumber daya perusahaan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
4. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kopetensi inti untuk keberlanjutan perusahaan.
5. Mengoperasikan jalan tol dengan tetap menjaga keasrian lingkungan hidup dan budaya Bali



Struktur Organisasi





Strategi Perusahaan

1. **Mengoperasikan jalan tol dengan standar pelayanan prima** untuk mencapai kepuasan pelanggan/ pengguna jalan tol,
2. **Mengelola dan memelihara** aset jalan tol secara efektif dan efisien,
3. **Mencari terobosan dan peluang usaha** yang sejalan dengan bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan usaha lain,
4. **Mengelola keuangan secara efisien** sehingga mampu menyeimbangkan antara pendapatan dengan kewajiban pembayaran utang, serta kebutuhan biaya pengoperasian dan pemeliharaan.

Tata Nilai Perusahaan

AKHLAK

AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

A — AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

K — KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

H — HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaaan

L — LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

A — ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan

K — KOLABORATIF
Membangun kerjasama yang sinergis



Peristiwa Penting
dan Daftar Kunjungan





10 Februari 2021

Donor Darah

Dalam rangka perayaan Bulan K3 bekerja sama dengan PMI Kabupaten Badung

Februari





5 Maret 2021

Kegiatan Lomba Lalin

antar perusahaan Jasa Marga Group

Maret





27 April 2021

Penandatanganan Kerja Sama

Promosi bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

April





6 Mei 2021

Pemberian 5000 Paket Sembako

PT Jasamarga Bali Tol bersama **PT PLN** dan **ASDP** memberikan 5000 Paket Sembako Kepada Yayasan Tungked Werdha Bali di Gianyar

Mei



16 Juni 2021

RUPS

JBT gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020

Juni





26 Agustus 2021

Bantuan Paket Sembako

kepada masyarakat Desa Kerta, Payangan, Gianyar, Bali

Agustus





18 Agustus 2021

BUMN Peduli

BUMN menyerahkan bantuan Oksigen untuk penanganan Covid 19

Agustus





21 September 2021

Vaksinasi

PT Jasamarga Bali Tol gelar kegiatan Vaksinasi terhadap karyawan

September





28 September 2021

Kunjungan Kerja

JBT menerima kunjungan kerja Tim Penilai untuk CSR AWARD BUMN dari DPD RI Provinsi Bali

September





30 September 2021

Road Rescue

JBT gelar pelatihan *Road Rescue*

September





18 Oktober 2021

Penyerahan Bantuan

JBT menyerahkan bantuan kepada korban gempa bumi di Bangli

Oktober





21 - 22 Oktober 2021

Kunjungan Tim Penilai Dari Kementrian PUPR

dalam rangka Penilaian Jalan Tol Berkelanjutan tahun 2021

Oktober





25 Oktober 2021

Kunjungan Bina Marga
dalam rangka persiapan penyesuaian tarif tol

Oktober





28 Oktober 2021

Pembagian 150 Paket Sembako
di Desa Karangasem bagi korban gempa bumi

Oktober





19 November 2021

Penanaman 7000 Bibit Mangrove
dalam rangka HUT JBT KE 10

November





24 November 2021

Pembagian Masker Dan Handsnitizer
dalam rangka HUT JBT ke-10

November







2 Desember 2021

Kunjungan Presiden Joko Widodo
dalam rangka persiapan infrastuktur pendukung gelaran KTT G20

Desember





7 Desember 2021

Penganugrahan BUMN CSR Award ke IV
Provinsi Bali yang di selenggarakan oleh DPD RI Bali

Desember





15 Desember 2021

RUPS Luar Biasa Tahun 2021
PT Jasamarga Bali Tol

Desember







28 Desember 2021

Kunjungan Menteri BUMN

Dalam rangka meninjau persiapan gelaran KTT G20

Desember







30 Desember 2021

Pembagian Kartu Elektronik bersama Bank BUMN dan Swasta

dan sosialisasi *Road Safety Ranger*

Desember

Penghargaan dan Sertifikasi



SILVER 2017
TKMPN XXI & IQPC



JUARA I 2017
Lomba Pelayanan Lalu Lintas



TERBAIK 1 2017
Lomba Pelayanan Lalu Lintas ke-13



HARAPAN II 2018
Road Rescue Competition



2 nd WINNER 2019
Roadster Rescue Competition



3 nd WINNER 2020
Roadster Rescue Competition



GOLD AWARD 2019
Penganugrahan BUMN CSR Award
Ke-II Provinsi Bali



GOLD AWARD 2020
Penganugrahan BUMN CSR Award
Ke-III Provinsi Bali



GOLD AWARD 2021
Penganugrahan BUMN CSR Award
Ke-IV Provinsi Bali



PENGHARGAAN ATAS ALAT SAFETY 2020
Dari Bpbd Kota Denpasar



2017

SERTIFIKAT TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
And
International Quality & Productivity Convention 2017



2017

PENAMPILAN TERBAIK I
Lomba Pelayanan Lalu Lintas



2018

HARAPAN 2
Penilaian Pelayanan Lalu Lintas dalam Rangka Hari Ulang Tahun dan Employee Gathering PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ke 40



2017

BEST GROWTH I
Penilaian Kinerja Cabang Anak Perusahaan Kelompok Berkembang



2017

INOVATIVE 1
Temu Karya Mutu Perbaikan Praktis



2017

THE BEST EBITDA PERFORMANCE AND GROWTH
Toll Road Subsidiaries-Full Operation



SERTIFIKASI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu



SERTIFIKASI ISO 14001:2015
Sistem Manajemen Lingkungan



SERTIFIKASI OHSAS 18001:2007
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Mengelola sumber daya perusahaan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

Laporan Manajemen

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 44

Profil Dewan Komisaris 48

Sambutan Direktur Utama 54

Profil Direksi 59

03



Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris



Bagus Cahya Arinta B.
Komisaris Utama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berakhirnya tahun anggaran 2021 yang merupakan tutup buku bagi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP 2021) PT Jasamarga Bali Tol. Selama kurun waktu tersebut, Dewan Komisaris selaku pemegang amanah dari para Pemegang Saham telah melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Program Kerja Dewan Komisaris

Sesuai tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris menyusun program kegiatan sebagai acuan pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2021 memang tidak terelakkan bahwa Perseroan mengalami penurunan pendapatan dan volume Lalu Lintas sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19, sehingga sudah seharusnya Dewan Komisaris melakukan penyesuaian penyesuaian mengingat Perseroan masih mengalami *cash deficiency* sehingga perlu adanya upaya atau *corporate action* seperti relaksasi Kredit Investasi (KI), restrukturisasi utang, penyetoran tambahan modal, dan kaji ulang rencana usaha *(review business plan)* serta melakukan efisiensi biaya untuk menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2021.

Khusus untuk kajian atas rencana usaha ini, di samping memang diperjanjikan dalam PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol), juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada tahun-tahun mendatang, terlebih dalam menetapkan langkah restrukturisasi utang Perseroan.

Program kerja Dewan Komisaris juga mengagendakan pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam forum rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris secara aktif menyampaikan masukan dan arahan kepada Direksi, serta bersama-sama dengan Direksi membahas hal-hal strategis yang berdampak besar bagi usaha dan kinerja Perseroan, seperti pengembangan usaha lain untuk menopang dan meningkatkan pendapatan tol di situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai kaidah *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi dan mendorong agar Direksi lebih mempercepat proses penyelesaian program-program sebagai berikut:

1. **Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Bali Mandara.**

   Selama Tahun 2021, volume lalu lintas mengalami penurunan sebesar 31,25% dibandingkan Tahun 2020, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan, baik domestik ataupun asing serta adanya beberapa program dari Pemerintah untuk menekan peningkatan pandemi Covid-19 seperti aturan PPKM dan diberlakukannya Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan tol. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan tol sebesar 26,32% dari tahun sebelumnya. Kendati demikian, Perseroan terus berusaha untuk melakukan efisiensi terhadap beban operasional dan penurunan biaya pemeliharaan sebesar 5,81% pada Tahun 2021, dengan segala upaya Perseroan tersebut. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Perseroan yang tetap memberikan usaha terbaik mereka dalam menjaga dan mempertahankan sarana serta kondisi jalan tol sesuai dengan persyaratan SPM Tahun 2021.

   Dari sisi SDM, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk terus menerapkan standar protokol kesehatan kepada seluruh karyawan Perseroan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan untuk sedapat mungkin menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan Perseroan.

2. ***Review Business Plan***

   Pada Tahun 2021, terjadi beberapa perubahan yang berpengaruh terhadap *Business Plan* Perseroan, seperti perubahan terhadap proyeksi pendapatan, lalu lintas kendaraan, beban bunga bank serta jadwal pembayaran angsuran pokok hutang bank. Dewan Komisaris meminta agar Perseroan dapat melakukan *review business plan* dengan mencari peluang-peluang investasi serta apabila diperlukan untuk melakukan renegosiasi dengan pihak ketiga yang juga mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19, sehingga nantinya bisa kembali melakukan kerjasama saat kondisi pariwisata Bali sudah pulih.

3. **Restrukturisasi Keuangan Perseroan**

   Tahun Buku 2021, Perseroan masih mengalami *defisit cash-flow*. Defisit tersebut terjadi karena pendapatan tol belum cukup untuk mencukupi pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman, serta biaya operasi dan pemeliharaan. Perseroan juga telah melakukan *corporate action* untuk menyehatkan kondisi *cash-flow* Perseroan berupa Rencana *refinancing* Hutang Kredit Investasi (KI), Relaksasi Hutang Kredit Investasi atau penurunan Suku Bunga Bank serta pengajuan *Share Holder Loan* (SHL) dari pemegang saham sebesar Rp. 205 Miliar sesuai revisi RKAP 2021.
   Untuk pengajuan *refinancing* Hutang Kredit Investasi masih tertunda karena Pandemi Covid-19, sedangkan pengajuan SHL atau pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp 205 Milliar telah terealisasi relaksasi kredit berupa *Waiver* DSRA *(Debt Service Reserve Account)* melalui RUPS LB pada Tahun 2021. Mengingat Pandemi masih akan terjadi di Tahun 2022, Dewan Komisaris memastikan dan memberikan arahan kepada Direksi JBT agar terus melakukan efisiensi dan melakukan kontrol anggaran secara rutin untuk menekan pengeluaran dan kerugian yang dialami Perseroan. Komisaris juga meminta Perseroan untuk meminimalisir Laba/Rugi dan melakukan *balancing* serta mencari cara agar tidak terus terjadi kerugian bagi Perseroan setiap tahunnya.

4. **Pendapatan Usaha Lain**

   Pendapatan Usaha Lain juga diperoleh Perseroan yang berasal dari mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemasangan reklame, sewa lahan untuk lokasi kegiatan usaha dan sewa lahan untuk lokasi penggelaran kabel FO *(Fiber Optic)*. Perolehan Pendapatan Usaha Lain bertujuan untuk memberikan pemasukan dan meningkatkan pendapatan diluar pendapatan tol. Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan agar Direksi untuk dapat mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha lain dengan mencari dan melihat potensi bisnis.

5. **Persiapan KTT G20**

Pada tanggal 27 Desember 2021 melalui surat nomor: BM.07.03-P/1104 Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menginstruksikan Perseroan untuk melakukan beberapa kegiatan Penataan dan Beautifikasi untuk mendukung Kegiatan Kenegaraan KTT G20 yang meliputi pekerjaan seperti:

1. Penataan Tanaman (penanaman bougenvile dan tanaman lokal bali seperti Jepun Bali dan Pandan Laut)
2. Penghijauan (penanaman mangrove disekitaran jalan tol
3. Pengecatan Ulang (Kerb, Median, Railing dan Taper)
4. Coating Tiang Pancang

Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaannya agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Pemegang Saham yang kami hormati

Komisaris selalu memberikan arahan kepada Perseroan untuk meminimalisir Laba/Rugi dan melakukan balancing serta mencari cara agar tidak terus terjadi kerugian bagi perseroan setiap tahunnya. Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi agar selalu melakukan inovasi dan menangkap peluang-peluang usaha baru yang sejalan dengan bisnis inti perusahaan. Selain itu, Direksi diminta secara konsisten melakukan efisiensi dan inovasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol. Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada Pemegang Saham; PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., serta jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan atas dukungan dan kerjasama dalam memberikan kontribusi atas pencapaian kinerja Perseroan di Tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna Jalan Tol.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om... Santih... Santih... Santih... Om, Shalom, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Bagus Cahya Arinta B.
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris



Kompyang Raka Swandika
Komisaris
Wakil dari **Pemerintah Kabupaten Badung**

Lukman F. Laiza
Komisaris
Wakil dari **PT Angkasa Pura I (Persero)**

Bagus Cahya Arinta B.
Komisaris
Wakil dari **PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Edi Priyanto
Komisaris
Wakil dari **PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

A. A. Ngurah Maha Diptha
Komisaris
Wakil dari **Pemerintah Provinsi Bali**

Bagus Cahya Arinta B.

Komisaris Utama Wakil dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Bali Tol mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Utama PT Jasa Marga (Perseo) Tbk. dengan nomor AA.HC01.1616 tanggal 22 Februari 2022..

Kedudukan sebagai Komisaris Utama merupakan rangkap jabatan sebagai Direktur Human Capital & Transformasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Meraih gelar insiyur dari Universitas Brawijaya (1993) dan Jabatan sebelumnya di antaranya Direktur Utama PT Jasamarga Surabaya Mojokerto dan Division Head Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad.



Kompyang Raka Swandika

Komisaris Wakil dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili Pemerintah Kabupaten Badung sejak 1 Juni 2016.

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang didalam Akta Nomor 42 pada tanggal 18 Juni 2021, mengangkat kembali Kompyang Raka Swandika dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan untuk Periode ke 2 dengan masa jabatan 5 tahun, terhitung sejak 1 Juni 2021.

Meraih Gelar Sarjana Hukum (S1) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1981. Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum (S2) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2004. beberapa organisasi yang pernah dipimpin diantaranya Ketua KORPRI Kabupaten Badung tahun 2010 sampai dengan sekarang, Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung periode 2010 – 2016, Ketua Umum Cabang Olahraga Tarung Derajat Bali dari tahun 2005 hingga dengan sekarang, Ketua Pengurus PMI Kabupaten Badung tahun 2014 sampai dengan Sekarang, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Berahama (FKUB) Kabupaten Badung tahun 2015 sampai dengan sekarang.



Edi Priyanto

Komisaris Wakil dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Ditetapkan sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta PKR, Nomor 5 tanggal 15 Juli 2020.

Kedudukan sebagai Komisaris merupakan rangkap jabatan sebagai Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas.

Meraih Gelar (D3) jurusan higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari UNS pada 1998, Meraih gelar Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga (2002) dan Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen dari STIE Bank BPD Jateng (2007) dan jabatan sebelumnya di antaranya Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM Pelindo III, Senior Vice President Human Capital Services & HSSE Pelindo III, Senior Vice President Human Capital System and Strategy Pelindo III, Vice President Corporate Communications Pelindo III, Asisten Manager Pemasaran Pelindo III.



Lukman F. Laiza

Komisaris Wakil dari PT Angkasa Pura 1 (Persero).

Ditetapkan sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta PKR Nomor 5 tanggal 15 Juli 2020.

Kedudukan sebagai Komisaris merupakan rangkap jabatan sebagai Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 2018 sampai dengan saat ini.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Program dan Standardisasi Prasarana Bandar Udara Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan RI (2010-2013), Kepala Bidang P2B Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya (2014-2015), Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (2014-2015), Kepala Bandara Wamena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (2015), Direktur Teknik Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) (2015-2017), dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (2017-2018).



Anak Agung Ngurah Maha Diptha

Komisaris Wakil dari Pemerintah Provinsi Bali.

Ditetapkan sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 84 tanggal 27 November 2018.

Pada tahun 1997-1999 menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali dan pada tahun 2002-2004 menjabat sebagai General Manager PT Paramitha Auto Graha. Selain mengemban jabatan Komisaris PT Jasamarga Bali Tol, Beliau merupakan seorang wirausaha di Bali.

Menempuh pendidikan di Sekolah Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Nasional tahun 1982-1984 dan menempuh pendidikan Sarjana (SE) di Universitas Udayana jurusan Manajemen Perusahaan tahun 1984-1989.



Sambutan
Direktur Utama



I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pemegang Saham yang terhormat,

Pada Tahun 2021, Perseroan telah mengajukan usulan RKAP Tahun 2021 dengan fokus utama yaitu pengoperasian dan pemeliharaan rutin jalan tol, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan volume lalu lintas dan pendapatan tol, sehingga Pemegang Saham memberikan arahan untuk melakukan Revisi RKAP Tahun 2021 dan telah mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham melalui RUPS Luar Biasa Tahun 2021.

Sesuai arahan Pemegang Saham, Manajemen menetapkan Rencana Strategi Utama Perseroan untuk Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. **Pengoperasian Jalan Tol:**

   - Upaya peningkatan volume lalu lintas Jalan Tol
   - Mengoperasikan Jalan Tol yang efisien, bermutu tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional
   - Memberikan Pelayanan yang *excellence* bagi pengguna jalan
   - Memanfaatkan teknologi secara efisien dan tepat guna
   - Penerapan protokol kesehatan (6M) sebagai upaya pencegahan virus Covid-19

2. **Strategi Pengembangan Usaha lain:**

   Memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan non tol dengan tetap memperhatikan aspek aspek legal, lingkungan dan budaya setempat.

3. **Tanggung jawab kemasyarakatan dan kepedulian lingkungan:**

   - Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan komunitas pemerhati lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, adat dan budaya dalam rangka menciptakan keberlanjutan usaha.

Sedangkan Strategi Pendukung mencakup:

1. **Bidang Keuangan:**
   - Pengendalian keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan, mendukung pertumbuhan Perusahaan dan mempertahankan *financial sustainability*

2. **Organisasi dan Manajemen:**

   - Penerapan Tata Nilai Perusahaan yang baru dari Kementerian BUMN yaitu Tata Nilai AKHLAK
   - Melakukan *review*/penyempurnaan struktur organisasi yang efisien sesuai kebutuhan secara bertahap dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan
   - Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung Kompetensi Inti Perusahaan dimasa depan

3. **Kepatuhan dan Manajemen Risiko**
   Pengelolaan risiko dan penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan Nilai Perusahaan

Adapun Sasaran Pokok Bidang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol mencakup:

1. Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
2. Penerapan sistem pembayaran tol dengan elektronifikasi 100%
3. Penerapan system pembayaran tol dengan SLFF *(Single Lane Free Flow)* berbasis RFID
4. Modernisasi sistem dan teknologi operasi untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi tenaga kerja, mengurangi kecelakaan ,serta pengendalian pendapatan dan nilai Perusahaan
5. Menjaga sarana dan kondisi Jalan Tol dengan motto "*zero pothole*"
6. Pemilihan teknologi tepat guna untuk efektifitas pemeliharaan
7. Pemeliharaan prasarana berbasis PBC *(Performance Base Contract)*
8. Penggunaan "*Green Technology*"
9. Penerapan Protokol Kesehatan (6M) pada seluruh ruas Jalan Tol Bali Mandara

Sasaran Pokok Bidang Keuangan mencakup:

1. Investasi pengembangan usaha lain dilakukan dengan memperhatikan stabilitas *financial* jangka pendek dan jangka Panjang
2. Investasi peningkatan kualitas layanan operasional, memperhatikan rasio keuangan (*Ebitda Margin*, ROE, Pertumbuhan laba bersih, dll)
3. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan
4. Restrukturisasi Hutang Jangka Panjang Perusahaan, baik kepada kreditur maupun pemegang saham

Sasaran Pokok Bidang Organisasi dan Manajemen:

1. Menerapkan Sistem manajemen Terintegrasi dan penataan SDM
2. Penerapan K3 dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan (6M) sebagai upaya dalam pencegahan /penanggulangan virus covid-19 di lingkungan kerja Perusahaan

Sasaran Pokok Bidang Pengembangan Usaha mencakup:

1. Pengembangan usaha dengan memaksimalkan aset *(tangible/ intangible)*, yang masih berkaitan/ mendukung bisnis pengoperasian jalan tol.
2. Usaha lain tersebut harus memiliki kelayakan *financial* lebih tinggi dari IRR jalan tol.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Dalam perjalanan di Tahun 2021, Perseroan masih tetap menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19, seperti: Pendapatan Tol mengalami penurunan sebesar 26,32% dibandingkan Tahun 2020. Penurunan pendapatan tol tersebut terjadi disebabkan oleh turunnya volume lalu lintas sebesar 31,25%, penurunan volume lalu lintas tersebut disebabkan karena berlakunya Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing atau WNA masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sehingga terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik ataupun asing. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kunjungan wisatawan Mancanegara ke Bali selama Tahun 2021 menjadi yang paling rendah selama 10 Tahun terakhir yaitu dengan jumlah wisatawan mencapai 1.069.473 orang baik lokal maupun Mancanegara, jumlah wisatawan tersebut jauh lebih sedikit Dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Bali masih diangka -2,93% serta adanya program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Tahun 2021.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Meskipun Perseroan menghadapi tantangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 di Tahun 2021, dari segi operasional Perseroan tetap memastikan aspek kenyamanan, keamanan, dan kelancaran Jalan Tol Bali Mandara tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada Tahun 2021, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah melakukan inspeksi Jalan Tol Bali Mandara dan hasil inspeksi BPJT tersebut menunjukkan Perseroan telah memenuhi SPM Tahun 2021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah mampu menjaga dan mempertahan kan sarana dan kondisi Jalan Tol sesuai dengan persyaratan SPM serta telah berhasil mewujudkan Jalan Tol yang lancar, aman, dan nyaman bagi para pengguna jalan serta tetap menerapkan protokol Kesehatan (6M) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan.

Dari segi SDM, pada Tahun 2021 Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan demi menjaga kesehatan karyawan serta beberapa program penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dilingkungan kerja Jalan Tol Bali Mandara. Adapun kegiatan tersebut adalah secara rutin melakukan penyemprotan desinfektan, melakukan kegiatan *swab antigen* guna mencegah penularan virus Covid-19 di lingkungan Perseroan, pemberian multivitamin kepada seluruh karyawan Perseroan. Selain itu mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan (6M) dalam lingkungan Perseroan dengan cara menyediakan masker, sarung tangan, dan *faceshield* bagi karyawan serta menerapkan program *Work From Home* (WFH).

Dari segi Keuangan, total pendapatan yang diperoleh Perseroan sepanjang Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.42,057 miliar, Pencapaian Rugi Bersih Perseroan pada Tahun 2021 terealisasi yaitu sebesar (Rp.155,933 miliar) di bawah Revisi RKAP 2021 yakni (Rp.170,138 miliar) Perseroan telah berusaha melakukan efisiensi dengan cara mengajukan permohonan kompensasi bunga relaksasi dan perpanjangan waktu pengembalian utang pokok kepada perbankan, Perseroan juga melakukan efisiensi dengan cara melakukan pemangkasan pada biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya SDM serta biaya administrasi dan umum.

Sepanjang Tahun 2021, Perseroan telah melakukan efisiensi sebanyak 8,43% atau sebesar Rp.9,593 miliar dari beban keuangan dibandingkan Tahun 2020. Dari segi Pendapatan Usaha Lain-lain dan Hubungan Masyarakat, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatan usaha di bidang iklan berupa melakukan audiensi ke Sekretaris Daerah Kabupaten Badung untuk memperoleh ijin iklan serta menjajaki peluang bisnis di bidang energi ramah lingkungan yang terbarukan seperti pengembangan solar cell, Pada Tahun 2021, dalam kondisi pandemi Covid-19 Perseroan melakukan kegiatan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) berupa penghijauan dengan melakukan penanaman pohon mangrove serta tetap memperhatikan protokol Kesehatan, dan Perseroan kembali memperoleh penghargaan "*Gold Category*" dalam ajang *CSR Award* yang diselenggarakan oleh DPD Provinsi Bali pada Tahun 2021.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Dalam menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi Covid-19 sepanjang Tahun 2021 , Perseroan telah berhasil melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kinerja keuangan dan menekan kerugian yang dialami Perseroan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari upaya *team-work* di Perseroan serta dukungan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang senantiasa mendorong agar Perseroan terus menerus meningkatkan kinerja secara optimal.

Pada kesempatan ini, kami atas nama Direksi PT Jasamarga Bali Tol, mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Direksi juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris yang telah membantu, mengawasi, dan memberikan arahan dan saran sehingga kinerja Perseroan tetap baik dan terjaga.

Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja secara *team work* sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja yang baik selama Tahun 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga dapat bekerja dengan lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om... Santih... Santih... Santih... Om, Shalom, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semuanya

I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama

Profil Direksi



I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama
Wakil dari **PT Jasa Marga** (Persero) Tbk.

I Gusti Putu Arya Budhi Astawa
Direktur Keuangan
Wakil dari **PT Pelabuhan Indonesia** (Persero)

I Ketut Adiputra Karang

Direktur Utama Wakil dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan menjadi Direktur Utama PT Jasmarga Bali Tol berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 1 September 2020.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Udayana (2011). Jabatan sebelumnya Toll Collection Department Head Operation & Maintenance Management Group.

Mengawali karir di PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2012 sebagai Staf Pratama Satu Bagian Hubungan Industrial, 2013 s.d 2016 menjabat sebagai Assistant Manager Toll Collection System Planning and Related System Divisi Operation Management, 2016 s.d 2018 Toll Collection System Planning Manager Divisi Operation Management dan 2018 s.d 2019 Assistant Vice President Toll Collection Management Divisi Operation Management.



I Gusti Putu Arya Budhi Astawa

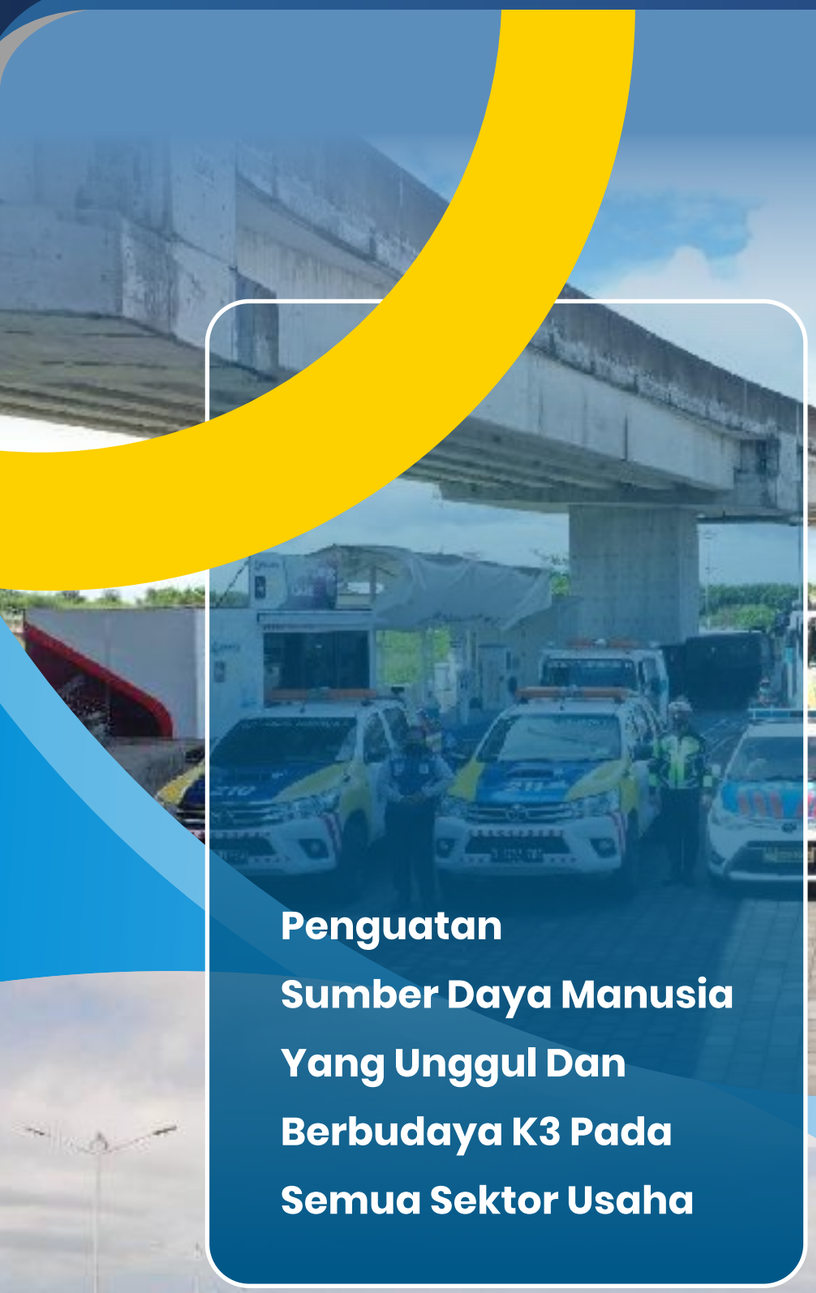
Direktur Keuangan Wakil dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Ditetapkan menjadi Direktur Keuangan PT Jasamarga Bali Tol berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 1 Oktober 2020.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (2005).

Jabatan sebelumnya Vice President Treasury & Fund Management PT Pelindo III (Persero) dan pada tahun 2018 menjabat sebagai Regional Manager Of Finance PT Pelindo III (Persero) Regional Jawa Tengah.









Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha

Laporan Kegiatan

Laporan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol 63

Pemeriksaan SPM 108

Laporan Kegiatan Bidang Hukum 109

RUPS Sirkuler 111

Rups Tahunan Tahun Buku 2020 112

RUPS Luar Biasa 115

Penutupan Jalan Tol Hari Raya Nyepi 119

Pembagian Masker dan Handsitizer dalam rangka HUT JBT Ke 10 120

Pembagian Kartu Elektronik dan Sosialisasi *Road Safety Rangers* 121

04





Laporan Pengoperasian
Dan Pemeliharaan Jalan Tol



Pengoperasian Jalan Tol
(Jasamarga Tollroad Operator)

Pengoperasian Jalan Tol Bali Mandara dilaksanakan meliputi lingkup pengoperasian sebagai berikut :

a. **Bidang layanan transaksi,** meliputi jasa layanan yang diberikan kepada pemakai jalan tol dan pengendalian pendapatan tol yang dilakukan melalui Sistem Pengumpulan Tol.

b. **Bidang layanan lalu lintas dan kamtib**, meliputi manajemen Lalu Lintas di jalan tol yang pada dasarnya adalah aktifitas di jalan tol yang bertujuan memberikan pelayanan lalu lintas di jalan tol sehingga pemakai jalan lancar dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, aman dari gangguan kamtibmas, tertib berlalu lintas, dan nyaman sepanjang perjalanan.

Data Umum Jalan Tol Bali Mandara

No	Uraian	Satuan	Data
1	**Panjang Jalan Tol**	**km**	**12.7**
	a. Jalan Tol diatas perairan	km	8.92
	b. Akses Ngurah Rai	km	1.58
	c. Akses Benoa	km	2.20
2	**Jumlah Gerbang Tol**	**Gerbang**	**3**
3	**Jumlah Gardu Tol Otomatis (GTO)**	Gardu	22
	a. GTO Multi Golongan (kendaraan roda 4 atau lebih)	Gardu	3
	b. GTO Khusus Golongan Non Bus	Gardu	9
	c. GTO kendaraan roda 2 (motor)	Gardu	10
4	**Jumlah Wilayah Pemantauan**	**Beat**	**2**
	a. Jalur kendaraan roda empat atau lebih		
	b. Jalur kendaraan sepeda motor		

Sumber Daya Manusia Unit Kerja Operasi

No.	URAIAN	UNIT KERJA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Manager Area	Sub Unit Traffic Service, Asset Security & Toll Collection	Orang	1	PKWTT
2	Toll Collection Supervisor	Sub Unit Toll Collection	Orang	5	PKWTT
3	Traffic Service Supervisor	Sub Unit Traffic Service	Orang	5	PKWTT
4	Operation Officer	Sub Unit Toll Collection	Orang	2	PKWTT
5	Customer service Administration Officer	Sub Unit Toll Collection	Orang	2	PKWTT
6	Traffic Management Administration Officer	Sub Unit Traffic Service	Orang	2	PKWTT
7	Customer Service	Sub Unit Toll Collection	Orang	11	PKWTT
8	Customer Service	Sub Unit Toll Collection	Orang	6	PKWT
9	Mobile Customer Service	Sub Unit Traffic Service	Orang	13	PKWTT
10	Technician Officer	Technician	Orang	4	PKWTT
11	Petugas Koperasi Karyawan	Sub Unit Toll Collection	Orang	4	Kontrak
12	Petugas Ambulans	Sub Unit Traffic Service	Orang	5	Mitra Kerja
13	Petugas Derek	Sub Unit Traffic Service	Orang	8	Mitra Kerja
14	Petugas Satpam	Sub Unit Traffic Service	Orang	21	Mitra Kerja
15	PJR Tol	Sub Unit Traffic Service	Orang	12	Mitra Kerja
16	Pengamanan Atas Laut (Pam Laut)	Sub Unit Traffic Service	Orang	9	Mitra Kerja
		JUMLAH	Orang	110	

Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional





Gardu Tersedia

No.	Gerbang Tol	Gardu Tersedia	Mobil		Motor
			Gardu Multi	Gardu Single	
1	Nusa Dua	8	1	3	4
2	Ngurah Rai	7	1	3	3
3	Benoa	7	1	3	3
	Jumlah	**22**	**3**	**9**	**10**

Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional



Gerbang Tol Benoa



Gerbang Ngurah Rai



Gerbang Tol Nusa Dua

Armada Pelayanan Lalu Lintas

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Patroli Mobil	Unit	2
2	Rescue	Unit	1
3	Ambulance	Unit	1
4	Derek	Unit	2
5	PJR Mobil	Unit	2
6	PJR Sepeda Motor	Unit	1
7	Patroli Sepeda motor	Unit	1
	Jumlah	**Unit**	**10**

Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional



Pencapaian Terhadap Rencana Tahun 2021

A. Laporan Pemenuhan Waktu Pelayanan Transaksi

Waktu transaksi merupakan salah satu indikator pelayanan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Gardu Tol Otomatis (GTO) Sistem Transaksi Terbuka

Gerbang Tol	Bulan	Tolak Ukur Waktu Transaksi (Detik)	Waktu Transaksi Rata2 Gerbang (Detik)	Pencapaian SPM (≤ 5 Detik)
		a	b	%
Nusa Dua	Januari	5 detik	1,82	100%
	Februari		1,70	100%
	Maret		1,61	100%
	April		1,46	100%
	Mei		1,49	100%
	Juni		1,58	100%
	Juli		1,59	100%
	Agustus		1,57	100%
	September		1,54	100%
	Oktober		1,52	100%
	November		1,56	100%
	Desember		1,52	100%
Rata - Rata Gerbang Nusa Dua			**1,58**	**100%**
Ngurah Rai	Januari	5 detik	2,17	100%
	Februari		2,05	100%
	Maret		1,79	100%
	April		1,44	100%
	Mei		1,48	100%
	Juni		1,55	100%
	Juli		1,53	100%
	Agustus		1,51	100%
	September		1,50	100%
	Oktober		1,49	100%
	November		1,48	100%
	Desember		1,46	100%
Rata - Rata Gerbang Ngurah Rai			**1,62**	**100%**
Benoa	Januari	5 detik	1,94	100%
	Februari		1,98	100%
	Maret		1,69	100%
	April		1,42	100%
	Mei		1,56	100%
	Juni		1,66	100%
	Juli		1,64	100%
	Agustus		1,60	100%
	September		1,57	100%
	Oktober		1,54	100%
	November		1,58	100%
	Desember		1,54	100%
Rata - Rata Gerbang Benoa			**1,64**	**100%**
Rata - Rata 3 Gerbang (Nusa Dua, Ngurag Rai, Benoa)			**1,61**	**100%**

Sumber : Hasil/Uji Petik Pengukuran Waktu Transaksi Rata-Rata Gerbang (Nusa Dua -Ngurah Rai - Benoa)

Keterangan:

- SPM Waktu Transaksi dilakukan sebanyak 4 kali/bulan
- Target Pemenuhan Waktu Transaksi maksimal 5 detik

B. Laporan Pemenuhan Waktu Operasi Gardu (PWOG)

Waktu transaksi merupakan salah satu indikator pelayanan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Target Waktu Operasi Gardu Pemenuhan Waktu Operasi gardu sebesar 98%

Gardu Tol Otomatis (GTO) Sistem Terbuka

Gerbang Tol	Bulan	Total Rencana Waktu Operasi Gardu	Standar		Pencapaian	
			PWOG	Jam/Bulan	Waktu Operasi	%
		a	b	(a*b/100)	c	(c/a)
Nusa Dua	Januari	3.441	98%	3.372	3.438	100%
	Februari	3.108	98%	3.046	3.031	98%
	Maret	3.330	98%	3.263	3.267	98%
	April	3.330	98%	3.263	3.306	99%
	Mei	3.441	98%	3.372	3.408	99%
	Juni	3.330	98%	3.263	3.317	100%
	Juli	3.441	98%	3.372	3.434	100%
	Agustus	3.224	98%	3.160	3.294	102%
	September	3.120	98%	3.058	3.224	103%
	Oktober	3.441	98%	3.372	3.438	100%
	November	3.330	98%	3.263	3.311	99%
	Desember	3.937	98%	3.858	3.887	99%
Rata – Rata	**Total**	**3.373**	**98%**	**3.305**	**3.363**	**100%**
Ngurah Rai	Januari	2.697	98%	2.643	2.669	99%
	Februari	2.436	98%	2.387	2.410	99%
	Maret	2.400	98%	2.352	2.464	103%
	April	2.400	98%	2.352	2.426	101%
	Mei	2.232	98%	2.187	2.356	106%
	Juni	2.610	98%	2.558	2.573	99%
	Juli	2.480	98%	2.430	2.570	104%
	Agustus	2.480	98%	2.430	2.575	104%
	September	2.400	98%	2.352	2.461	103%
	Oktober	3.224	98%	3.160	3.411	106%
	November	2.400	98%	2.352	2.343	98%
	Desember	2.728	98%	2.673	2.717	100%
Rata – Rata	**Total**	**2.541**	**98%**	**2.490**	**2.581**	**102%**
Benoa	Januari	3.162	98%	3.099	3.139	99%
	Februari	2.856	98%	2.799	2.831	99%
	Maret	3.060	98%	2.999	3.033	99%
	April	3.060	98%	2.999	3.053	100%
	Mei	3.162	98%	3.099	3.140	99%
	Juni	3.060	98%	2.999	3.047	100%
	Juli	3.162	98%	3.099	3.152	100%
	Agustus	2.945	98%	2.886	3.047	103%
	September	2.850	98%	2.793	2.970	104%
	Oktober	3.162	98%	3.099	3.134	99%
	November	3.060	98%	2.999	3.024	99%
	Desember	2.945	98%	2.886	2.996	102%
Rata – Rata	**Total**	**3.040**	**98%**	**2.980**	**3.047**	**100%**
Total Rata – Rata	Januari	3.100	98%	3.038	3.082	99%
	Februari	2.800	98%	2.744	2.757	99%
	Maret	2.930	98%	2.871	2.921	100%
	April	2.930	98%	2.871	2.928	100%
	Mei	2.945	98%	2.886	2.968	101%
	Juni	3.000	98%	2.940	2.979	99%
	Juli	3.028	98%	2.967	3.052	101%
	Agustus	2.883	98%	2.825	2.972	103%
	September	2.790	98%	2.734	2.885	103%
	Oktober	3.276	98%	3.210	3.328	102%
	November	2.930	98%	2.871	2.893	99%
	Desember	3.203	98%	3.139	3.200	100%

Sumber : Dari perhitungan data PWOG (Pemenuhan Waktu Operasi Gardu)

Keterangan:

- Target Waktu Pemenuhan Waktu Operasi gardu sebesar 98%.
- Pencapaian Waktu Operasi Gardu ≤98% dikarenakan gardu ditutup untuk perbaikan dan penurunan volume lalu lintas sehingga gardu operasi ditutup sementara .
- Penurunan volume lalu lintas disebabkan adanya pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM oleh pemerintah Pemerintah Pusat

Bidang Layanan Transaksi



Bidang layanan transaksi merupakan salah satu jenis jasa layanan yang diberikan kepada pemakai jalan tol dalam rangka membayar tol sesuai dengan tarif tol yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Pengaturan terhadap bidang layanan transaksi dilakukan melalui Sistem Pengumpulan Tol.

Sistem Pengumpulan Tol ini bertujuan untuk memberikan layanan transaksi tol dan pengelolaan pendapatan tol. Sistem yang terkait dengan Sistem Pengumpulan Tol adalah sistem transaksi dan juga sistem pentarifan. Sistem Transaksi yang berlaku di ruas jalan tol Bali Mandara adalah sistem terbuka.

Besaran tarif tol adalah berdasarkan KEPMEN PUPR: 1234/KPTS/M/2019
(Berlaku tgl 31 Januari 2020) :

Sistem Transaksi Terbuka

No	Kendaraan	Tarif (Rp.)	Panjang Ruas (Km)
1	Golongan I	12,500	12,7
2	Golongan II	19,000	12,7
3	Golongan III	19,000	12,7
4	Golongan IV	25,000	12,7
5	Golongan V	25,000	12,7
6	Golongan VI	5,000	12,7

Penggolongan jenis kendaraan di jalan tol adalah :



Pengendalian Transaksi Tol

a. Pemeriksaan Awal dan Akhir Tugas

Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan terhadap pendapatan tol, dilakukan pemeriksaan badan terhadap personil pada saat awal dan berakhirnya tugas. Dibawah pengawasan *Manager Area/ Customer Service Supervisor.*





b. *Briefing*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan serta meningkatkan keterampilan kerja, secara rutin telah dilaksanakan pemantapan materi dan penguasaan pengoperasian peralatan tol di Kantor Operasional dalam bentuk Briefing setiap awal tugas dari Manager Area/ Customer Service *Supervisor.*




Pencapaian Pendapatan Tol Tahun 2021

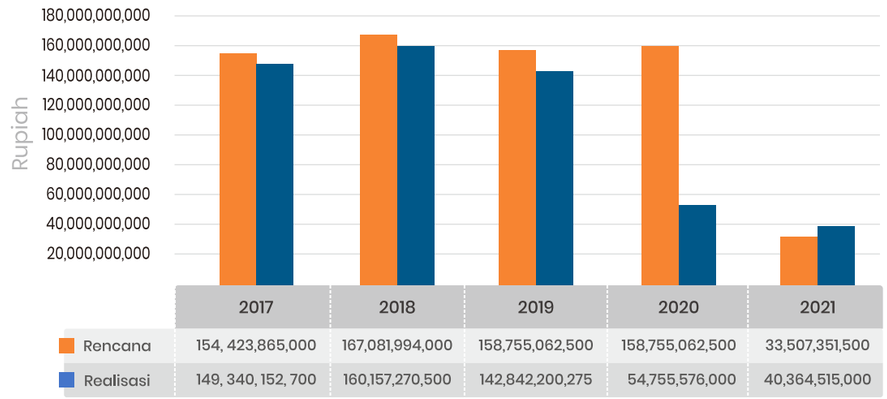
A. Perkembangan Pendapatan Tol

Realisasi perkembangan pendapatan tol Tahun 2020 sebesar Rp.54.755.576.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 40.364.515.000, maka pendapatan tol mengalami penurunan sebesar 26%. Hal tersebut disebabkan adanya pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh pemerintah yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan akhir tahun, kondisi tersebut memberikan dampak terhadap pencapaian pendapatan tol Bali Mandara Tahun 2021.

Data pendapatan tol

Uraian	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Tol	Rencana	154, 423,865,000	167,081,994,000	158,755,062,500	158,755,062,500	33,507,351,500
	Realisasi	149, 340, 152, 700	160,157,270,500	142,842,200,275	54,755,576,000	40,364,515,000

Grafik Perkembangan Pendapatan Tol



Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional

Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi Tahun 2021

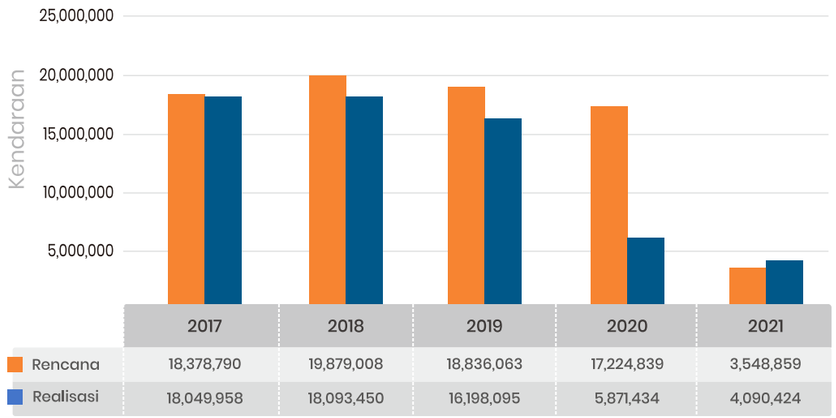
B. Perkembangan Volume Lalu Lintas

Realisasi volume lalu lintas tahun 2020 sebesar Rp 5.871.434, jika dibandingkan dengan realisasi volume lalu lintas tahun 2021 sebesar Rp. 4.090.424, maka volume lalu lintas mengalami penurunan 30,3%

Data Volume Lalu lintas

Uraian	Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Lalu Lintas	Rencana	18,378,790	19,879,008	18,836,063	17,224,839	3,548,859
	Realisasi	18,049,958	18,093,450	16,198,095	5,871,434	4,090,424

Grafik Perkembangan Volume Lalu Lintas



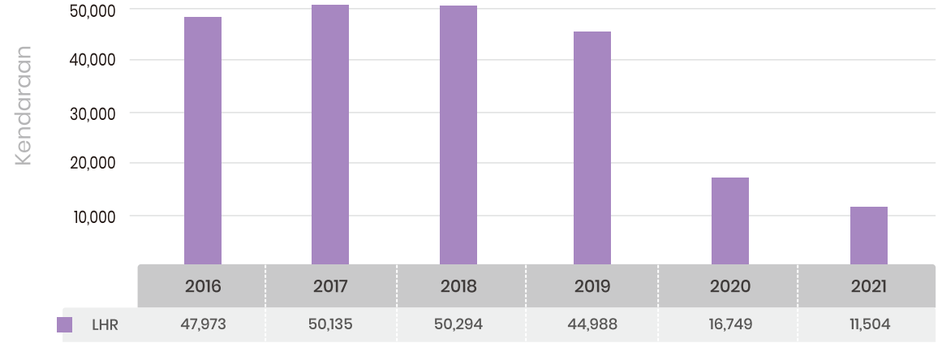
Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional

C. Perkembangan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)

Berdasarkan perkembangan volume lalu lintas harian rata - rata (LHR). Tahun 2021 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 32,7%. Hal tersebut disebabkan adanya pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh pemerintah yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan akhir tahun, kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kondisi volume lalu lintas jalan tol Bali Mandara Tahun 2021.

Data Volume LHR

Perkembangan Lalin Harian Rata-Rata (LHR)



Sumber : Data dari Unit Bidang Operasional



Bidang Layanan Lalu Lintas



Manajemen Lalu Lintas di jalan tol pada dasarnya adalah aktifitas di jalan tol yang bertujuan memberikan pelayanan lalu lintas di jalan tol sehingga pemakai jalan :

a. Lancar dalam perjalanan
b. Selamat sampai tujuan
c. Aman dari gangguan
d. Tertib berlalu lintas
e. Nyaman sepanjang perjalanan

Lingkup Layanan lalu lintas adalah :

1. **Inspeksi fungsi dan keberadaan sarana lalu lintas meliputi :**

   a. **Sarana Lalu Lintas** ; Memastikan keberadaan dan fungsi sarana lalu lintas meliputi : Rambu Darurat Kecelakaan, *Rubbercone* dan sarana pendukung lainnya agar sesuai dengan ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal.

   b. **Sarana Pengaturan Lalin** : *Guide Post*, Reflektor, Lampu Lalu Lintas *(Warning Light)*, *Rubber Cone* ; Memastikan keberadaan dan fungsi sarana pengaturan lalu lintas agar sesuai dengan ketentuan standar jalan tol dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

2. **Pelayanan Lalu Lintas meliputi :**

   Pelayanan kepada pengguna jalan tol dilakukan oleh Petugas Pelayanan Lalu Lintas merupakan satu kesatuan sistem pelayanan yang utuh dalam satu kesatuan wilayah Jalan Bali Mandara (Ruas Nusa Dua – Ngurah Rai –Benoa).

3. **Layanan Informasi**

   Dalam rangka memberikan pelayanan bagi ketersediaan informasi kepada pengguna jalan, layanan informasi yang disediakan bagi pengguna jalan adalah:

   a. **Info Tol melalui telepon/ Call Center** yang beroperasi setiap hari selama 24 jam :
      - *Call Center* : **14080**
      - *Call Center* Lokal : **0361729999**

   b. **Penempatan CCTV** dengan menggunakan jaringan FO *(Fiber optic)* untuk pemantauan kondisi lalu lintas yang dioperasikan setiap hari selama 24 jam sebanyak 50 Titik.

   c. **Penempatan alat deteksi kecepatan angin** *(anemometer)* pada 2 (dua) titik serta dikendalikan oleh Sentral Komunikasi (Dewata).

   d. **Penempatan VMS Gerbang** untuk memberikan informasi kepada pelanggan ketika akan memasuki Gerbang Tol terkait : kondisi lalu lintas, kondisi cuaca, kecepatan angin, serta informasi lain yang perlu disampaikan kepada pelanggan dimonitoring serta dikendalikan oleh Sentral Komunikasi (Dewata).



VMS Gerbang



Alat deteksi Kecepatan angin



Monitoring Kecepatan Angin Dan Cuaca





Monitoring CCTV

Ruangan Sentral Komunikasi (Dewata)

A. KEGIATAN

Kegiatan pengoperasian bidang layanan lalu lintas pada Tahun 2021 adalah:

1. Kegiatan rutin

Bidang Pelayanan Lalu Lintas :

a. Pengaturan observasi Petugas Patroli; pola tugas Petugas Patroli di ruas tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa dibagi dalam 2 beat meliputi :

1. Beat 1 Observasi yang dilakukan oleh petugas Patroli 211 melakukan pengamatan pada jalur roda empat atau lebih.



2. Beat 2 Observasi pada lajur sepeda motor dilakukan oleh Petugas Patroli Motor.



b. Pelaksanaan prosedur penempatan Petugas Patroli (kendaraan patroli, derek, ambulans, rescue dan PJR); Penindakan oleh PJR terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan tol, dalam rangka menciptakan kedisiplinan berkendara yang berkeselamatan.

c. Pelaksanaan penderekan kendaraan pemakai jalan tol yang mengalami gangguan, selama Tahun 2021 melakukan bantuan penderekan kepada pengguna jalan yang mengalami gangguan sejumlah **67** terdiri dari : Roda empat atau lebih sebanyak **15 kendaraan** dan Roda dua sebanyak **52 kendaraan**.

Bidang Keamanan dan Ketertiban (Kamtib):

a. Penempatan 1 orang petugas Satpam pada setiap gerbang tol (Nusa Dua, Ngurah Rai dan Benoa), melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset

b. Melakukan penertiban terhadap segala hal yang berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di jalan tol maupun di sekitar koridor jalan tol, baik yang dilakukan oleh warga, pekerja maupun pengguna jalan (warga yang berkumpul di jalan tol, menghalau orang gila di jalan tol, pengamanan terhadap dampak tawuran warga di sekitar koridor jalan tol, dll).



Adapun kegiatan – kegiatan Operasional Selama Tahun 2021, meliputi :

Rapat Evaluasi Kinerja MCSS & CSS





Rapat tersebut di hadiri dan dipimpin langsung oleh Manager Area , dan Para Supervisor Customer Service dan Mobile Customer Service Manager Area menghimbau agar seluruh Customer Service Supervisor selalu memonitoring seluruh keberfungsiaan peralatan tol (CDP, LPR, CCTV) dan memastikan petugas Customer Service bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Begitu juga dengan Para Mobile Customer Service Supervisor Agar Bertempat di ruang rapat kantor pull ruas PT Jasamarga Bali Tol yang dimulai pukul 09:00 - selesai. Supervisor Customer Service dan Mobile Customer Service Supervisor Ruas Tol Bali Mandara mengadakan rapat evaluasi kinerja setiap bulan. Rapat yang bertujuan untuk memonitoring kinerja karyawan di Ruas Tol Bali Mandara dan pelayanan kepada pengguna jalan tersebut diikuti dengan santai namun tetap serius serta fokus terhadap faktor faktor yang dituju. Selalu Memonitoring Jalur Tol Bali Mandara Memastikan SPM dilakukan sesuai SOP yang berlaku, Memberikan pelayanan yang ramah kepada pengguna jalan yang me ngalami permasalahan pada kendaraan dan selalu pastikan juga sarana Kelengkapan Petugas selalu dimonitor ketersediannya apa bila ada kekurangan segera di Laporkan.

Dalam kesempatan ter sebut juga Manager Area menambahkan untuk seluruh Supervisor selalu mengisi dengan konsisten form- form yang sudah disediakan seperti form pengendalian CCTV, form sosialisasi kepada petugas Customer Service serta form KTTM dan Form kerusakan peralatan tol. untuk seluruh Supervisor juga harus selalu memperhatikan kebersihan lingkungan masing-masing dan selalu memonitor Handy Talky (HT). Pertemuan diakhiri dengan melakukan penyampaian pendapat dan mengumpulkan berbagai ide, koordinasi, perencanaan, sosialisasi antara Customer Service Supervisor dan Mobile Customer Service Supervisor dengan Manager Area agar kedepannya Ruas Bli Mandara semakin lebih baik lagi dari segala aspek pelayanan

Rapat Evaluasi Kinerja Staff




Traffic Management, Toll Collection Management dan *Technician Management* JMTO Regional Bali di Ruang Rapat Kantor pull ruas PT Jasamarga Bali tol dari jam 09.00 - Selesai , Rapat Ini di lakukan Untuk Memastikan Kinerja Para Staff Operasional JMTO Regional Bali Rencada Kerja dan Realisasi pekerjaan disetiap bulan berjalan dengan baik dan target - target pencapaian kinerja dapat terselesaikan disetiap bulannya. Rapat yang di Pimpin Oleh Manager Area Bapak Nursamsul Thamrin menegaskan kepada para staff Rencana kerja di setiap bulannya agar selalu terjadwal dengan baik dan kinjerja kehadiran agar sesuai SOP Yang berlaku datang 15 menit sebelum Jam kerja.

Rapat Kordinasi Sebelum Melaksanakan Kegiatan *Audit Internal*




Sebelum melakukan *Audit Internal* di Ruas Tol Bali Mandara Para Auditor Melakukan Rapat Koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan *Audit internal*. Rapat koordinasi yang langsung di pimpin oleh Manager Area Ruas Tol Bali Mandara dilakukan rutin setiap bulan sebelum melakukan kegiatan *Audit*, yang bertujuan untuk memastikan mekanisme pelaksanaan *audit* sesua dengan rencana dan terkoordinir dengan baik hingan selesai kegiatan.

Audit Internal




Kegiatan *Audit internal* dilakukan setiap bulan Sebagai upaya untuk memastikan bahwa *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pelaksanaan Operasional Ruas Tol Bali Mandara, Baik itu di unit kerja Transaksi maupun unit kerja *Traffic* dan Bidang Pemeliharaan dijalankan dengan baik dan benar.

Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD).

Kegiatan Pelatihan Penanganan Gawat Darurat ini Bertujuan untuk Menguji personil, Sistem/prosedur dan Evakuasi , Kegiatan ini dilakukan rutin dan terjadwal setiap bulan agara Kemapuan Petugas saat Penaganan Gawat darurat Seperti kejadian Kebakaran, Gempa Bumi , penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), serta penanganan Kecelakaan di Ruas Tol Bali Mandara dapat dengan sigap dan teruji kemampuannya saat penanganan.

Adapun kegiatan Penanganan Gawat Darurat, antara lain :

1. Pelatihan Tanggap Darurat Pemadam Kebarakan Menggunakan APAR & Karung Basah
2. Pelatihan Tanggap Darurat Gempa Bumi
3. Pelatihan Tanggap Darurat Penanganan ODGJ Masuk Tol
4. Pelatihan PPGD Korban Kecelakaan




1. Pelatihan Tanggap Darurat Pemadam Kebarakan Menggunakan APAR & Karung Basah





2. Pelatihan Tanggap Darurat Gempa Bumi





3. Pelatihan Tanggap Darurat Penanganan ODGJ Masuk Tol





4. Pelatihan PPGD Korban Kecelakaan

Pelatihan Penggunaan Alat *Rescue*









Dalam meningkatkan kesigapan dan pengetahuan saat menggunakan alat rescue dan penanganan terhadap korban kecelakaan. LJT Ruas Bali Mandara menggelar pelatihan *rescue*, Latihan ini rutin di lakukan setiap bulannya dan terjadwal di Kantor Operasional Pull Ruas PT Jasamarga Bali Tol.

Peserta pelatihan *rescue* ini diikuti oleh karyawan LJT yang sudah terjadwal, seperti Petugas *Mobile Customer Service*, Paramedis dan *Mobile Customer Service supervisor*. Diadakannya pelatihan *rescue* ini bertujuan untuk melatih kesiagaan petugas dalam melakukan penyelamatan pada korban kecelakaan di jalur yang

Dengan diadakannya Pelatihan *Rescue* ini, kemampuan petugas dalam mengoperasikan alat dan penanganan terhadap korban terus meningkat, selain itu juga dengan berkumpulnya para petugas, bisa menambah solid tim.

Koordinasi menjadi semakin baik, sehingga lebih maksimal lagi dalam penanganan kecelakaan dan membantu korban di ruas Tol Bali Mandara membutuhkan alat rescue, serta perkanalan dan pengetahuan cara mengoperasikan alat *rescue*. Peserta berlatih mulai dari perkenalan alat, mengoperasikan, dan juga penyelamatan terhadap korban kecelakaan.

Pelatihan *Basic Life Suport (FIRST AID TRAINING)*




Pelatihan ***First AID Training*** bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dan dalam Penanganan Kegawat daruratan, dengan melibatkan Seluruh petugas *Mobile Customer service* di Ruas Tol Bali Mandara. Tujuan pelatihan *First AID training* ini diharapkan dapat di implementasikan secara nyata pada saat petugas melakukan penanganan kecelakaan pemakai jalan. Kegiatan Pelatihan *First AID* akan dilaksanakan secara terjadwal dan termasuk dalam program kerja Unit dimana pelaksanaan nya akan diinisiai oleh HCPC, Bekerja sama dengan Rumah sakit.

Latihan Persiapan *Road Rescue Competition* 2021




PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar *Roadster Rescue Competition* 2021 yang diikuti oleh Jasa Marga Group secara *virtual*. Ajang ini merupakan kompetisi tahunan yang diadakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam rangka HUT Jasa Marga sebagai salah satu langkah untuk memotivasi sekaligus meningkatkan kompetensi *Roadster*, sebutan untuk karyawan Jasa Marga, dalam menangani situasi kecelakaan lalu lintas di jalan tol, baik secara medis maupun secara teknis. PT Jasamarga Bali Tol Sebagai APJT menjadi salah satu peserta lombadan langsung mempersiapkan kegiatan latihan perisapan RRC 2021 yang sudah terjadwal secara sistematis untuk memper siapkan team yang akan mengikuti perlombaan tersebut

Latihan Simulasi Penanganan Korban Laka Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan




Mengingat Penyebaran Virus Covid-19 di tahuan 2021 Penyebarannya semakin meluas, PT Jasamarga Bali Tol berupaya melakukan kegitan simulasi penanganan korban kecelakaan di ruas Tol Bali Mandara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di ruas Tol Bali mandara.

Kegitan ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan di ruas Tol Bali Mandara petugas yang menangani penyelamatan korban kecelakaan sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan aman dari terpapar virus Covid-19 saat penyelamatan korban

Pengecekan APD Petugas




Kegiatan Pengecekan Alat Pelindung Diri (APD) dilakukan setiap selesai breafing sebelum melakukan pergantian shift di ruas Tol Bali Mandara. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh personil sudah lengkap menggunakan alat pelindung diri (APD) Sebelum memulai aktifitas bekerja seperti sudah menggunakan Rompi dan sepatu *safety*.

APD sendiri memiliki arti yaitu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. PT Jasamarga Sangat Konsen

Pengecekan Saturasi O2 , Tekanan Darah dan Suhu Tubuh Petugas Operasional




Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Pelacakan / Tracing Covid-19 terhadap seluruh Karyawan dan Mitra Kerja di Ruas Tol Bali Mandara yang dilaksanakan oleh Petugas Paramedis setiap shift, Pengecekan ini meliputi antara lain : pengecekan saturasi oksigen, nadi, suhu tubuh, dan tekanan darah.
Selain pengecekan tersebut Petugas Paramedis akan menanyakan kondisi Karyawan, Apabila Karyawan tersebut terindikasi akan dilakukan Swab Antigen selanjutnya hasil Swab Antigen tersebut akan menentukan Karyawan dalam kondisi sehat atau suspect. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 di Ruas Tol Bali Mandara

Pengecekan SPM Oleh Bina Marga, Kementrian PUPR






Audit BPJT







Rapat Evaluasi Kinerja Satpam




Rapat evaluasi Kinerja Petugas Derek




Sosialisasi PP JMTO 2021 -2023 dan Program HC




Evaluasi Kinerja Petugas Paramedis




Simulasi Penanganan Kecelakaan Pesawat Terbang Yang Jatuh Dekat Dengan Jalan Tol Bali Mandara






Penanaman Mangrove







Pembagian Souvenir Menyambut Tahun Baru






2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Waktu transaksi merupakan salah satu indikator pelayanan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Hasil pemeriksaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol sebagai berikut :

1. Kecepatan Tempuh Rata-rata

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Kecepatan Tempuh Rata-Rata Kondisi Normal	Kecepatan Tempuh Rata-rata ≥ 40 Km/Jam	**Memenuhi** Kecepatan minimal 60 Km/Jam dan maksimal 80 Km/Jam

2. Aksesibilitas

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Kecepatan transaksi rata-rata	Gerbang Tol sistem terbuka : • Manual : ≤ 6 detik/kend • GTO : ≤ 5	**Memenuhi** • Gerbang Tol Sistem Terbuka Gerbang pembayaran : - • GarduTol Otomatis (GTO) Rata-rata : 1,51 detik/ kend. - GT Nusa Dua 1,58 detik / kend. - GT Ngurah Rai 1,62 detik/ kend - GT Benoa 1,64 detik/ kend.
Jumlah Antrian Kendaraan	Maksimal 10 Kendaraan per Gardu *(dalam Kondisi Normal)*	**Memenuhi** Jumlah Antrian Kendaraan pada Gardu Tol < 10



3. Mobilitas

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Kecepatan Penanganan Hambatan Lalin • Wilayah Pengamatan Observasi Patroli	30 menit per siklus pengamatan pada lokasi sama dilalui kendaraan yang berpatroli	**Memenuhi** Berdasarkan pengamatan / Observasi Patroli 30 menit / siklus pengamatan
• Mulai Informasi Diterima sampai ketempat kejadian	≤ 30 menit	**Memenuhi** Sejak Informasi Diterima sampai dengan unit layanan kendaraan Derek samapi ke tempat kejadian <30 menit
• Penanganan Kendaraan Mogok - Jalan Tol dalam Kota	**Jalan Tol Dalam Kota** Melakukan penderekan kebengkel terdekat dengan menggunakan Derek resmi dan gratis **Jalan Tol Luar Kota** Melakukan Penderekan ke Gerbang Tol terdekat	**Memenuhi** Kendaraan Derek melakukan penderekan kendaraan mogok gratis ke bengkel terdekat Tariff resmi Derek dari Jasa Marga ada atau tidak dan terekat di kendaraan Derek atau tidak, untuk penderekan di luar wilayah ruas jalan tol.
• Kecepatan Penanganan Patroli Jalan Raya	• Penanganan dan Penindakan terhadap Hambatan Lalu Lintas • Menindak Kendaraan yang berjalan tidak sesuai Aturan	**Memenuhi** Kecepatan Penanganan kendaraan Patroli Jalan Raya ≤ 30 menit
• Kecepatan Penanganan Kendaraan Derek	Sampai di tempat kejadian ≤ 30 menit	**Memenuhi** Kecepatan Penanganan Kendaraan Derek ≤ 30 menit





4. Keselamatan

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Petunjuk Jalan - Perambuan (Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk)	Jumlah 100% dan Reflektivitas > 80%	**Memenuhi** Rambu lengkap, jelas, dan reflektifitas >80%
- Marka Jalan (Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk)	Jumlah 100% dan Reflektivitas > 80%	**Memenuhi** Marka Jalan dalam kondisi baik dan reflektifitas > 80%
- GuidePost/ Reflektor sebelah kiri jalan tol (Merah) dan sebelah kanan jalan tol (Putih)	Jumlah100% dengan jarak 25 Meter dan reflektifitas > 80%	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Patok Kilometer	Berfungsi dan Bermanfaat 100% Per 1 Kilometer	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Patok Hektometer	Berfungsi dan Bermanfaat 100% Per 200 meter	**Memenuhi** Tidak Memnpergunakan Patok Hektometer
Fasilitas Lainnya - Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lampu menyala 100%	**Memenuhi** Lampu PJU menyala 100%
- Anti Silau	Keberadaan 100%	-
- Pagar Rumija	Keberadaan 100%	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Pagar Pengaman	Keberadaan 100%	**Memenuhi** keberadaan 100%
Penanganan Kecelakaan - Korban Kecelakaan	Dievakuasi Gratis ke Rumah Sakit Rujukan	**Memenuhi** Dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan
- Kendaraan Kecelakaan	Melakukan penderekan gratis ke pool Derek (masih di dalam jalan tol)	**Memenuhi** Melakukan penderekan gratis ke pool Derek (masih didalam jalan tol)
Pengamanan dan penegakan hukum	Kendaraan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap dipanggil 24 Jam	**Memenuhi** PJR Polri rutin melakukan patroli keliling sepanjang ruas jalan tol dan siap dipanggil 24 jam

5. Unit Pertolongan Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan (Panjang = 12,70 Km termasuk akses, LHR ≤100.000 kend/hari)

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Ambulance	1 unit/25 km atau minimal 1 unit dilengkapi standar P3K dan paramedic	**Memenuhi** 1 Unit, lengkap dengan standar P3K dan paramedis
Kendaraan Derek	• LHR > 100.000 kend/hari 1 Unit/5 Km atau minimal 1 unit jika< 5 Km • LHR ≤ 100.000 kend/hari 1 Unit/10 Km atau minimal 1 unit jika< 10 Km (jika tersedia lebih dari 1 unit Derek maka harus tersedia Derek dengan kapasitas 25 ton minimal 1)	**Memenuhi** 2 Unit Kendaraan Derek Mobil 1 Unit Kendaraan Derek Motor kapasitas 5 ton
Polisi Patroli Jalan Raya (PJR)	• LHR > 100.000 kend/hari 1 unit per 15 km, atau minimal 1 unit jika <15 km • LHR ≤ 100.000 kend/hari 1 Unit per 20 km, atau minimal 1 unit jika< 20 km	**Memenuhi** 2 Unit Mobil PJR 1 Unit Motor PJR
Patroli Jalan Tol (Operator)	1 Unit/15 Km atau minimal 2 unit jika< 15 Km	**Memenuhi** 2 Unit Mobil Patroli 1 Unit Motor Patroli
Kendaraan Rescue	1 Unit per 50 Km atau minimal 1 unit jika< 50 Km (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan)	**Memenuhi** 1 Unit lengkap dengan perlengkapan penyelamatan
Sistem Informasi - Informasi dan komunikasi Kondisi Lalu Lintas (Spanduk, Board, Virtual Message Sign (VMS))	• 50 meter sebelum akses masuk jalan tol	**Memenuhi** Ada Informasi dan Sistem Komunikasi. Tersedia 6 CCTV meliputi: Gerbang Benoa terdapat 2 CCTV (Jalur motor 1, jalur mobil 1). Gerbang Ngurah Rai terdapat 2 CCTV (Jalur motor 1, jalur mobil 1). Gerbang Nusa Dua terdapat 2 CCTV (Jalur motor 1, jalur mobil 1)
- Nomor telepon info tol	• Di dalam ruas jalan tol Pada gerbang masuk dan gerbang keluar, didalam ruas jalan tol dan pada kartu tol / karcis	**Memenuhi** Nomor telepon info tol berada pada VMS Gerbang Tol, didalam ruas tol dan karcis tol No Info dan Layanan Tol - Call Center : 14080 - Call Center Lokal : 0361 729999

6. Lingkungan

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
• **Kebersihan** - Dalam Rumija Tol	Tidak Ada Sampah	**Memenuhi** Tidak Ada Sampah
- Kantor Operasi dan GarduTol	Tidak Ada Sampah, Terawat dan Bersih	**Memenuhi** Bersih, tidak ada sampah, dan terawat
• **Tanaman** (dalam rumija tol)	Tidak Menganggu Fungsi JalanTol	**Memenuhi** Tidak mengganggu fungsi jalan tol
• **Rumput** (Di Rumija diluar Rumaja)	Tinggi rumput < 30 cm	**Memenuhi** Tinggi rumput <30 centimeter

7. Tempat Istirahat (TI) dan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP). Tidak ada Rest Area

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Kondisi Jalan	Tidak Ada Lubang, Retak dan Pecah	–
On / Off Ramp	Tidak Ada Lubang, Retak dan Pecah	–
Toilet	Berfungsi 100%, teratur, Bersih, Gratis	–
Parkir Kendaraan	• Berfungsi 100%, teratur, Bersih, Gratis • Dilarang parkir di on/off ramp	–
Penerangan	Berfungsi 100%	–
Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Berfungsi 100%	–
Bengkel Umum	Berfungsi 100%	–
Tempat Makan dan Minuman	Berfungsi 100%	–



Pemeliharaan Jalan Tol

Pemeliharaan Jalan Tol Bali Mandara dilaksanakan meliputi lingkup pemeliharaan sebagai berikut :

a. **Bidang Pemeliharaan Struktur (Atas dan Bawah)**, meliputi pemeliharaan kondisi Gerbang Tol, SFO *(Scrapping, Filling, Overlay) ,Barrier*, Perambuan, Pagar *Railing*, Pagar *Guardrail* pada struktur atas dan kondisi Tiang Pancang, Kondisi *Pier* maupun *Pier Head* dan rangkainnya pada struktur bawah.

b. **Bidang Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal**, meliputi pemeliharaan kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) beserta instalasi, Lampu Gerbang Beserta Instalasinya, dan Perawatan lampu Tulisan Jalan Tol Bali Mandara.

c. **Bidang Pemeliharaan Kebersihan Jalur dan Lingkungan**, meliputi inspeksi kondisi kebersihan jalur, kebersihan saluran *inlet* dan *outlet*, kebersihan perambuan, kebersihan gerbang tol dan kondisi tanaman yang ada di area Jalan Tol Bali Mandara.

Sumber Daya Manusia Unit Kerja Maintenance

No	Uraian	Unit Kerja	Satuan	Jumlah	Ket
1	Coordinator/Manager Area	Operation 3 Departemen	Orang	1	PKWTT
2	Maintenance Administration Officer	Operation 3 Departemen	Orang	1	PKWTT
3	Inspector	Operation 3 Departemen	Orang	4	PKWTT



A. Bidang Pemeliharaan Struktur (Atas dan Bawah)

Adapun kegiatan Capex tahun 2021 meliputi :

1. Dokumentasi Kegiatan Capex (SFO)



Perambuan KM 0+000 – 0+625
Nusa Dua Jalur A & B



Proses Persiapan Perambuan jalan
KM 0+000– 0+ 625 Jalur A & B



Scrapping KM 0+000 -0-625
Jalur A&B Nusa Dua)



Scrapping Aspal Lokasi 0+000–0+625
jalur A&B



Scrapping KM 0+000 Nusa Dua



Penghamparan Aspal KM 0+000–0+625
Jalur A&B

2. Dokumentasi Kegiatan Capex (Barrier)



Patching Barrier KM 03.00 N A



Patching Barrier KM 03.00 N A

3. Dokumentasi Kegiatan Capex (Tiang pancang)



Proteksi Sambungan Tiang pancang
P.0863 R



Proteksi Sambungan Tiang pancang
P.0863 R



Pengecekan Kondisi Tiang Pancang
Area Paket 1



Pengecekan Kondisi Tiang Pancang
Area Paket 1



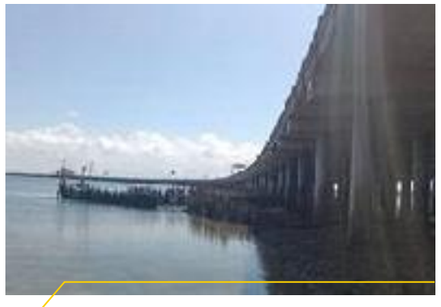
Pengecekan Kondisi Sambungan Tiang Pancang Area Paket 3



Pengecekan Kondisi Sambungan Tiang Pancang Area Paket 3

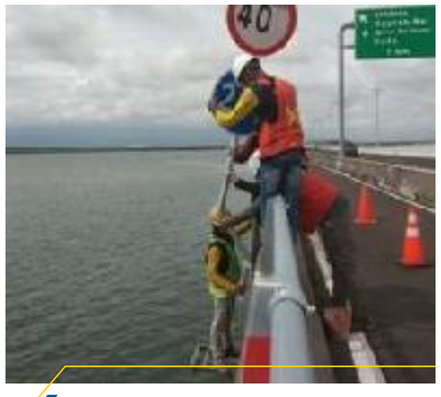


Pengecekan Kondisi Jembatan Area Paket 3

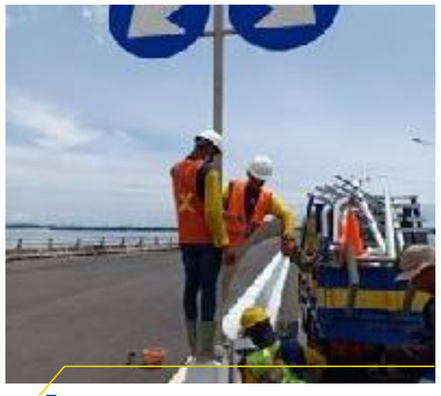


Pengecekan Kondisi Tiang Pancang Area Paket 2

4. Dokumentasi Kegiatan Capex (Rambu)



Pergantian Rambu Petunjuk *On Ramp* Benoa



Pergantian Rambu Batas Kecepatan.





Pengecekan kondisi Rambu

5. Dokumentasi kegiatan Capex (Gerbang)



Perbaikan Atap Gerbang Ngurah Rai



Perbaikan Atap Gerbang Ngurah Rai



Pengecekan kondisi atap gerbang Ngurah Rai

B. Bidang Pemeliharaan Mekanikal Dan Elektrikal

Adapun kegiatan pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal meliputi :

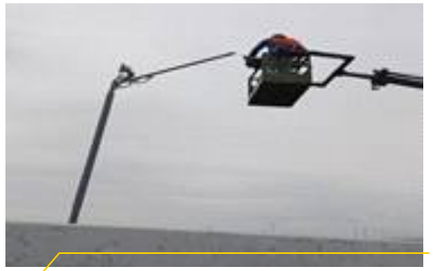
Pemeliharaan kondisi Lampu Penerangnan Jalan Umum (PJU) beserta instalasi



Pemeliharaan kondisi Lampu Penerangnan Jalan Umum (PJU) beserta instalasi



Pekerjaan Pergantian Timer panel Of Ramp 4 Benoa, Perbaikan PJU panel 2+300 Kabel sambungan tiang no 99.



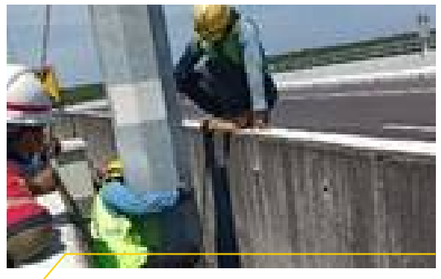
Penggantian lampu Ramp 1 motor Interchange



Penggantian MCB tiang no 146 MR



Pengecekan Instalasi panel km 4+700



Pengencangan mur baut tiang no 226 MR

C. Bidang Pemeliharaan Kebersihan Jalur Dan Lingkungan

Adapun kegiatan Kebersihan Jalur dan Lingkungan, meliputi :



Pembersihan Tanaman liar di bawah *guardrail* akses benoa



Pembersihan Debu di *Rubbercone Gate* Benoa



Pembersihan Debu Yang lengket Di Gerbang Benoa



Pembersihan Batas Ketinggian Di Gerbang Benoa

D. Pemenuhan SPM

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Sesuai Peraturan Menteri PUPR No 16/PRT/M/2014

1. Keselamatan

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Petunjuk Jalan		
- Perambuan (Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk)	Jumlah 100% dan Reflektivitas > 80%	**Memenuhi** Rambu lengkap, jelas, dan reflektifitas >80%
- Marka Jalan (Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk)	Jumlah 100% dan Reflektivitas > 80%	**Memenuhi** Marka Jalan dalam kondisi baik dan reflektifitas > 80%
- GuidePost/ Reflektor sebelah kiri jalan tol (Merah) dan sebelah kanan jalantol (Putih)	Jumlah100% dengan jarak 25 Meter dan reflektifitas > 80%	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Patok Kilometer	Berfungsi dan Bermanfaat 100% Per 1 Kilometer	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Patok Hektometer	Berfungsi dan Bermanfaat 100% Per 200 meter	**Memenuhi** Tidak Memnpergunakan Patok Hektometer
Fasilitas Lainnya		
- Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lampu menyala 100%	**Memenuhi** Lampu PJU menyala 100% (selang seling)
- Anti Silau	Keberadaan 100%	-
- Pagar Rumija	Keberadaan 100%	**Memenuhi** Berfungsi dan Bermanfaat
- Pagar Pengaman	Keberadaan 100%	**Memenuhi** keberadaan 100%
Penanganan Kecelakaan		
- Korban Kecelakaan	Dievakuasi Gratis ke Rumah Sakit Rujukan	**Memenuhi** Dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan
- Kendaraan Kecelakaan	Melakukan penderekan gratis ke pool Derek (masih di dalam jalan tol)	**Memenuhi** Melakukan penderekan gratis ke pool Derek *(masih didalam jalan tol)*
Pengamanan dan penegakan hukum	Kendaraan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap dipanggil 24 Jam	**Memenuhi** PJR Polri rutin melakukan patroli keliling sepanjang ruas jalan tol dan siap dipanggil 24 jam

Kegiatan Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

A. Kegiatan Mekanikal Dan Elektrikal



Penggantian lampu *Ramp* 1 motor *Interchange*



Penggantian MCB tiang no 146 MR

B. Kegiatan Jalan Dan Jembatan Struktur Bawah



Pengecekan Kondisi Sambungan Tiang Pancang Area Paket 3



Pengecekan Kondisi Tiang Pancang Area Paket 2

C. Kegiatan Jalan Dan Jembatan Struktur Atas



Pengecekan kondisi Rambu



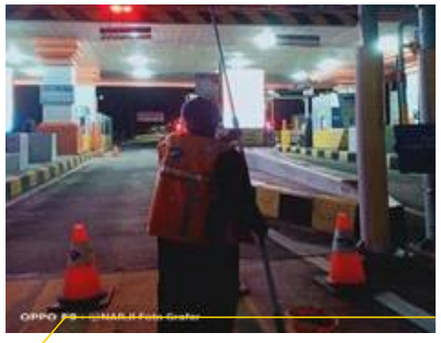
Perbaikan EJ retak dengan Teknik *Sealeant* 0+250A

2. Lingkungan

Indikator	Tolok Ukur	Hasil Pemenuhan
Kebersihan - Dalam Rumija Tol	Tidak Ada Sampah	**Memenuhi** Tidak Ada Sampah
- Kantor Operasi dan Gardu Tol	Tidak Ada Sampah, Terawat dan Bersih	**Memenuhi** Bersih, tidak ada sampah, dan terawat
Tanaman Dalam Rumija Tol	Tidak Menganggu Fungsi JalanTol	**Memenuhi** Tidak Menganggu Fungsi JalanTol
Rumput Di Rumija diluar Rumaja	Tinggi rumput < 30 cm	**Memenuhi** Tinggi rumput < 30 cm



Pembersihan Debu Yang lengket Di Gerbang Benoa



Pembersihan Batas Ketinggian Di Gerbang Benoa

E. Hasil Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021

Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara), KM 5.800
Pekerjaan Jalan Utama (Lubang)
Lajur 2, Jalur B
Status : FINISHED

Informasi Detail | Informasi Perbaikan



Periode

Jalan Tol	:	**Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)**
Tanggal	:	**27 September 2021**

Awal Kegiatan

Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara), KM 1.400
Pekerjaan Jalan Utama (Lubang)
Lajur 2, Jalur B
Status : FINISHED

Informasi Detail | Informasi Perbaikan



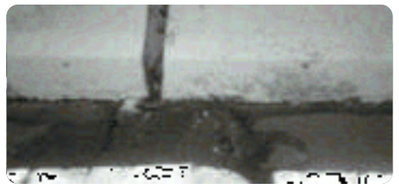
Periode

Jalan Tol	:	**Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)**
Tanggal	:	**27 September 2021**

Closing Kegiatan

Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara), KM 2.260
Perkerasan Jalan Utama (Lubang)
Lajur 1, Jalur A
Status : FINISHED

Informasi Detail | Informasi Perbaikan



Metode Perbaikan

penambalan menggunakan aspaltik

Awal Kegiatan

Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara), KM 5.100
Perkerasan Jalan Utama (Lubang)
Lajur 1, Jalur A
Status : FINISHED

Informasi Detail | Informasi Perbaikan



Metode Perbaikan

penambalan menggunakan aspal, proses pemadatan menggunakan stemper

Closing Kegiatan

Pemeriksaan SPM 2021

NOMOR 96/PM/SPM/XI/2021
Tanggal 26 November 2021

No.	Substansi Pelayanan	Rencana	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi Jalan Tol	100%	100%
2	Kecepatan Tempuh Rata- Rata	100%	100%
3	Aksesibilitas	100%	100%
4	Mobilitas	100%	100%
5	Keselamatan	100%	100%
6	Unit Pertolongan/Penyelamatan dan Bantuan pelayanan	100%	100%
7	Lingkungan	100%	100%
8	Tempat istirahat (TI) dan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP)	NA	NA



Laporan Kegiatan Bidang Hukum 2021

Proses Sengketa Tanah Kantor Operasional Tahun 2021

A. Proses Sengketa Tanah Kantor Operasional di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar

Proses Sengketa Tanah Kantor Operasional antara Perseroan dengan Andi Susilo sudah berlangsung sejak awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2021. Pada tanggal 13 Juli 2021, PT Jasamarga Bali Tol menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3267 K/Pdt/2020 tertanggal 11 Desember 2020. Dalam Amar Putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan: menolak Gugatan Penggugat (Andi Susilo) untuk seluruhnya dan Menyatakan hukum bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 29 Desember 2018, Akta Perjanjian Nomor 04, tertanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 05, tertanggal 11 Januari 2019, yang dilakukan oleh Perseroan dan Sdr. Kadek Ngurah Agus Wiryana adalah sah.

B. Proses Sengketa Tanah Kantor Operasional di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Proses Sengketa Tanah Kantor Operasional antara Perseroan dengan Andi Susilo berlangsung sejak November 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021, Perseroan menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/TUN/2020, dengan amar Putusan: Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Sdr Andi Susilo.

C. Perubahan Status Tanah Dari Shm Ke HGB

Setelah Perseron menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/TUN/2020 dan Putusan Kasasi Nomor 3267 K/Pdt/2020, Perseroan kembali melanjutkan proses Penurunan dan Permohonan Hak atas Tanah SHM No. 4471 ke Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tanggal tanggal 23 Agustus 2021 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun atau berakhir pada 29 Juli 2051.

Dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/TUN/2020 dan Putusan Kasasi Nomor 3267 K/Pdt/2020 yang merupakan putusan pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* serta diterbitkannya SHGB Nomor 00387 pada tanggal tanggal 23 Agustus 2021 serta sampai saat ini tidak terdapat upaya hukum/gugatan lanjutan dari Sdr. Andi Susilo, sehingga dapat disimpulkan sengketa tanah Kantor Operasional Perseroan telah berakhir.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan
Selama Tahun 2021



Selama tahun 2021 Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

A. RUPS Sikuler pada tanggal 2 Juni 2021;
B. RUPS Tahunan pada tanggal 16 Juni 2021;
C. RUPS Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 15 Desember 2021;

RUPS PT Jasamarga Bali Tol tahun 2021

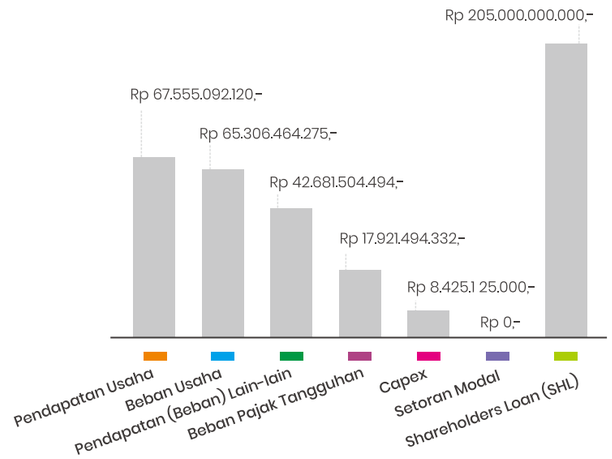
RUPS Sirkuler 2021
PT Jasamarga Bali Tol

Bahwa Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan diluar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2021.
Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham yaitu sebagai berikut:

1) Mengesampingkan ketentuan batas waktu penyampaian RKAP Tahun 2021, sebagaimana diatur pada khususnya dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan

2) Menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PT JASAMARGA BALI TOL, dengan rincian sebagaimana berikut:

- **Pendapatan Usaha :** Rp 67.555.092.120,-
- **Beban Usaha :** Rp 65.306.464.275,-
- **Pendapatan (Beban) Lain-lain :** Rp 42.681.504.494,-
- **Beban Pajak Tangguhan :** Rp 17.921.494.332,-
- **Capex ;** Rp 8.425.1 25.000,-
- **Setoran Modal :** Rp 0,-
- **Shareholders Loan (SHL):** Rp 205.000.000.000,-



Serta dengan rincian selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Buku 1 dan Buku 2 RKAP Tahun 2021 yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham Perseroan ini

1) Pendapatan Usaha (di luar Pendapatan Konstruksi) dalam RKAP Tahun 2021, merupakan batas minimum dan beban usaha (di luar Beban Konstruksi) dalam RKAP Tahun 2021 merupakan batas maksimum;

2) Dalam merealisasikan Revisi RKAP Tahun 2021, Direksi Perseroan wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta senantiasa menerapkan *Good Corporate Gorvernance* (GCG) melalui prinsip-prinsip Profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran serta kompetitif.

3) menugaskan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku ;

4) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik seluruhnya atau sebagian untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam satu Akta Notaris dan melakukan segala Tindakan yang diperlukan guna terlaksananya tujuan Pemberi Kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Pelaksanaan seluruh keputusan ini harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020
PT Jasamarga Bali Tol

Diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, bertempat di Ruangan Rapat PT Jasamarga Bali Tol, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505 Pemogan, Denpasar, Bali.

Adapun hasil RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama** Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untukTahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

   Para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:

   1) Menyetujui dan mengesahkan

   A. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

   B. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Punuantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Audited Nomor : 00636/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/IV/2021 tanggal 23-4-2021)

   C. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) mengenaitugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang baru.

   2) Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(Acquit Et Decharge)* kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.



2. **Agenda Kedua** Penetapan Penggunaan Laba Rugi Tahun 2020.

   Para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:

   Perseroan masih membukukan rugi pada Tahun Buku berjalan sebesar Rp.109,8 (seratus sembilan koma delapan miliar rupiah), maka para pemegang saham Perseroan setuju dan sepakat tidak akan dilakukan pembagian laba atau dividen untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh)

3. **Agenda Ketiga** Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021.

   Para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:
   Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk. untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menyetujui/tunduk pada seluruh proses penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut yang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk. (termasuk tapi tidak terbatas pada hasil negosiasi harga yang telah dilakukan).

4. **Agenda Keempat** Penetapan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

   Para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :

   Mengangkat Kembali Bapak Kompyang Raka Swandika, Komisaris Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak tanggal 01-06-2021(satu Juni dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 31-05-2026 (Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam) tanpa mengesampingkan hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

   Sehubungan dengan pengangkatan kembali pengurus Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama : Donny Arsal
   Komisaris : Edi Priyanto
   Komisaris : Anak Agung Ngurah Maha Diptha
   Komisaris : Kompyang Raka Swandika
   Komisaris : Lukman F. Laisa

   Direksi :
   Direktur Utama : I Ketut Adiputra Karang
   Direktur Keuangan : I Gusti Putu Arya Budhi Astawa

5. **Agenda Kelima** Arahan Pemegang Saham

   PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY - CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. menyampaikan arahan sebagai berikut :

   1) Manajemen Perseroan diminta untuk terus menjaga kelayakan investasi dengan melakukan upaya-upaya inovasi dan antisipatif terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kelayakan investasi Perseroan.

   2) Manajemen Perseroan diminta untuk mengelola Perseroan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) terutama dalam bidang keuangan sehingga pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan prinsip tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu.

   PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III (PT PELINDO III) PERSERO menyampaikan arahan sebagai berikut:

   1) Perseroan dapat tetap mengoptimalkan upaya-upaya dalam mencari peluang

dan inovasi bisnis baru, baik skema bisnis Perseroan dan skema bisnis pendukung lainnya guna memulihkan pendapatan Perseroan;

2) Manajemen Perseroan tetap melakukan efisiensi biaya untuk bisa mengimbangi laju penurunan pendapatan yang signifikan;

3) Manajemen Perseroan melakukan pendekatan kembali ke bank-bank untukrestrukturisasi pinjaman, khususnya terkait dengan bunga.

4) Melakukan upaya untuk meningkatkan awareness masyarakat bali terhadap eksistensi keberadaan jalan tol bali mandara sekaligus melakukan upaya pemasaran yang dapat mengundang lebih banyak pengguna jalan dengan melakukan kerja sama dengan ekosistem bisnis yang ada, pariwisata, dan lain-lain dengan penawaran stimulus yang dilakukan direksi Perseroan;

5) Sehubungan dengan masih berlanjutnya pandemi covid-19 dan dengan tujuanmemperkecil risiko penularan ditempat kerja dan aktivitas operasional, Direksi Perseroan diharapkan terus memantau dengan ketat protokol kesehatan disetiap lini usaha

6) Fungsi pengendalian internal agar tetap dilaksanakan secara efektif untuk memitigasi temuan-temuan auditor serta menindaklanjuti secara tuntas terhadap temuan-temuan yang ada, baik internal maupun eksternal, agar tidak terdapat temuan yang sama ataupun temuan berulang pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DISINGKAT PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO) menyampaikan arahan sebagai berikut:

Diharapkan untuk kedepannya Perseroan dapat terus meningkatkan kinerja Perseroan



RUPS Luar Biasa Tahun 2021
PT Jasamarga Bali Tol



Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, pukul 15.14 WITA, bertempat di Ruangan Rapat PT. Jasamarga Bali Tol, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505 Pemogan, Denpasar, Bali. Adapun Agenda RUPS LB sebagai berikut:

1. **Agenda Rapat Pertama** Pemegang Saham menyetujui remunerasi Direksi PT Jasamarga Bali Tol Tahun 2021, para pemegang saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:

   1) Gaji Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan besaran gaji tahun buku 2020, dengan ketentuan gaji anggota Direksi sebesar 85% dari gaji Direktur Utama;

   2) Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama;

   3) Atas besaran gaji/honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku ketentuan:

      3.1 Untuk periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, ketentuan dan perincian besaran gaji/ honorarium serta tunjangan/ fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun Buku 2020,

      3.2 Untuk periode Bulan Juli 2021 sampai dengan penutupan Tahun Buku 2021, ketentuan dan perincian besaran gaji/honorarium serta tunjangan /fasilitas bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tabel.

Pembayaran Remunerasi sebagaimana tabel dimaksud di atas, menggunakan anggaran Perseroan tanpa menyebabkan peningkatan beban usaha pada RKAP 2021 dan perubahan /revisinya (apabila ada).

4 Selanjutnya Para Pemegang Saham sepakat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang diambil berdasarkan RUPS LB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini kedalam suatu akta notaris atau beberapa akta notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya tujuan pemberian kuasa tersebut.



2. Agenda Rapat Kedua, mengenai Persetujuan Revisi RKAP PT Jasamarga Bali Tol Tahun 2021, para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021 yang secara garis besar sebagai berikut:

1) Revisi RKAP Tahun 2021 PT Jasamarga Bali Tol:

	Rkap Awal	Revisi Rkap	Penjelasan
Pendapatan Usaha	Rp. 67.555.092.120	Rp. 34.575.406.318	Penurunan Pendapatan Akibat PPKM Darurat
Badan Usaha	Rp. 65.306.464.275	Rp. 58.394.521.617	Efisiensi Beban Kas dan Penurunan Beban Non Kas
EBITDA	Rp. 0.877.088.437	Rp. (8.852.354.310)	-
Pend/Beban Lain2	-	Rp. (665.020.153)	Reklasifikasi Akun Beban Keuangan non Bunga
Beban Bunga	Rp. (142.921.504.494)	Rp. (125.680.442.496)	Penurunan Suku Bunga Pinjaman Bank KI
Laba (Rugi) Bersih	Rp. (158.354.370.981)	Rp. (170.138.009.674)	
Capex	Rp. 8.425.125.000	Rp. 6.724.000.000	Skala Prioritas penggunaan Anggaran CAPEX
Shareholder Loan	Rp. 205.000.000.000	Rp. 220.000.000.000	

"Adapun rincian Revisi RKAP Tahun 2021 dan Addendum Kontrak Manajemen Perseroan adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara RUPS LB ini"

2) Pendapatan usaha dalam Revisi RKAP Tahun 2021 merupakan batas minimum dan beban usaha dalam Revisi RKAP Tahun 2021 merupakan batas maksimum;

3) Dalam merealisasikan Revisi RKAP Tahun 2021, Direksi Perseroan wajib melaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan dengan menerapkan good corporate governance (gcg) melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kompetitif;

4) Menugaskan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan untuk melakukan segala hal tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan RUPS LB ini;

5) Selanjutnya Para Pemegang Saham sepakat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh keputusan para Pemegang Saham Perseroan yang diambil berdasarkan RUPS LB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan ini kedalam suatu akta notaris atau beberapa akta notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya tujuan pemberian kuasa tersebut.

3. Agenda Ketiga mengenai Persetujuan Perubahan nama Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), para Pemegang Saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui:

1) Perubahan nama pemegang saham perseroan yang semula Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELABUHAN INDONESIA III disingkat PT PELINDO III (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELABUHAN INDONESIA disingkat PT PELINDO (PERSERO);

2) Dengan demikian maka susunan dan komposisi pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai	%
1	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	609,193	609,193,000,000	64.44%
2	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	131,048	131,048,000,000	13.86%
3	Pemerintah Provinsi Bali	59,707	59,707,000,000	6.32%
4	Pemerintah Kabupaten Badung	59,707	59,707,000,000	6.32%
5	PT Angkasa Pura I (Persero)	59,635	59,635,000,000	6.31%
6	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7,454	7,454,000,000	0.79%
7	PT Hutama Karya (Persero)	7,454	7,454,000,000	0.79%
8	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	7,454	7,454,000,000	0.79%
9	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	3,782	3,782,000,000	0.40%
		945,434	945,434,000,000	100.00%

3) Selanjutnya para Pemegang Saham sepakat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh keputusan para Pemegang Saham Perseroan yang diambil berdasarkan RUPS LB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan ini kedalam suatu akta notaris atau beberapa akta notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya tujuan pemberian kuasa tersebut.

Penutupan Jalan Tol
Dalam Rangka Hari Raya Nyepi

Dalam Rangka Kegiatan Nyepi Tahun 2021, Perseroan melaksanakan pecaruan Hari Raya Nyepi dan pengamanan kegiatan Melasti di Akses Jalan Raya Pelabuhan Benoa serta memberi bantuan keamanan dan serta kelancaran kegiatan tersebut.

Pada Hari Raya Nyepi Tersebut, atas seijin Menteri PUPR Jalan Tol Bali Mandara ditutup selama 32 Jam, Penutupan dimulai hari Minggu, 14 Maret 2021, pukul 23:00 Wita, dan akan dibuka kembali pada hari Senin, 16 Maret 2021, mulai pukul 07.00 Wita







Pembagian Masker dan *Hand Sanitizer*
Dalam Rangka HUT JBT ke-10









24 November 2021
Pembagian masker dan *handsnitizer* dalam rangka HUT JBT KE-10

Pembagian Kartu Elektronik Bersama Bank BUMN dan Swasta
dan Sosialisasi *Road Safety Rangers*







30 Desember 2021, Pembagian Kartu Elektronik Bersama Bank BUMN dan Swasta Serta Sosialisasi *Road Safety Ranger*

Analisa terkait dengan Tinjauan keuangan berikut ini disajikan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 32 Desember 2021. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst And Young) melalui Laporan Audit Nomor: 00613/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah mendapatkan opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasamarga Bali Tol tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa Pembahasan Manajemen

Laporan Aset 124

Laporan Liabilitas 132

Ekuitas 143

Kinerja Keuangan 144

Laporan Arus Kas 153

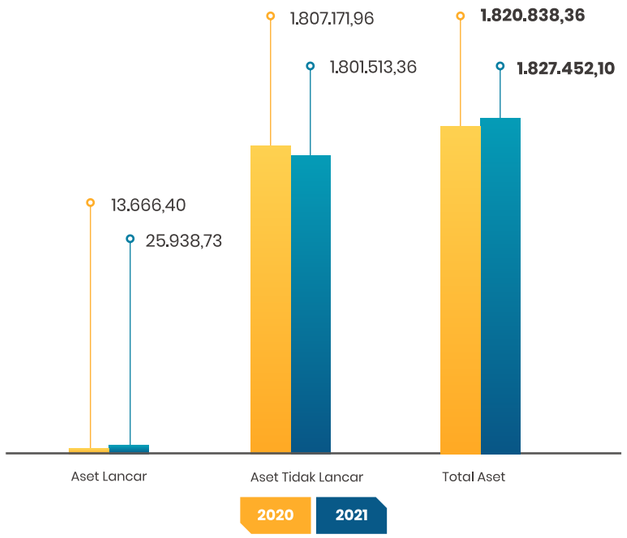
05

Laporan Aset

Aset

Komposisi Aset 2021 Dibandingkan Dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Aset Lancar	25.938,73	13.666,40	12.272,34	89,80
Aset Tidak Lancar	1.801.513,36	1.807.171,96	(5.658,60)	(0,31)
TOTAL ASET	**1.827.452,10**	**1.820.838,36**	**6.613,74**	**0,36**



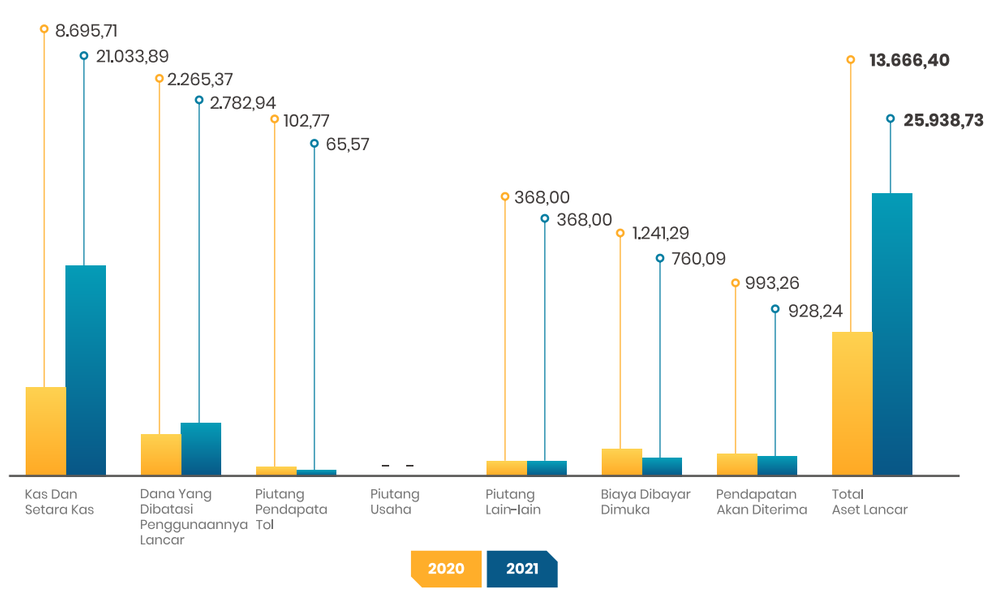
Definisi

Total aset perseroan adalah Rp.1.827.452,10 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 6.613,74 juta atau 0,36 % dibandingkan tahun 2020.

Aset Lancar

Komposisi Aset Lancar 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Kas dan Setara Kas	21.033,89	8.695,71	12.338,18	141,89
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Lancar	2.782,94	2.265,37	517,57	22,85
Piutang Pendapatan Tol	65,57	102,77	(37,20)	(36,20)
Piutang Usaha	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	368,00	368,00	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	760,09	1.241,29	(481,20)	(38,77)
Pendapatan Akan Diterima	928,24	993,26	(65,02)	(6,55)
Total Aset Lancar	**25.938,73**	**13.666,40**	**12.272,34**	**89,80**



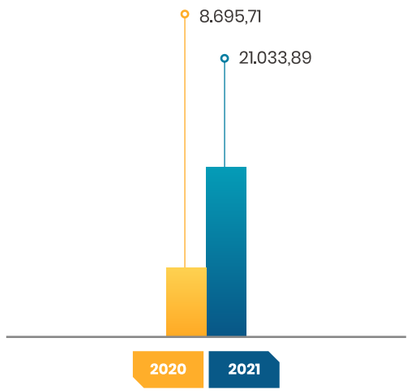
Definisi

Secara keseluruhan perolehan Aset Lancar Perseroan naik 89,80% dari sebesar Rp. 13.666,40 juta dari tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 25.938,73 juta di tahun 2021. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan pinjaman kepada Pemegang Saham.

Laporan kas dan setara kas

Komposisi Kas dan Setara Kas 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Kas dan Setara Kas	21.033,89	8.695,71	12.338,18	141,89



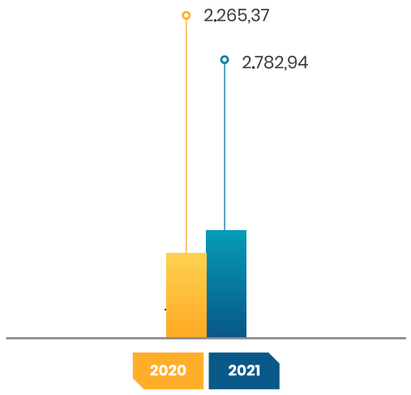
Definisi

Kas dan Setara Kas perseroan naik 141,89% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.8.695,71 Juta menjadi Rp.21.033,89 Juta di tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan penarikan pinjaman pemegang saham pada tahun 2021

Dana yang dibatasi penggunanya lancar

Komposisi dana yang dibatasi penggunanya lancar 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	2.782,94	2.265,37	517,57	22,85



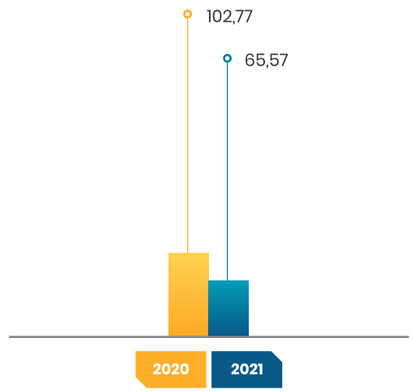
Definisi

Pada tahun 2021 dana yang dibatasi penggunaannya bagian lancar mengalami kenaikan sebesar 22,85% dari Rp.2.265,37 juta menjadi Rp.2.782,94 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan naiknya Pendapatan Tol yang disebabkan oleh keringanan PPKM yang diberlakukan pemerintah di masa Pandemi Covid-19.

Piutang pendapatan tol

Komposisi piutang pendpatan tol 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Piutang pendapatan tol	65,57	102,77	(37,20)	(36,20)



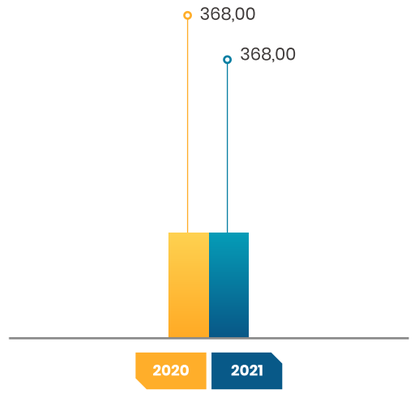
Definisi

Pada tahun 2021 perseroan mencatatkan piutang pendapatan tol sebesar Rp.65,57 juta, atau berkurang sebesar 36,20% dibandingkan tahun 2020 piutang pendapatan tol tercatat sebesar Rp.102,77 juta hal ini disebabkan pada tahun 2021 perseroan telah melakukan Rekonsiliasi harian antara pihak Integrator dan Perbankan sehingga piutang pendapatan tol bisa ditekan dan penggunaan Sistem Monitoring Tols (SMT).

Piutang lain - lain

Komposisi Piutang Lain-Lain 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Piutang lain - lain	368,00	368,00	-	-



Definisi

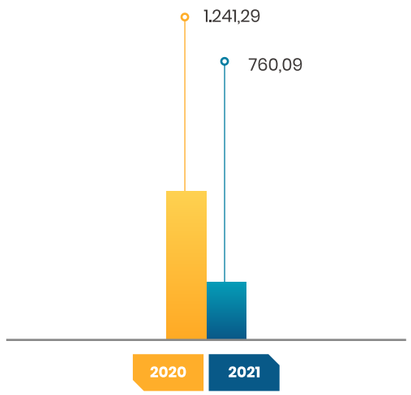
Piutang lain-lain merupakan piutang pegawai dan uang dalam perjalanan terhadap top up tunai uang elektronik terhadap perseroan. Tahun 2021 piutang lain-lain tidak ada perubahan karena kontrak setlement pendapatan tol dengan JMTO dan 5 Bank, sehingga porsi bank milik JMTO yang ditagihkan melalui JBT secara pencatatan akuntansi diakui piutang, dan telah dibayarkan selama tahun 2021 oleh pihak Perbankan.

Biaya Dibayar Dimuka

Komposisi Biaya Dibayar Dimuka 2021 dibandingkan dengan 2020

*(dalam **Rp Juta**)*

Uraian	2021	2020	Rp	%
Biaya Dibayar Dimuka	760,09	1.241,29	(481,20)	(38,77)



Definisi

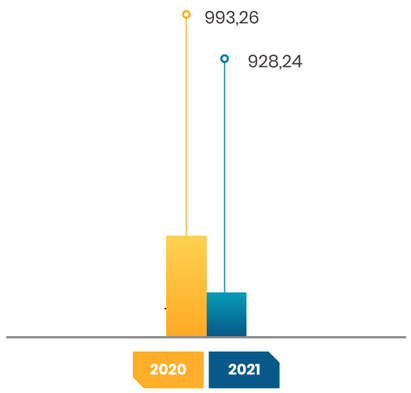
Tahun 2021 terjadi penurunan atas akun Biaya Dibayar dimuka sebesar 38,77 %, hal ini dikarenakan Perseroan mendapatan harga sewa Kantor yang lebih murah dibandingkan tahun 2020

Pendapatan Akan Diterima

Komposisi Pendapatan Akan Diterima 2021 dibandingkan dengan 2020

*(dalam **Rp Juta**)*

Uraian	2021	2020	Rp	%
Pendapatan Akan Diterima	928,24	993,26	(65,02)	(6,55)



Definisi

Akun ini merupakan akun pengakuan Pendapatan lain-lain.

Aset Tidak Lancar

Komposisi aset tidak lancar 2021 dibandingkan dengan 2020

*(dalam **Rp Juta**)*

Uraian	2021	2020	Rp	%
Aset tetap	726,29	1.305,95	(579,66)	(44,39)
Aset tak berwujud hak pengusahaan Jalan tol bersih	1.796.120,20	1.800.686,90	(4.566,70)	(0,25)
Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)	575,28	1.202,86	(627,58)	(52,17)
Dana yang dibatasi penggunaannya Tidak lancar	4.091,59	3.976,25	115,34	2,90
Total aset tidak lancar	**1.801.513,36**	**1.807.171,96**	**(5.658,60)**	**(0,31)**



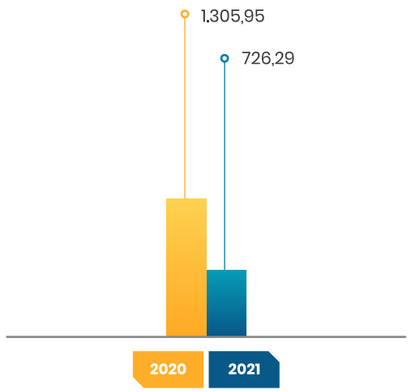
Definisi

Aset tidak lancara perseroan mengalami penurunan sebesar 0,31% atau Rp.5.658,60 juta dari tahun 2020 yang disebabkan oleh penambahan beban depresiasi, amortisasi aset, dan Rugi bersih Perseroan pada tahun 2021.

Aset tetap

Komposisi aset tetap 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Aset tetap	726,29	1.305,95	(579,66)	(44,39)



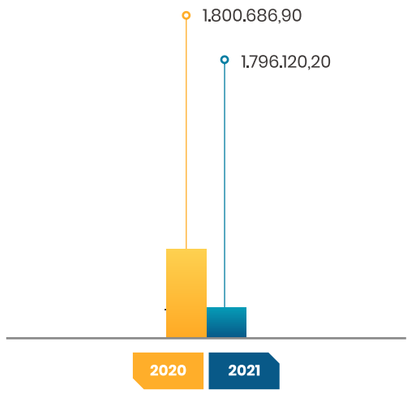
Definisi

Nilai aset tetap perseroan di tahun 2021 sebesar Rp.726,29 juta dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.1.305,95 terjadi penurunan sebesar 44,39 %. Penurunan nilai aset tetap juga dipengaruhi oleh biaya penyusutan..

Aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol-bersih

Komposisi Aset Tak berwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Aset Takberwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih	1.796.120,20	1.800.686,90	(4.566,70)	(0,25)



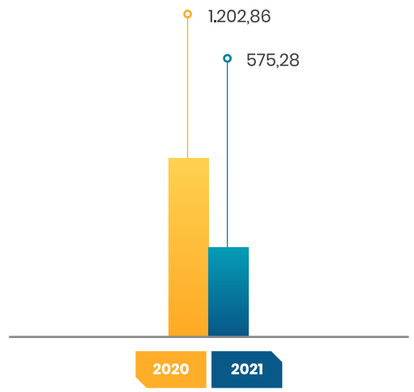
Definisi

Terjadi penurunan nilai aset tak berwujud (HPJT) pada tahun 2021 sebesar 0,25% Rp.1.796.120,20 juta ditahun 2021 dan sebesar Rp. 1.800.686,90 juta di tahun 2020. Penurunan diakibatkan pengurangan Aset HPJT ditahun 2020 karena diakibatkan lalulintas menurun.

Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)

Komposisi aset lainnya (aset tetap dalam konstruksi) 2021 dibadingkan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)	575,28	1.202,86	(627,58)	(52,17)



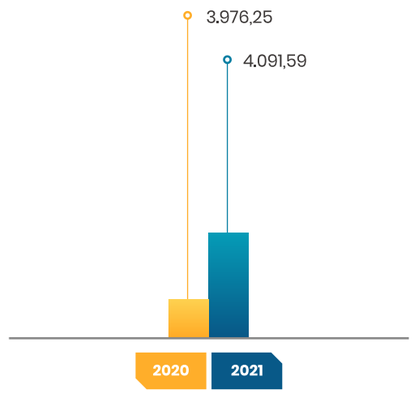
Definisi

Terjadi penurunan nilai pada aset lainnya di tahun 2021 sebesar 52,17% dari Rp.1.202,86 juta pada tahun 2020 dan sebesar Rp,575,28 juta di tahun 2021. Penurunan terjadi karena pada tahun 2021 perseroan telah melakukan reklasifikasi dari Akun ATDK ke Aset HPJT.

Dana yang dibatasi penggunaanya tidak lancar

Komposisi dana yang dibatasi penggunaannya tidak lancar 2021 dibandingkan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)	4.091,59	3.976,25	115,34	2,90



Definisi

Terjadi peningkatan sebesar 2,90% terhadap akun ini ditahun 2021 dibanding tahun 2020. tahun 2021 sebesar Rp 4.091,59 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 3.976,25 juta

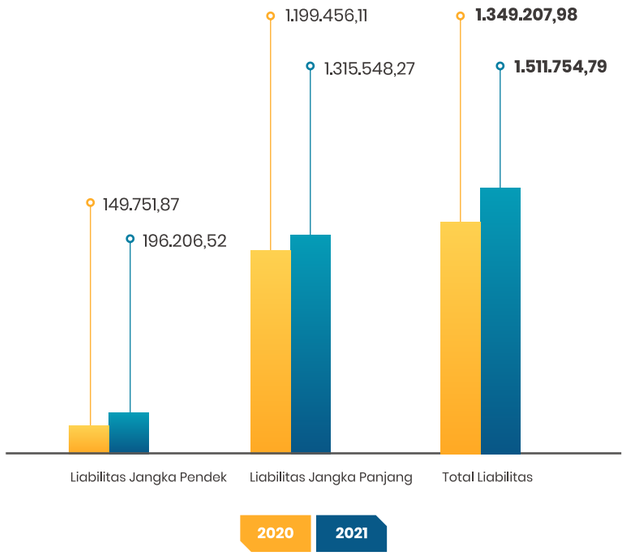
Liabilitas

Liabilitas

Liabilitas

Komposisi Liabilitas 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Liabilitas Jangka Pendek	196.206,52	149.751,87	46.454,65	31,02
Liabilitas Jangka Panjang	1.315.548,27	1.199.456,11	116.092,17	9,68
Total Liabilitas	**1.511.754,79**	**1.349.207,98**	**162.546,81**	**12,05**



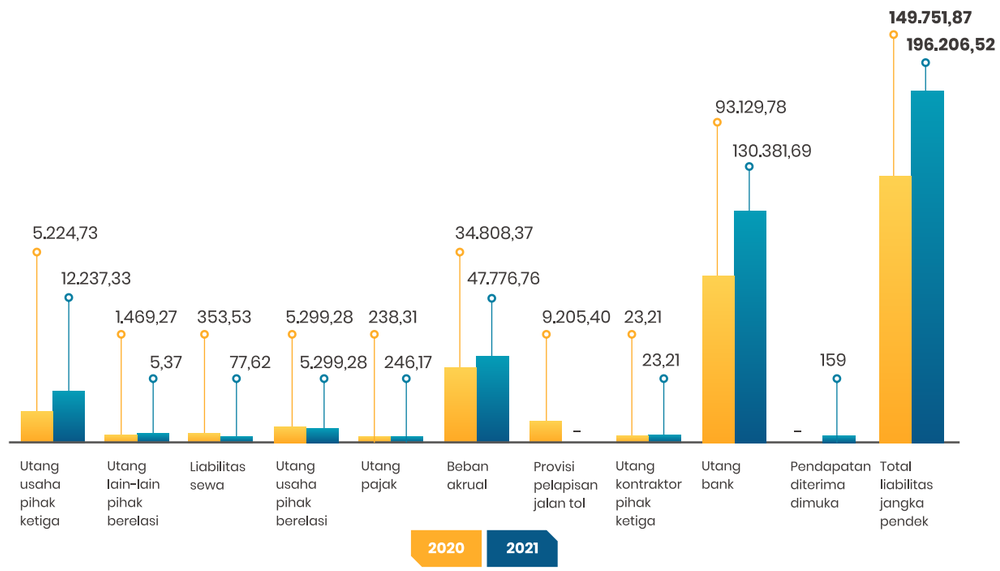
Definisi

Liabilitas perseroan pada tahun 2021 Rp.1.511.754,79 juta dan tahun 2020 sebesar Rp.1.349.207,98 juta. Terjadi kenaikan sebesar 12,05% atau Rp.162.546,81 juta. Kenaikan diakibatkan terjadinya tambahan hutang kepada Pemegang Saham.

Liabilitas jangka pendek

Komposisi **liabilitas jangka pendek 2021** dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Utang usaha-pihak berelasi	12.237,33	5.224,73	7.012,60	134,22
Utang usaha-pihak ketiga	5,37	1.469,27	(1.463,90)	(99,63)
Liabilitas sewa	77,62	353,53	(275,91)	(78,05)
Utang lain-lain-pihak berelasi	5.299,28	5.299,28	-	-
Utang pajak	246,17	238,31	7,87	3,30
Beban akrual	47.776,76	34.808,37	12.968,39	37,26
Provisi pelapisan jalan tol	-	9.205,40	(9.205,40)	(100,00)
Utang kontraktor-pihak ketiga	23,21	23,21	-	-
Utang bank	130.381,69	93.129,78	37.251,91	40,00
Pendapatan diterima dimuka	159	-	(9.205)	(100)
Total liabilitas jangka pendek	**196.206,52**	**149.751,87**	**46.454,65**	**31,02**



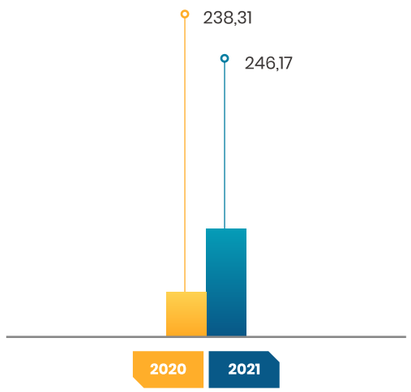
Definisi

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan terhadap liabilitas jangka pendek/hutang jangka pendek sebesar 31,02 % dibandingkan tahun 2020. Nilai liabilitas jangka pendek di tahun 2021 sebesar Rp.196.206,52 juta dan tahun 2020 sebesar Rp.149,751,87 juta. Peningkatan Liabilitas dikarekan pada tahun 2021 Perseroan melakukan reklasifikasi akun Provisi Pelapisan Jalan Tol ke Janga Pendek serta prosentase Hutang Bank Jangka Pendek meningkat.

Utang Pajak

Komposisi Utang Pajak 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Utang Pajak	246,17	238,31	7,87	3,30



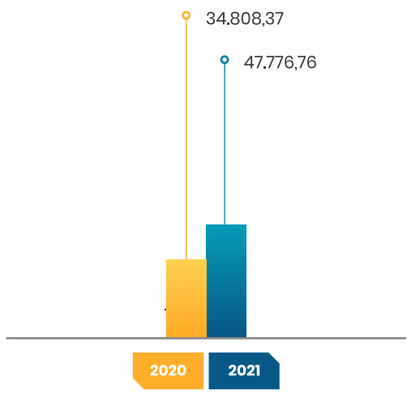
Definisi

Akun ini merupakan pecatata atas hutang pajak PPh 21, PPh 23, PPh Final dan PPN.

Beban Akrual

Komposisi Beban Akrual 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Beban Akrual	47.776,76	34.808,37	12.968,39	37,26



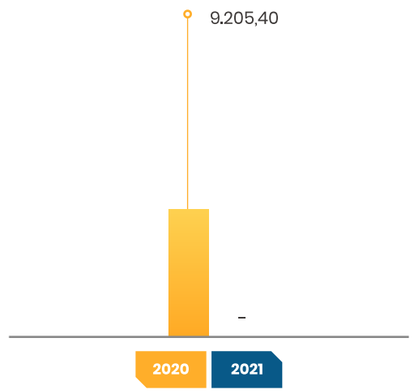
Definisi

Terjadi Peningkatan pada Beban Akrual sebesar 37,26% atau sebesar Rp.12.968,39 juta yang disebabkan oleh pengakuan atas beban hutang bunga Pinjaman Pemegang Saham dan Hutang Bunga Bank Kredit Investasi serta akrual atas beban usaha tahun 2021.

Provisi Pelapisan Jalan Tol Jangka Pendek

Komposisi Provisi Pelapisan Jalan Tol 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Provisi Pelapisan Jalan Tol	-	9.205,40	(9.205,40)	(100,00)



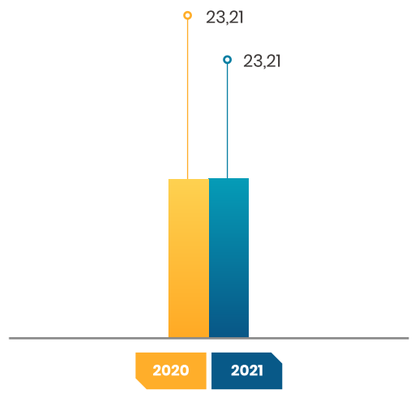
Definisi

Akun ini merupakan reklasifikasi dari akun Provisi Pelapisan Jalan Tol. Pada Tahun 2021 Provisi Pelapisan Jalan Tol direklas kembali ke akun Jangka Panjang.

Utang Kontraktor-Pihak Ketiga

Komposisi Utang Kontraktor-Pihak Ketiga 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Utang Kontraktor-Pihak Ketiga	23,21	23,21	-	-



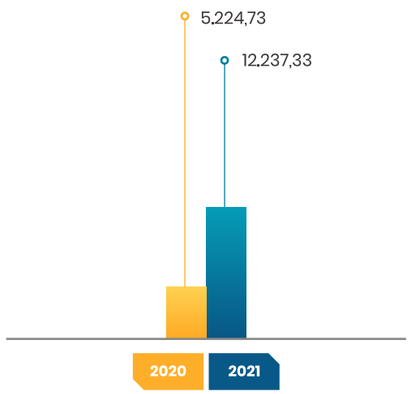
Definisi

Akun ini merupkan hutang retensi atas pekerjaan pengadaan rambu pada Tahun 2020.

Utang Usaha-Pihak Berelasi

Komposisi Utang Usaha-Berelasi 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Utang Usaha-Pihak Berelasi	12.237,33	5.224,73	7.012,60	134,22



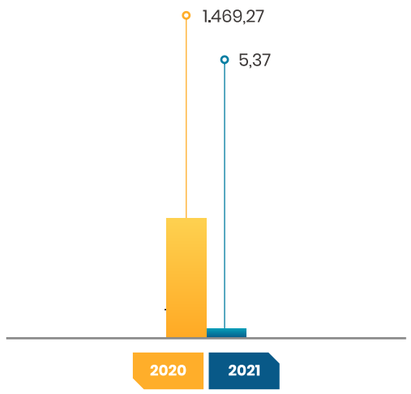
Definisi

Terjadi Peningkatan Utang Usaha Berelasi pada Tahun 2021, peningkatan hutang ini merupakan pengakuan atas kontrak Manajemen dengan PT JMTO dan PT JMTM pada tahun 2021.

Utang Usaha-Pihak Ketiga

Komposisi Utang Usaha-Pihak Ketiga 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Utang Usaha-Pihak Ketiga	5,37	1.469,27	(1.463,90)	(99,63)



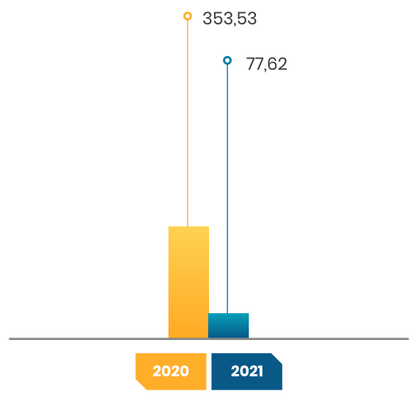
Definisi

Penurunan hutang Pihak Ketiga pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.1.463,90 juta. Pencatan Hutang ini merupakan pencatatan atas kontrak pekerjaan rutin selama tahun 2021.

Liabilitas Sewa

Komposisi Utang Lain-lain-Pihak Berelasi 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Liabilitas Sewa	77,62	353,53	(275,91)	(78,05)



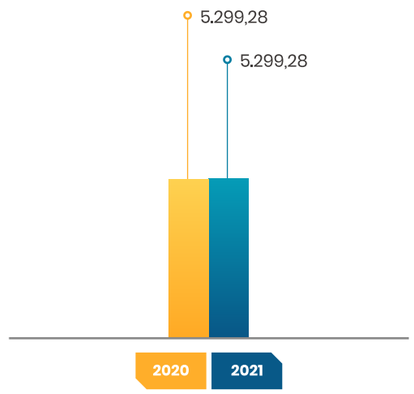
Definisi

Akun ini merupakan penerapan PSAK 73 pada tahun 2021 dimana Kontrak Sewa Kendaraan yang lebih dari 1 Tahun diakui sebagai Liabilitas Sewa.

Utang Lain-lain-Pihak Berelasi

Komposisi Utang Lain-lain-Pihak Berelasi 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Utang Lain-lain-Pihak Berelasi	5.299,28	5.299,28	-	-



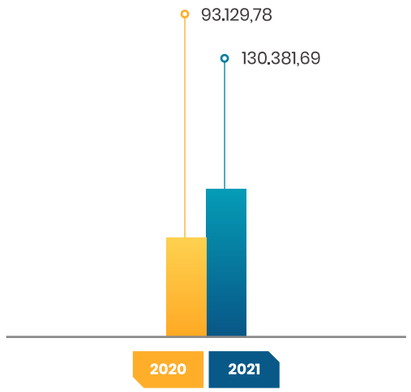
Definisi

Utang lain-lain pihak berelasi adalah hutang biaya praoperasi kepada pemegang saham. Sampai dengan tahun 2021 tidak terjadi perubahan terhadap nilai hutang lain-lain pihak berelasi.

Utang Bank

Komposisi Utang Bank 2021 dibandingkan dengan 2020 (yang jatuh tempo dalam 1 Tahun)

Uraian	(dalam Rp Juta)			
	2021	2020	Rp	%
Utang Bank	130.381,69	93.129,78	37.251,91	40,00



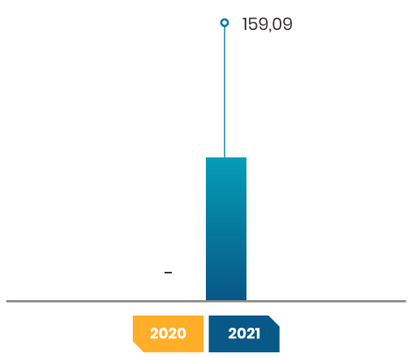
Definisi

Utang bank jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun 2021 meningkat diakibatkan karena perhitungan pembayaran pokok sudah dengan tarif 9.00% baki debet sedangkan tahun 2020 dengan tarif 6.00% baki debet.

Pendapatan Diterima Dimuka

Komposisi Pendapatan Diterima Dimuka 2021 dibandingkan dengan 2020 (yang jatuh tempo dalam 1 Tahun)

Uraian	(dalam Rp Juta)			
	2021	2020	Rp	%
Pendapatan Diterima Dimuka	159,09	-	159,09	-



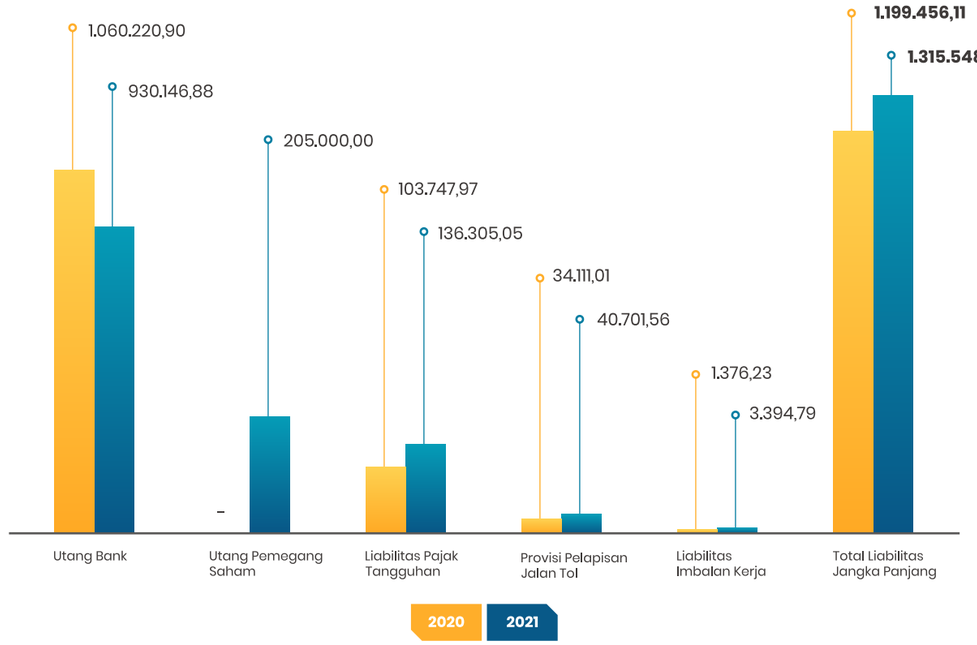
Definisi

Akun ini merupkan akun atas kontrak pendapatan lain-lain yang pembayarannya dibayarkan penuh pada tahun 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Komposisi Liabilitas Jangka Panjang 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	(dalam Rp Juta)			
	2021	2020	Rp	%
Utang bank	930.146,88	1.060.220,90	(130.074,02)	(12,27)
Utang Pemegang Saham	205.000,00	-	205.000,00	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	136.305,05	103.747,97	32.557,07	31,38
Provisi Pelapisan Jalan Tol	40.701,56	34.111,01	6.590,55	19,32
Liabilitas Imbalan Kerja	3.394,79	1.376,23	2.018,56	146,67
Total Liabilitas Jangka Panjang	**1.315.548,27**	**1.199.456,11**	**116.092,17**	**9,68**



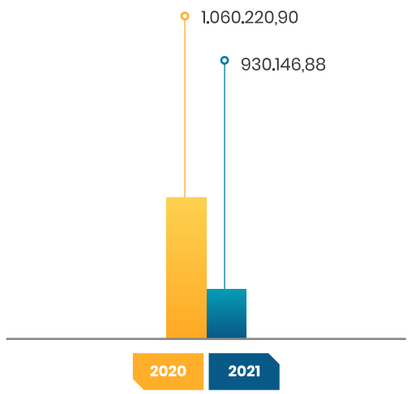
Definisi

Secara total liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 9,68 % di tahun 2021 dengan nilai Rp.1.315.548,27 juta dan Rp.1.199.456,11 juta di tahun 2020. Peingkatan liabilitas jangka panjang diakibatkan selama Tahun 2021 perseroan melakukan penambahan atas hutang Pemegang Saham.

Utang Bank

Komposisi Utang Bank 2021 dibandingkan dengan 2020 (yang jatuh tempo lebih dari 1 Tahun)

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Utang bank	930.146,88	1.060.220,90	(130.074,02)	(12,27)



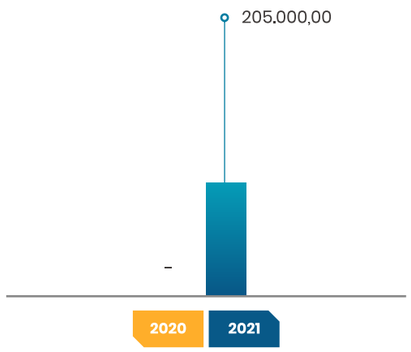
Definisi

Utang bank mengalami penurunan sebesar 12,27 %dibadingkan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan perseroan telah mengangsur hutang pokok selama tahun 2021 dan adanya reklasifikasi pencatatan hutang bank jangka panjang ke hutang bank jangka pendek dimana nilai hutang bank tahun 2021 sebesar Rp.930.146,88 juta dan tahun 2020 sebesar Rp.1.060.220,90 juta.

Utang Pemegang Saham

Komposisi Utang Pemegang Saham 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Utang Pemegang Saham	205.000,00	-	205.000,00	-



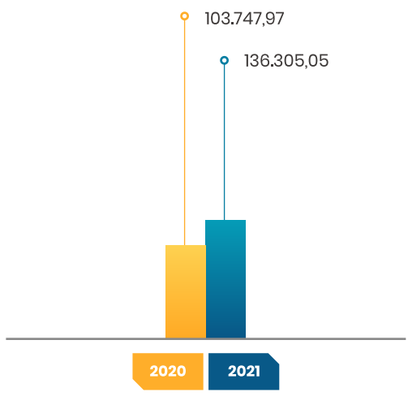
Definisi

Selama Tahun 2021, Perseroan melakukan penambahan atas Pokok Hutang Pemegang Saham kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Komposisi Liabilitas Pajak Tangguhan 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Liabilitas Pajak Tangguhan	136.305,05	103.747,97	32.557,07	31,38



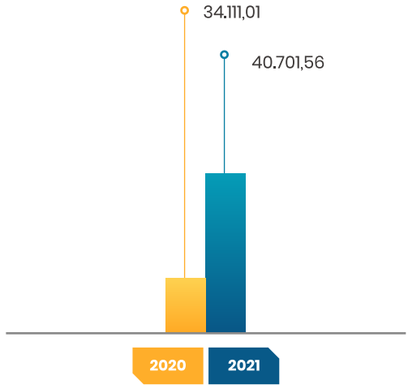
Definisi

Liabilitas Pajak Tangguhan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 31,38% yaitu Rp.32.557,07 juta dan liabilitas pajak tangguhan menjadi Rp.136.305,05 sedangkan pada saat tahun 2020 sebesar Rp103.747,97 juta.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Komposisi Provisi Pelapisan Jalan Tol 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
	*(dalam **Rp Juta**)*			
Provisi Pelapisan Jalan Tol	40.701,56	34.111,01	6.590,55	19,32



Definisi

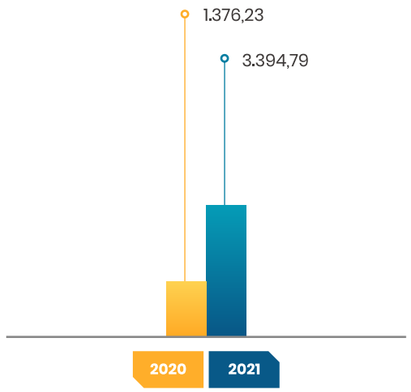
Penambahan pada akun ini merupakan hasil reklasifikasi dari akun Provisi Pelapisan Jalan Tol jangka Pendek ke Jangka Panjang serta tambahan cadangan Provisi Jalan Tol pada tahun 2021.

Liabilitas

Liabilitas Imbalan Kerja

Komposisi Liabilitas Imbalan Kerja 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	(dalam Rp Juta)			
	2021	2020	Rp	%
Liabilitas Imbalan Kerja	3.394,79	1.376,23	2.018,56	146,67



Definisi

Liabilitas secara pencatatan Akuntansi mengalami peningkatan sebesar 146,67% dari tahun 202 ke tahun 2021, ini sesuai dengan perhitungan dari Konsultan Aktuaris.

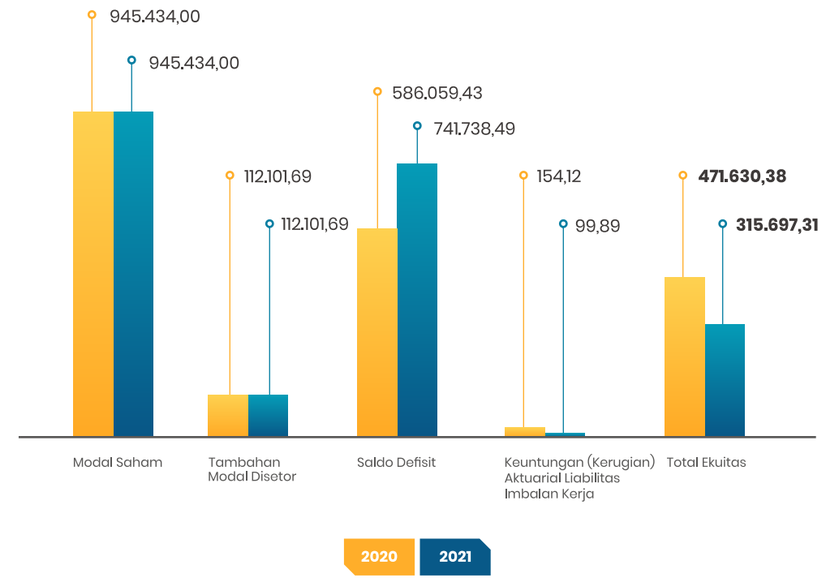


Ekuitas

Ekuitas

Komposisi Ekuitas 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	(dalam Rp Juta)			
	2021	2020	Rp	%
Modal Saham	945.434,00	945.434,00	-	-
Tambahan Modal Disetor	112.101,69	112.101,69	-	-
Saldo Defisit	741.738,49	586.059,43	155.679,07	26,56
Keuntungan(Kerugian) Aktuarial Liabilitas Imbalan Kerja	99,89	154,12	(54,22)	(35,18)
Total Ekuitas	**315.697,31**	**471.630,38**	**(155.933,07)**	**(33,06)**

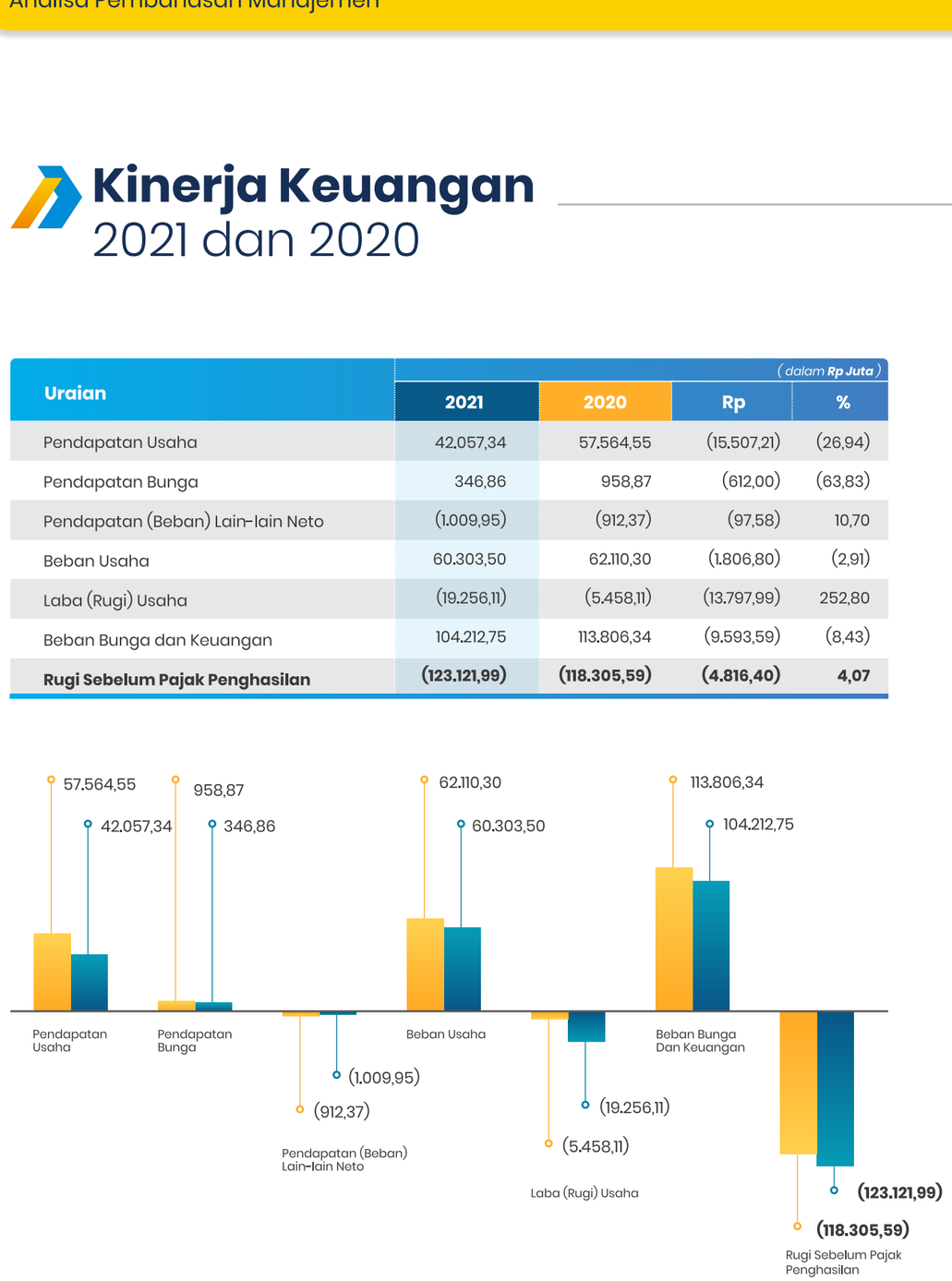


Definisi

Perseroan mencatat jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar Rp.315.697,31 juta. Kondisi tersebut mengalami penurunan 33,06% atau sebesar Rp.155,933,07 juta dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.471.630,38 juta.

Kinerja Keuangan 2021 dan 2020

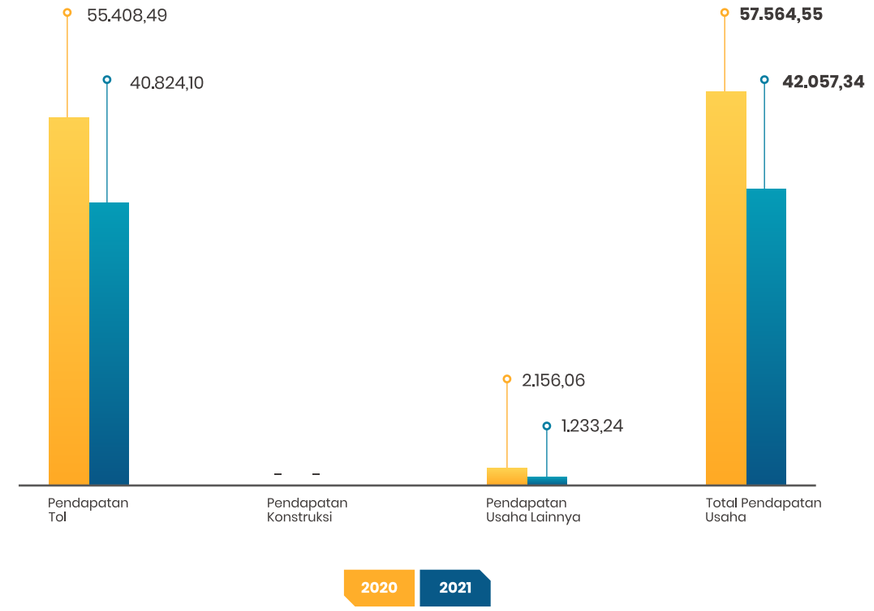
Uraian	2021	2020	Rp	%
		*(dalam **Rp Juta**)*		
Pendapatan Usaha	42.057,34	57.564,55	(15.507,21)	(26,94)
Pendapatan Bunga	346,86	958,87	(612,00)	(63,83)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Neto	(1.009,95)	(912,37)	(97,58)	10,70
Beban Usaha	60.303,50	62.110,30	(1.806,80)	(2,91)
Laba (Rugi) Usaha	(19.256,11)	(5.458,11)	(13.797,99)	252,80
Beban Bunga dan Keuangan	104.212,75	113.806,34	(9.593,59)	(8,43)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	**(123.121,99)**	**(118.305,59)**	**(4.816,40)**	**4,07**



Pendapatan Usaha

Komposisi Pendapatan Usaha 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	2021	2020	Rp	%
		*(dalam **Rp Juta**)*		
Pendapatan Tol	40.824,10	55.408,49	(14.584,39)	(26,32)
Pendapatan Konstruksi			-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	1.233,24	2.156,06	(922,83)	(42,80)
Total Pendapatan Usaha	**42.057,34**	**57.564,55**	**(15.507,21)**	**(26,94)**



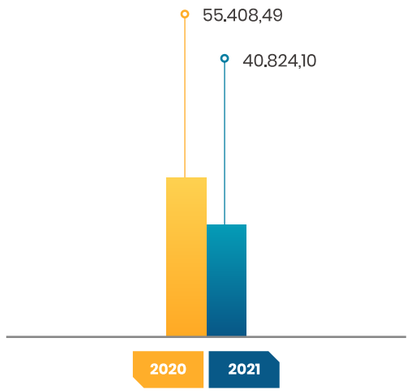
Definisi

Pendapatan usaha perseroan terdiri dari Pendapatan Tol, Pendapatan Kontruksi, dan Pendapatan Usaha Lainya. Selama tahun 2021 pendapatan usaha perseroan mencapai Rp.42.057,34 juta atau turun 26,94% dari pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp.57.564,55 juta. Dari segi pendapatan tol terjadi penurunan sebesar 26,32% dari Rp.55.408,49 juta di tahun 2020 menjadi Rp.40.824,10 juta di tahun 2021. Penurunan Pendapatan pada Tahun 2021 dirasakan oleh Perseroan, ini merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 & 2021.

Pendapatan Tol

Komposisi Pendapatan Tol 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Pendapatan Tol	40.824,10	55.408,49	(14.584,39)	(26,32)



Definisi

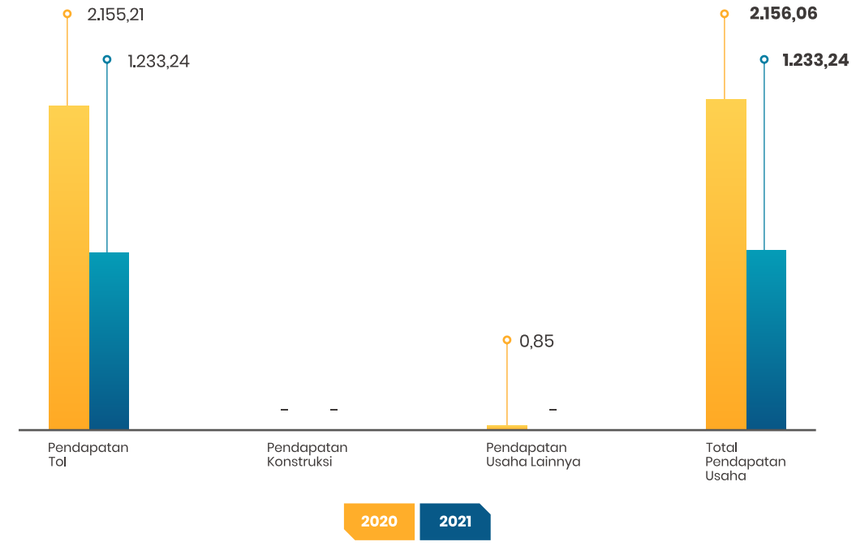
Dari segi pendapatan tol terjadi penurunan sebesar 26,32% dari Rp.55.408,49 juta di tahun 2020 menjadi Rp.40.824,49 juta di tahun 2021. Penurunan Pendapatan pada Tahun 2021 dirasakan oleh Perseroan, ini merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 & 2021.



Pendapatan Usaha Lainnya

Komposisi Pendapatan Usaha lainnya 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Sewa Lahan	1.233,24	2.155,21	(921,98)	(42,78)
Pendapatan Iklan		-	-	-
Lainnya		0,85	(0,85)	(100,00)
Total Pendapatan Usaha Lainnya	**1.233,24**	**2.156,06**	**(922,83)**	**(42,80)**



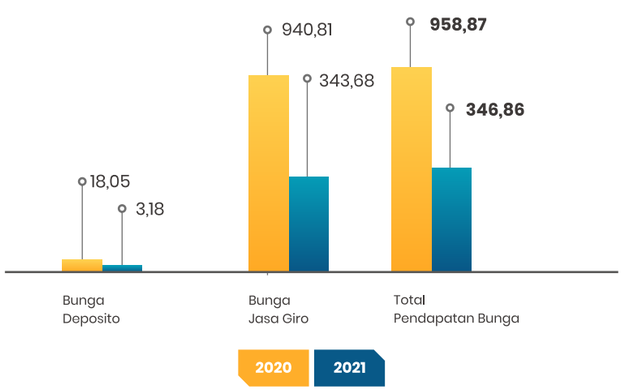
Definisi

Pendapatan usaha lainnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 42,80 % dibandingkan tahun 2020. pada tahun 2021 nilai pendapatan usaha lainnya sebesar Rp.1.233,24 juta dan Rp.2.156,06 juta ditahun 2020.

Pendapatan Bunga

Komposisi Pendapatan Bunga 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Bunga Deposito	3,18	18,05	(14,87)	(82,38)
Bunga Jasa Giro	343,68	940,81	(597,13)	(63,47)
Total Pendapatan Bunga	**346,86**	**958,87**	**(612,00)**	**(63,83)**



Definisi

Pada tahun 2021, pendapatan bunga mengalami penurunan 63,83 % atau sebesar Rp.346,86 juta di bandingkan tahun 2020 sebesar Rp.958,87juta. Penurunan pendapatan bunga disebabkan oleh menurunya kas dan setara kas perseroan.

Beban Usaha

Komposisi Beban Usaha 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Beban Pengumpulan Jalan Tol	10.631,36	10.907,69	(276,33)	(2,53)
Beban Pelayanan Pemakai Jalan Tol	3.249,90	5.075,72	(1.825,82)	(35,97)
Beban Pemeliharaan Jalan Tol	27.981,45	29.708,14	(1.726,69)	(5,81)
Beban Umum dan Administrasi	18.440,79	16.418,75	2.022,04	12,32
Beban Konstruksi			-	-
Total Beban Usaha	**60.303,50**	**62.110,30**	**(1.806,80)**	**(2,91)**



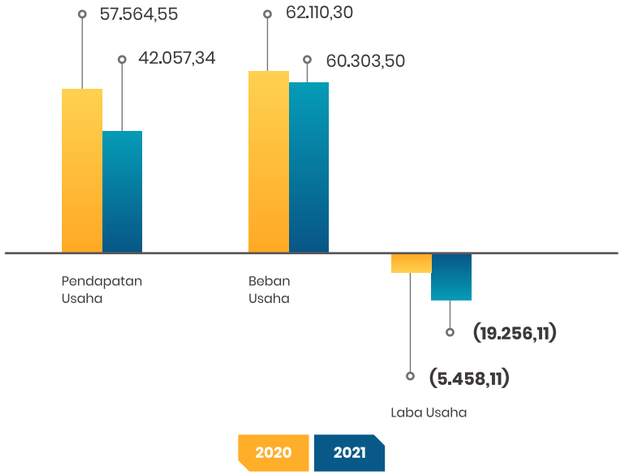
Definisi

Pada tahun 2021 secara total beban usaha mengalami penurunan sebesar 2,91% dari Rp.62.110,30 juta di tahun 2020 dibanding tahun 2021 Rp.60.303,50 juta. Penurunan salah satu disebabkan oleh penurunan Amortisasi Jalan Tol serta Efisiensi yang dilakukan Perseroan selama tahun 2021 untuk mengimbangi penurunan Pendapatan akibat Pandemi Covid-19.

Laba Usaha

Komposisi Laba Usaha 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Pendapatan Usaha	42.057,34	57.564,55	(15.507,21)	(26,94)
Beban Usaha	60.303,50	62.110,30	(1.806,80)	(2,91)
Laba Usaha	**(19.256,11)**	**(5.458,11)**	**(13.797,99)**	**252,80**



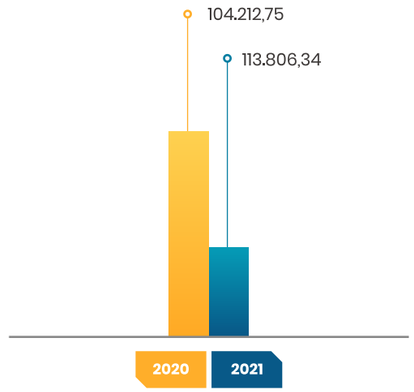
Definisi

Laba usaha perseroan di tahun 2021 mencapai minus Rp.19.256,11 juta. Pencapaian tersebut lebih besar dari tahun 2020 sebesar 252,80% yang sangat di Akibatkan dari Pendemi Covid-19 pada Tahun 2021.

Beban Bunga dan Keuangan

Komposisi Beban Bunga dan Keuangan 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Beban Bunga dan Keuangan	104.212,75	113.806,34	(9.593,59)	(8,43)



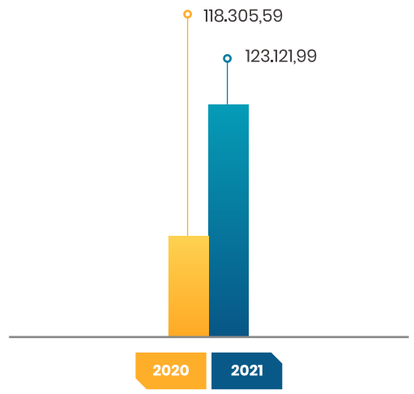
Definisi

Selama Tahun 2021, suku bunga kredit relatif rendah sehingga perseroan mampu menekan beban bunga dan keuangan pada tahun 2021 sebesar 8,43 % atau sebesar Rp.9.593,59 juta dibandingkan dengan Tahun 2020.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Komposisi Rugi Sebelum Pajak Penghasilan 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	123.121,99	118.305,59	4.816,40	4,07



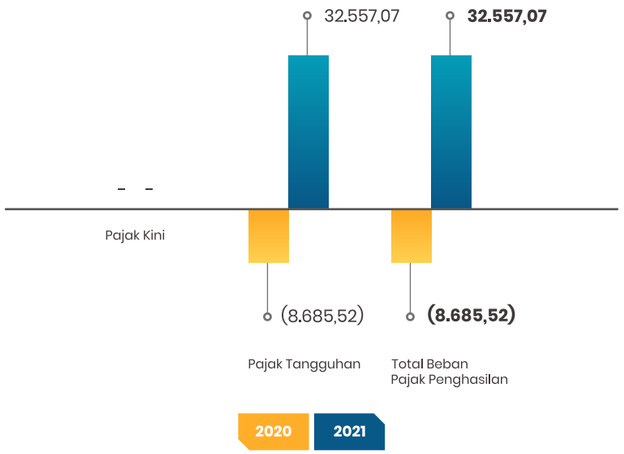
Definisi

Perseroan mencatat rugi sebelum pajak penghasilan tahun buku 2021 sebesar Rp.123.121,99 juta terjadi peningkatan atas rugi dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,07%. Peningkatan ini diakibatkan penurunan pendapatan tol selama tahun 2021 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Komposisi Beban Pajak Penghasilan 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Pajak Kini	–	–	–	–
Pajak Tangguhan	32.557,07	(8.685,52)	41.242,60	(474,84)
Total Beban Pajak Penghasilan	**32.557,07**	**(8.685,52)**	**41.242,60**	**(474,84)**



Definisi

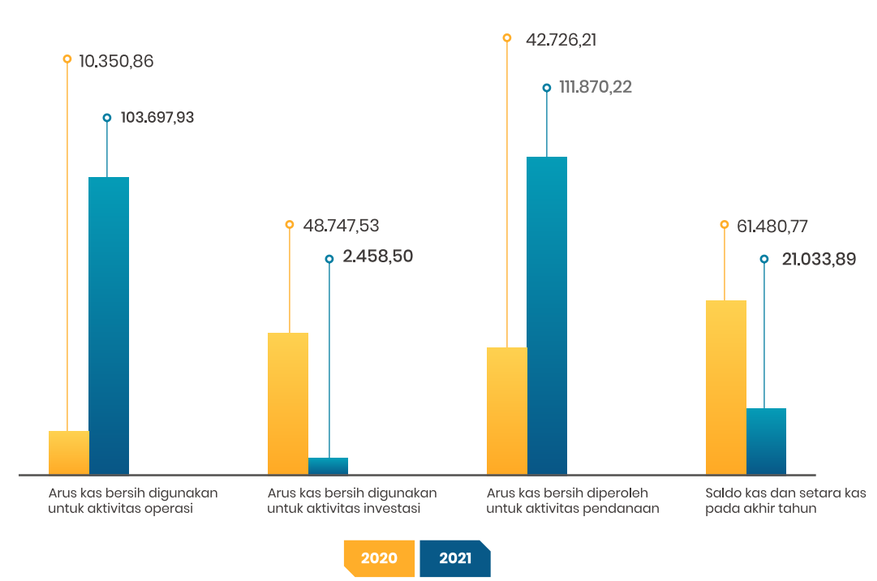
Pada Tahun 2021 Perseroan mencatatkan Beban Pajak Penghasilan, ini merupakan Akibat Perubahan Tarif Pajak dari 25% menjadi 22% serta perhitungan di tahun 2022 sebesar 20%, namun dikarenakan perhitungan pada tahun 2022 menjadi 22%, sehingga pada tahun 2021 perhitungan pajak tangguhan disesuikan kembali sehingga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Komposisi Laporan Arus Kas 2021 dibandingkan dengan 2020

Uraian	*(dalam **Rp Juta**)*			
	2021	2020	Rp	%
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi	103.697,93	53.582,02	50.115,90	93,53
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	2.458,50	2.540,28	(81,78)	(3,22)
Arus Kas Bersih diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	111.870,22	47.602,21	64.268,01	135,01
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	21.033,89	8.695,71	12.338,18	141,89



Definisi

- Arus kas bersih dari Aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar 93,53 % diakibatkan diakibatkan pembayaran beban Bunga Bank selama tahun 2021
- Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mengalami penurunan dari Rp 2.540,28 juta di tahun 2020 menjadi Rp. 2.458,50 juta di tahun 2021
- Arus kas bersih dari Aktifitas Pendanaan mengalami peningkatan sebesar 141,89% dari tahun 2021. Pada tahun 2021 arus kas pendanaan diterima dari Tambahan Setoran Modal, Utang Pemegang Saham dan Pembayaran Pokok Hutang Bank KI.

Menjadi Perusahaan Pengelola Jalan Tol Terkemuka di Indonesia

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan 157

Organ Tata Kelola Perusahaan 158

Kegiatan Manajemen untuk Mendukung Kegiatan Perseroan 159

06





Tata Kelola Perusahaan

Perseroan telah bertekad untuk menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, maka perlu melandasi dengan struktur dan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Tujuan Memberlakukan GCG:
Mengacu pada pemberlakuan GCG dari Pemegang Saham, Perseroan menerapkan GCG dengan tujuan:

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan, pelanggan, mitra kerja, masyarakat dan lingkungan agar berjalan dengan baik, harmonis, serta akomodatif terhadap semua kepentingan.
- Mendorong dan mendukung Perseroan agar tumbuh dan berkembang.
- Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
- Mengelola risiko secara lebih tersistem.
- Meningkatkan pertanggung jawaban kepada *stake-holders*.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
- Memperbaiki budaya kerja Perseroan.
- Meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik.



Organ Tata Kelola Perusahaan

1. UU Nomor : 40 Tahun 2007
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Rapat Umum Pemegang Saham
4. Dewan Komisaris
5. Direksi Perseroan
6. Peraturan-peraturan Perusahaan



Kegiatan Manajemen Untuk Mendukung Kegiatan Perseroan

1. Pelaksanaan RUPS (Fisik dan Sirkuler tahun 2021)
2. RAGAB
3. Pemenuhan SK Direksi dan Ketentuan Perusahaan Yang Lain
4. Rapat Senior Leader
5. Penyusunan RJPP
6. Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015)
7. Audit Surveillance Sistem Management Terintegrasi





Sinergi Pembangunan Dan Pelestarian Alam (penanaman Lebih Dari

7000

Tanaman Mangrove Di Area Sekitar Jalan Tol Bali Mandara)



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial 162

Tanggung Jawab Lingkungan 164

07



Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Pada pertengahan tahun 2021, muncul varian baru dari virus corona yang dikenal dengan Varian Delta. Varian Delta di Indonesia membuat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia meningkat dan mencapai puncaknya pada Juli 2021. Rumah sakit penuh dan kelangkaan oksigen turut menjadi persoalan di masa ini.Hampir seluruh sektor terdampak. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona, khususnya Bali yang hanya mengandalkan Pariwisata, selain itu di bulan Oktober 2021 masyarakat Bali kembali ditimpa bencana gempa alam yang mengguncang daerah Karangasem dan Bangli, yang dimana mengakibatkan banyaknya kerusakan dan menimbulkan korban jiwa saat peristiwa gempa bumi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Perseroan melalui Program Jasa Marga Group Peduli, Jasamarga Bali Tol peduli melakukan beberapa kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako, pemberian alat Kesehatan, tabung oksigen dan sosialisasi pola hidup sehat. Program bantuan paket sembako ini merupakan bentuk dari kepedulian Perseroan terhadap masyarakat serta lingkungan dan salah satu kontribusi Perseroan terhadap penanganan pandemi Covid-19.





6 Mei 2021, JBT bersama PT PLN dan ASDP memberikan 5000 Paket Sembako Kepada Yayasan Tungked Werdha Bali di Gianyar





18 Agustus 2021, Bantuan Oksigen BUMN





26 Agustus 2021, Bantuan paket sembako kepada masyarakat Desa Kerta, Payangan, Gianyar, Bali





18 Oktober 2021, Bantuan Kepada Korban Gempa Bumi di Bangli







28 Oktober 2021, Pembagian 150 paket Sembako bagi korban Gempa Bumi di Desa Karangasem, Bali

Tanggung Jawab Lingkungan
Perusahaan

Pada 19 November 2021, Perseroan telah menggelar kegiatan tanam pohon mangrove yang bertepatan dengan HUT PT Jasamarga Bali Tol yang ke 10,

Total pohon yang telah ditanam adalah 7.000 bibit Manggrove.

Kegiatan tersebut menerapkan salah satu sikap peduli perseroan terhadap lingkungan serta menganut konsep Tri Hita Karana dan salah satu implementasi dari salah satu Misi Perseroan yaitu:

> ***Mengoperasikan Jalan Tol Dengan Tetap Menjaga Keasrian Lingkungan Hidup dan Budaya Bali***















Pengelolaan
Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan 168

Program Pengembangan SDM 170

08

Mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kopetensi inti untuk keberlanjutan perusahaan



Komposisi
Karyawan



Kualifikasi Usia Karyawan
Desember 2021

Usia	Jumlah	Prosentase
20 - 25	4	4%
26 - 30	36	38%
31 - 35	42	44%
36 - 40	5	5%
41 - 45	3	3%
46 - 50	3	3%
>51	3	3%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Agama Karyawan
Desember 2021

Agama	Jumlah	Prosentase
Islam	37	39%
Hindu	56	58%
Kristen	3	3%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Pendidikan Karyawan
Desember 2021

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
S2	1	1%
S1	28	29%
D3	4	4%
SMA	63	66%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Jenis Kelamin Karyawan
Desember 2021

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	80	83%
Perempuan	16	17%
Total	**96**	**100%**

Kualifikasi Status Karyawan
Desember 2021

Status Karyawan	Jumlah	Prosentase
Penugasan	0	0%
Tetap	96	100%
PKWT	0	0%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Unit Kerja Karyawan
Desember 2021

Unit Kerja	Jumlah	Prosentase
Non Operasional	15	16%
Operasional JMTO	45	47%
Operasional JMTM	6	6%
Penugasan Luar Bali	30	31%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Jabatan Karyawan
Desember 2021

Jabatan	Jumlah	Prosentase
Struktural	13	14%
Fungsional	83	86%
Total	**96**	**100%**



Kualifikasi Masa Kerja Karyawan
Desember 2021

Masa Kerja	Jumlah	Prosentase
< 4	2	2%
4 - 5	1	1%
5 - 7	93	97%
> 7	0	0%
Total	**96**	**100%**



Program
Pengembangan SDM

Pendidikan Dan Pelatihan

Sejak diberlakukan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) praktis kegiatan publik menjadi serba terbatas, hal ini dilakukan untuk mencegah resiko penularan covid-19, sehingga seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan tatap muka ditiadakan, begitu pula terkait kegiatan – kegiatan pelatihan khususnya di Jasa Marga Group dipuasatkan di JMLI (Jasa Marga Learning Institute) dengan metode seminar secara online yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan Jasa Marga Group, serta metode pemebelajaran yang modern diterapkan menggunakan aplikasi JM Click, Dengan memanfaatkan aplikasi JM Click, Karyawan Jasa Marga dapat mengakses berbagai macam konten pembelajaran, mulai dari yang berbentuk soal, hingga audio dan visual melalui smartphone masing-masing sehingga memudahkan akses pembelajaran kepada rekan-rekan Karyawan Jasa Marga Group yang dituntut untuk proaktif dalam mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman.



Program Kesejahteraan Karyawan

1. Pada bulan Januari 2021 telah dilaksanakan kenaikan gaji berkala;
2. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (Satu) kali penghasilan;
3. Pemberian Ongkos Cuti masa kerja minimal 1 tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan;
4. Pemberian Vocer Belanja senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk pembelian bahan pokok, serta dapat menujang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.





Program Kesehatan SDM

1. Melakukan kerjasama pelayanan kesehatan bagi Komisaris, Direksi serta Karyawan dan keluarganya dengan:
   a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan (BPJS Kesehatan);
   b. Asuransi Mandiri *Inhealth*.

2. Program Uji Kesehatan Berkala (UKB) bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

3. Program protokol Kesehatan Karyawan terkaid COVID-19
   a. Pemberian Vitamin C dan E untuk menjaga daya tahan tubuh karyawan
   b. Pemberian APD protokol pencegahan COVID-19 seperti Masker, sarung tangan, dan face shield bagi Karyawan
   c. Pemeriaksaan Rapid tes secara berkala kepada seluruh Karyawan untuk diteksi dini penyebaran COVID-19 dilingkungan Perusahaan
   d. Pemasangan Banner Upaya Preventif Individu dan Himbauan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Memasuki Ruang Kerja.
   e. Penyediaan Hand Sanitizer dan sarana cuci tangan, serta himbauan tata cara penggunaan Hand Sanitizer dan mencuci tangan yang benar.
   f. Pelaksanaan pembatasan sosial, dengan melaksanakan penyesuian sistem kerja bagi Karyawan Work From Home.
   g. Penyemprotan Cairan Desinfektan Di Kantor, Pul Ruas dan Gerbang Tol PT Jasamarga Bali Tol
   h. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kepada Seluruh Karyawan dan Mitra yang dilaksanakan pada bulan Mei untuk Vaksin dosis I dan Agustus Vaksin dosis II

4. Kegiatan berbagi Informasi Kesehatan kepada Karyawan yaitu sebagai berikut:
   a. Sosialisasi terkait Vaksin COVID-19 oleh Siloam Hospital.
   b. Sosialisasi Penggunaan Mandiri Inhealt.
   c. Sosialisasi terkait pencegahan penyakit dan informasi kesehatan yang bekerjasama dengan Siloam Hospital.





Program Kerekatan Karyawan

1. Penanaman manggrove yang diikuti oleh seluruh karyawan dan rekanan dalam menyambut hari jadi perusahaan yang ke-10 tahun

2. Pelaksanaan lomba pembuatan video Tata Nilai AKHLAK dan K3

3. Pemberian konsumsi bagi Karyawan saat bulan Ramadhan di waktu berbuka dan sahur untuk menambah kerekatan karyawan.

4. Donor darah yang dilaksanakan 1 (satu) kali setahun untuk menambah kerekatan dan kepedulian karyawan terhadap sesama.

5. Kegiatan Safari Management adalah kunjungan para Management ke Lapangan (Gerbang Tol dan Kantor Operasional) yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.



Program Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-17/MBU/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 712 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021, Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 642 Tahun 2020, Nomor : 4 Tahun 2020, Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.10.003.1/8637/PK/BKD Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021.
8. Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali secara Serentak di Seluruh Bali.
9. Surat Edaran Gubenur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
10. Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.
11. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Pengembangan IT Di Lingkungan SDM

1. Program Paperless meliputi:
   a. E-mail corporate
   b. Aplikasi e-document
   c. Disposisi Elektronik
   d. Nota Dinas Elektronik termasuk penomoran dan agenda.

2. Aplikasi kuiesioner berbasis Website





Mencari terobosan dan peluang usaha yang sejalan dengan bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan usaha lain



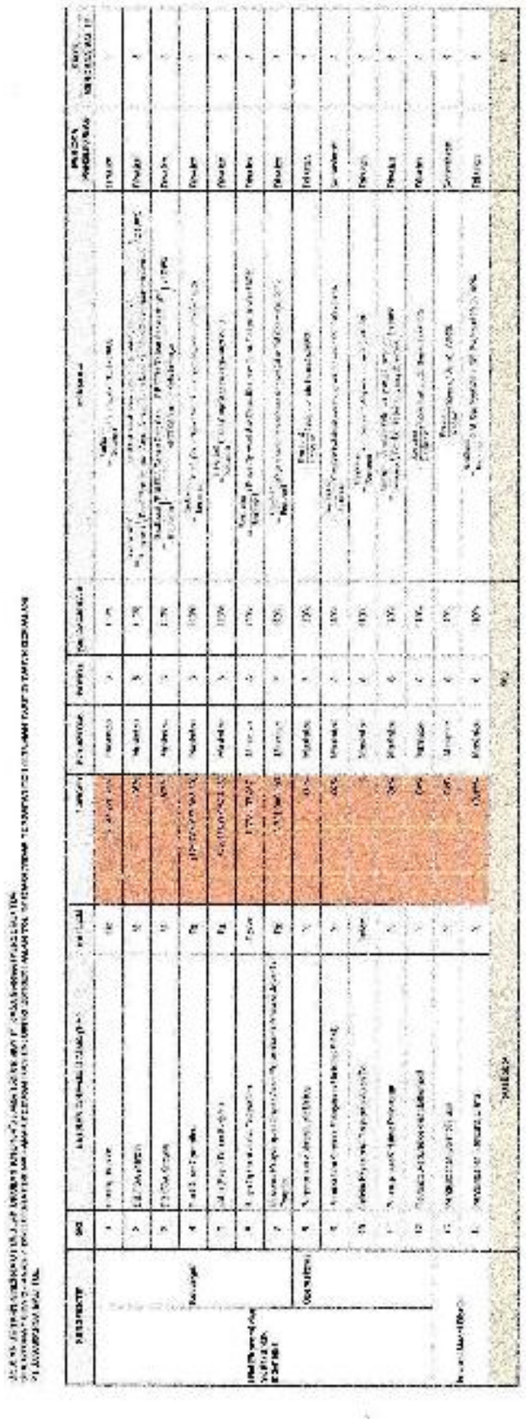
Tanggung Jawab Manajemen

Realisasi KPI 178

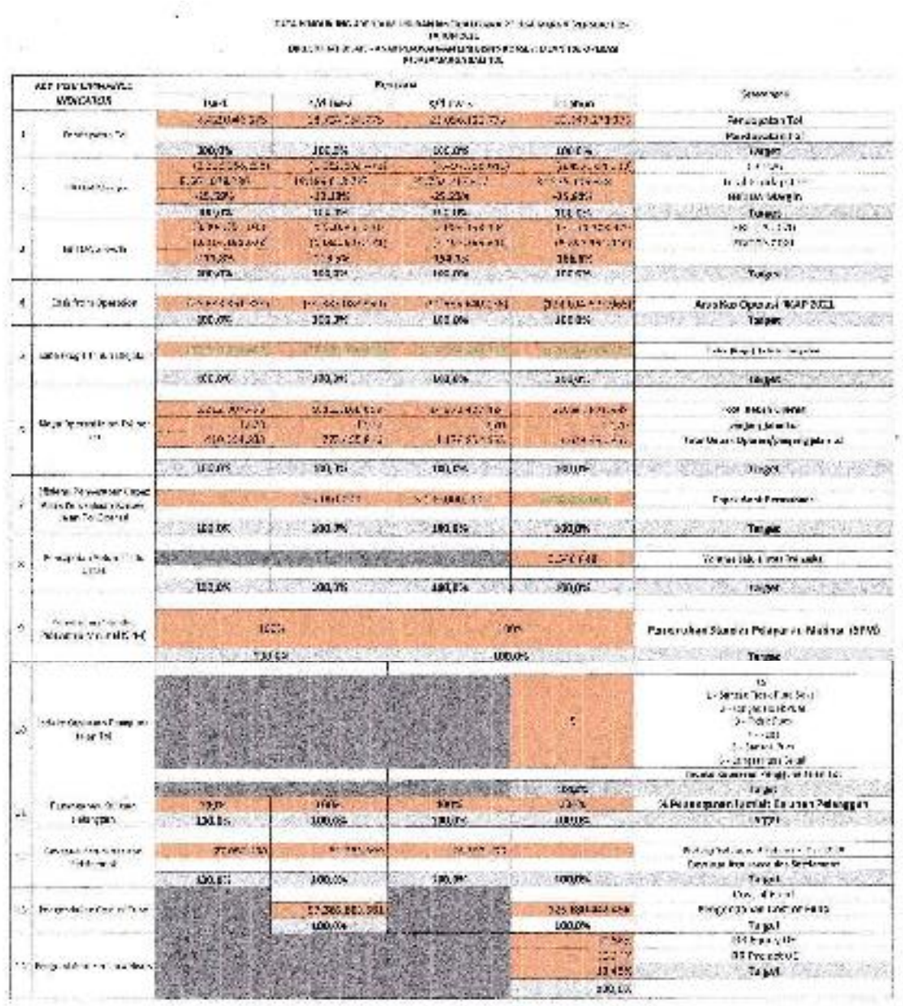
Tanggung Jawab Manajemen 181

09

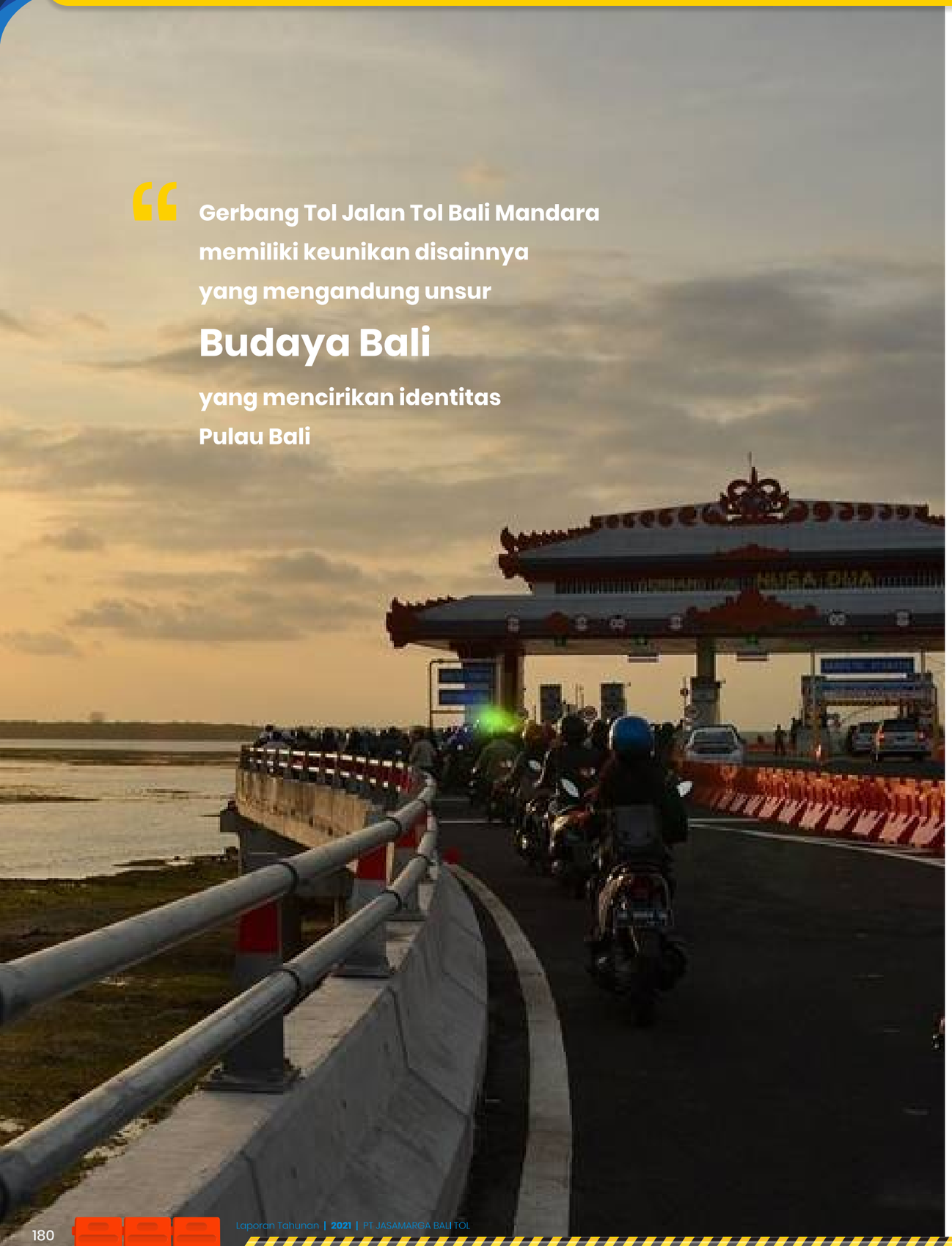
Realisasi KPI



I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama



I Ketut Adiputra Karang
Direktur Utama



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2021

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Atas Laporan Tahunan 2021 **PT JASAMARGA BALI TOL**

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan **PT JASAMARGA BALI TOL** Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
Denpasar, Februari 2022

BAGUS CAHYA ARINTA B.
Komisaris Utama

EDI PRIYANTO
Komisaris

ANAK AGUNG NGURAH MAHA DIPTHA
Komisaris

KOMPYANG RAKA SWANDIKA
Komisaris

LUKMAN F LAISA
Komisaris

I KETUT ADIPUTRA KARANG
Direktur Utama

I GUSTI PUTU ARYA BUDHI ASTAWA
Direktur Keuangan





Laporan Keuangan

PT JASAMARGA BALI TOL

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independe

10

Mengelola keuangan secara efisien sehingga mampu enyeimbangkan antara pendapatan dengan kewajiban pembayaran utang, serta kebutuhan biaya pengoperasian dan pemeliharaan

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6-49

****

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT JASAMARGA BALI TOL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I Ketut Adiputra Karang
   Alamat kantor : Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali, 80222
   Alamat domisili sesuai KTP : JL Cipinang Baru I No 34 A RT001/002, Cipinang, Jakarta Timur
   Nomor telepon : +62 81239 171 819
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : I Gusti Putu Arya Budhi Astawa
   Alamat kantor : Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali, 80222
   Alamat domisili sesuai KTP : Delta Sari Indah Blok B1/06, Kuruk Sari, Waru, Sidoarjo
   Nomor telepon : +62 82139 555 938
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol;

2. Laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Jasamarga Bali Tol.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 10 April 2022
PT Jasamarga Bali Tol

I Ketut Adiputra Karang	**I Gusti Putu Arya Budhi Astawa**
Direktur Utama	Direktur Keuangan

PT Jasamarga Bali Tol
Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali 80222
+62 361 725026 +62 361 723937
humas@jasamargabalitol.co.id
Hotline Service: +62 361 725959

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5030
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00613/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasamarga Bali Tol

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol terlampir, yang terdiri darilaporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

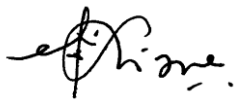
Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00613/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/IV/2022 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasamarga Bali Tol tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro dan Surja



Dagmar Zevilianty Djamal
Registrasi Akuntan Publik No.AP.0690

18 April 2022

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	4	21.034	8.696
Dana dibatasi penggunaannya	5	2.783	2.265
Piutang lain-lain	7	1.296	1.361
Biaya dibayar dimuka - neto	8	760	1.241
Piutang pendapatan tol	6	66	103
TOTAL ASET LANCAR		**25.939**	**13.666**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	9	726	1.306
Aset takberwujud - neto			
Hak pengusahaan jalan tol	10	1.796.120	1.800.687
Lainnya	11	575	1.203
Dana dibatasi penggunaannya	5	4.092	3.976
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**1.801.513**	**1.807.172**
TOTAL ASET		**1.827.452**	**1.820.838**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	12		
Pihak berelasi		12.238	5.225
Pihak ketiga		5	1.469
Liabilitas sewa	16	78	354
Utang lain-lain - pihak berelasi	13	5.299	5.299
Utang pajak	20a	246	238
Beban akrual	14	47.777	34.808
Pendapatan diterima dimuka		158	-
Provisi pelapisan jalan tol	19		9.205
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	17	130.382	93.130
Utang retensi	15	23	23
Utang pemegang saham	18	205.000	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**401.206**	**149.751**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	20c	136.305	103.748
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	17	930.147	1.060.221
Provisi pelapisan jalan tol	19	40.701	34.111
Liabilitas imbalan kerja	21	3.395	1.376
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**1.110.548**	**1.199.456**
TOTAL LIABILITAS		**1.511.754**	**1.349.207**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham (Rupiah penuh) Modal dasar - 1.440.434 saham Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 945.434 saham	22	945.434	945.434
Tambahan modal disetor	23	112.102	112.102
Akumulasi rugi		(741.738)	(586.059)
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain		(100)	154
TOTAL EKUITAS		**315.698**	**471.631**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.827.452**	**1.820.838**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
PENDAPATAN			
Pendapatan tol	24	40.824	55.408
Pendapatan usaha lainnya	25,32a	1.233	2.156
Total		**42.057**	**57.564**
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Beban tol	26	(41.863)	(45.691)
LABA BRUTO		**194**	**11.873**
Beban umum dan administrasi	27	(19.404)	(16.419)
Beban lain-lain - neto		(1.363)	(912)
RUGI USAHA		**(20.573)**	**(5.458)**
Pendapatan keuangan	29	434	1.199
Beban pajak atas pendapatan keuangan	29	(87)	(240)
Biaya keuangan	18,28	(102.896)	(113.806)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**(123.122)**	**(118.305)**
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	20b	**(32.557)**	**8.685**
RUGI TAHUN BERJALAN		**(155.679)**	**(109.620)**
RUGI KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:			
Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21	(254)	(244)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(155.933)**	**(109.864)**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Akumulasi rugi	(Rugi)/pendapatan komprehensif lain	Total
Saldo tanggal 31 Desember 2019		**745.434**	**112.102**	**(476.439)**	**398**	**381.495**
Setoran modal	22	200.000	-	-	-	200.000
Rugi tahun berjalan		-	-	(109.620)	-	(109.620)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21	-	-	-	(244)	(244)
Saldo tanggal 31 Desember 2020		**945.434**	**112.102**	**(586.059)**	**154**	**471.631**
Rugi tahun berjalan		-	-	(155.679)	-	(155.679)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21	-	-	-	(254)	(254)
Saldo tanggal 31 Desember 2021		**945.434**	**112.102**	**(741.738)**	**(100)**	**315.698**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pendapatan tol		40.861	55.539
Penerimaan kas dari pendapatan usaha lainnya		1.298	2.452
Pembayaran kepada pemasok		(33.691)	(36.985)
Pembayaran kepada karyawan		(14.805)	(16.726)
Penambahan dana dibatasi penggunaannya		1.753	47.710
Pendapatan bunga		347	959
Pembayaran bunga		(92.546)	(106.533)
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi		**(96.783)**	**(53.584)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset takberwujud	11	(2.459)	(2.540)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		**(2.459)**	**(2.540)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran liabilitas sewa	16	(291)	(486)
Penerimaan/(pembayaran) utang pemegang saham	18	205.000	(133.286)
Pembayaran pinjaman bank	17	(93.129)	(18.626)
Penerimaan setoran modal	22	-	200.000
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		**111.580**	**47.602**
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		**12.338**	**(8.520)**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4	**8.696**	**17.216**
KAS DAN BANK KAS AKHIR TAHUN	4	**21.034**	**8.696**

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 33.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan") berkedudukan di Denpasar, Bali, berdasarkan Akta No: 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 Nopember 2011.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H, No. 36 tanggal 16 Desember 2021, terkait dengan perubahan nama pemegang saham, perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberitahukan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0486641 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Melakukan pekerjaan perencanaan.
b. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol.
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d.

Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk meyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai bulan Oktober 2013. Jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa telah beroperasi secara komersial sejak tanggal 18 September 2013.

Setelah berakhirnya hak konsesi, jalan tol akan diserahkan kepada Pemerintah/Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar senilai uang atau dalam bentuk apapun kepada Perusahaan. Hal tersebut dipertegas dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Perusahaan dengan Departemen Pekerjaan Umum.

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Bagus Cahya Arinta B	Donny Arsal
Komisaris	Edi Priyatno	Edi Priyatno,
Komisaris	Ir. Lukman F. Laisha	Ir. Lukman F. Laisha
Komisaris	Anak Agung Ngurah Maha Diptha	Anak Agung Ngurah Maha Diptha
Komisaris	Kompyang Raka Swandika	Kompyang Raka Swandika
Direksi		
Direktur Utama	I Ketut Adiputra Karang	I Ketut Adiputra Karang
Direktur Keuangan	I Gusti Putu Arya Budhi Astawa	I Gusti Putu Arya Budhi Astawa

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jasamarga Bali Tol Tentang Perubahan Komisaris yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayanti, S.H. bahwa Perusahaan telah menyutujui untuk mengangkat Bagus Cahya Arinta B Setiawan sebagai Komisaris Utama menggantikan Dony Arsal dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2026.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 96 orang dan 100 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Selain laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Pada tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penerapan standar yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Sifat dan dampak perubahan sebagai akibat dari penerapan standar akuntansi baru dan revisi tersebut dijelaskan di bawah ini.

- Amandemen Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.
  Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Amendemen ini efektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 dan untuk akuisisi aset yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut dengan penerapan lebih dini diperkenankan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Sifat dan dampak perubahan sebagai akibat dari penerapan standar akuntansi baru dan revisi tersebut dijelaskan di bawah ini. (lanjutan)

- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.

  Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi dan PSAK 73: Sewa yang terkait dengan:
  1. perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
  2. akuntansi lindung nilai; dan
  3. pengungkapan.

  Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai.

  Amendemen ini berlaku efektif per 1 Januari 2021 dengan penerapan lebih dini diperkenankan.

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

  Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

  Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:
  1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
  2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

  Perusahaan menerapkan amendemen tersebut pada kontrak yang belum terpenuhi semua kewajibannya pada awal periode pelaporan tahunan yang mana entitas pertama kali menerapkan amendemen (tanggal aplikasi awal). Perusahaan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Sebagai gantinya, entitas mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba atau komponen ekuitas lainnya, sebagaimana mestinya, pada tanggal aplikasi awal. Penerapan lebih dini diperkenankan.

b. Kas dan bank

Kas dan bank dalam laporan posisi keuangan terdiri atas kas dan kas yang berada di bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

e. Aset tetap

Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap termasuk: (a) harga pembelian, (b) setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi masa kini. Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan operasi kantor	5
Kendaraan	5
Sarana informasi jalan tol	10

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

f. Aset takberwujud lainnya

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya perolehan atau pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak diakui sebagai aset takberwujud lainnya.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan dikapitalisasi sebagai bagian dari produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan *overhead* yang relevan. Biaya perolehan dan pengembangan perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama tiga tahun.

g. Perjanjian konsesi jasa

Perusahaan telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset takberwujud yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Perusahaan dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Hak konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Selain itu, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK No. 72, “Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan”, untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Perusahaan menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Perusahaan diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Perusahaan mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Selama periode konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan harga pokok dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. aset hak pengusahaan jalan tol yang termasuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas;
2. aset hak pengusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai", jika ada.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Apabila terdapat pembalikan penurunan nilai, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, penyusutan bersih, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

i. Perpajakan

Pajak Penghasilan non final - Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan final

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Perusahaan menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan bunga sebagai bagian tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

j. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

(i) Aset Keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:
1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan bank, piutang pendapatan tol, piutang lain-lain dan dana dibatasi penggunaannya, yang seluruhnya dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
  Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) (“EIR”), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian *“pass-through”,* dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Instrumen keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:
(i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2021, liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, beban akrual, utang retensi, utang lain-lain, liabilitas sewa, utang pemegang saham dan utang bank yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba atau rugi.

(iii) Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan

(iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut) pada suatu titik waktu atau periode waktu

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Perusahaan diakui pada suatu titik waktu saat penjualan karcis tol.

Pendapatan konstruksi dan beban konstruksi

Perusahaan mengakui aset takberwujud untuk jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan pada periode waktu dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus. Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

l. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

m. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa

Perusahaan sebagai *lessee*

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:
- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dengan:
  - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Liabilitas sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam “liabilitas sewa”.

Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari “aset tetap” dan “liabilitas sewa” di dalam laporan posisi keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan kerja

Perusahaan membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No.35/2021. Sesuai dengan PSAK 24, liabilitas imbalan kerja karyawan diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Biaya jasa kini dan biaya bunga diakui sebagai beban pada periode berjalan. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, diakui segera dalam laporan posisi keuangan dengan sesuai debit atau kredit ke saldo laba melalui pendapatan komprehensif lainnya dalam periode di mana terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang terdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

- Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

  Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2j.

- Perjanjian konsesi jasa

  ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

  BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2g).

  Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

  Perusahaan berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, “Aset Takberwujud”.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

- Perjanjian konsesi jasa

  Perusahaan diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

  Perusahaan mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 72. Perusahaan mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan marjin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

- Instrumen keuangan

  Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

- Penyusutan aset tetap

  Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 10 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

- Estimasi volume lalu lintas dalam amortisasi hak pengusahaan jalan tol

  Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah periode berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

  Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas serta melakukan studi lalu lintas dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (jutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Pajak penghasilan

  Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 13.

- Aset pajak tangguhan

  Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

- Provisi pelapisan jalan tol

  Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

- Sewa

  Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

  Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

  Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (jutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Imbalan kerja

  Penentuan kewajiban Perusahaan untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

  Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

- Pajak penghasilan

  Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 20b.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas - Rupiah	60	60
Bank - Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 30)	20.795	8.280
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk.	179	356
Total	**21.034**	**8.696**

5. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana dibatasi penggunaannya - bagian lancar:		
Pihak berelasi (Catatan 30)	2.691	2.168
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk. - E-*toll*	92	97
Sub total	2.783	2.265
Dana dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar:		
Pihak berelasi (Catatan 30)	4.059	3.944
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk. - Cadangan pembayaran utang	33	32
Sub total	4.092	3.976
Total	**6.875**	**6.241**

Sehubungan dengan perjanjian kredit sindikasi (Catatan 17), Perusahaan membuka rekening cadangan pembayaran hutang seperti yang disyaratkan dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

6. PIUTANG PENDAPATAN TOL

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan tol *E-toll* dari bank-bank pengumpul tol dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember	
	2021	**2020**
Pihak berelasi (Catatan 30)	37	12
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk.	29	91
Total	**66**	**103**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2021	**2020**
Piutang biaya implementasi dan pemeliharaan alat pembayaran elektronik		
Pihak berelasi (Catatan 30)	23	23
Pihak ketiga		
PT Bank DKI	345	345
Lainnya	928	993
Total	**1.296**	**1.361**

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA - NETO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2021	**2020**
Sewa, neto	433	80
Asuransi, neto	266	472
Lain-lain	61	689
Total	**760**	**1.241**

9. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Aset tetap kepemilikan langsung				
Peralatan operasi kantor	889	-	-	889
Kendaraan	3.374	-	-	3.374
Sarana informasi jalan tol	1.774	-	-	1.774
Aset Hak Guna				
Kendaraan	802	-	-	802
Total	**6.839**	**-**	**-**	**6.839**
Akumulasi Penyusutan				
Aset tetap kepemilikan langsung				
Peralatan operasi dan kantor	(596)	(141)	-	(737)
Kendaraan	(3.374)	-	-	(3.374)
Sarana informasi jalan tol	(1.048)	(224)	-	(1.272)
Aset Hak Guna				
Kendaraan	(515)	(215)	-	(730)
Total	**(5.533)**	**(580)**	**-**	**(6.113)**
Nilai Buku Neto	**1.306**			**726**

	31 Desember 2020				
	Saldo Awal	**Penyesuaian**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan					
Aset tetap kepemilikan langsung					
Peralatan operasi kantor	889	-	-	-	889
Kendaraan	3.374	-	-	-	3.374
Sarana informasi jalan tol	1.774	-	-	-	1.774
Aset Hak Guna					
Kendaraan	-	802	-	-	802
Total	**6.037**	**802**	**-**	**-**	**6.839**
Akumulasi Penyusutan					
Aset tetap kepemilikan langsung					
Peralatan operasi dan kantor	(446)	-	(150)	-	(596)
Kendaraan	(3.374)	-		-	(3.374)
Sarana informasi jalan tol	(824)	-	(224)	-	(1.048)
Aset Hak Guna					
Kendaraan	-	-	(515)	-	(515)
Total	**(4.644)**	**-**	**(889)**	**-**	**(5.533)**
Nilai Buku Neto	**1.393**				**1.306**

9. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	580	889
Total	**580**	**889**

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset tetap Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan				
Jalan dan jembatan	1.806.549	-	-	1.806.549
Plaza tol	49.845	1.760	-	51.605
Penerangan jalan umum	50.956	1.725	-	52.681
Peralatan jalan tol	31.653	3.199	-	34.852
Total	**1.939.003**	**6.684**	**-**	**1.945.687**
Akumulasi amortisasi				
Jalan dan jembatan	(109.173)	(4.920)	-	(114.093)
Plaza tol	(5.355)	(1.350)	-	(6.705)
Penerangan jalan umum	(14.368)	(2.976)	-	(17.344)
Peralatan jalan tol	(9.420)	(2.005)	-	(11.425)
Total	**(138.316)**	**(11.250)**	**-**	**(149.567)**
Nilai buku neto	**1.800.687**			**1.796.120**

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Reklasifikasi***	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan				
Jalan dan jembatan	1.806.549	-	-	1.806.549
Plaza tol	26.468	890	22.487	49.845
Penerangan jalan umum	50.756	200	-	50.956
Peralatan jalan tol	30.203	1.450	-	31.653
Total	**1.913.976**	**2.540**	**22.487**	**1.939.003**
Akumulasi amortisasi				
Jalan dan jembatan	(101.806)	(7.367)	-	(109.173)
Plaza tol	(3.533)	(1.822)	-	(5.355)
Penerangan jalan umum	(11.420)	(2.948)	-	(14.368)
Peralatan jalan tol	(7.415)	(2.005)	-	(9.420)
Total	**(124.174)**	**(14.142)**	**-**	**(138.316)**
Nilai buku neto	**1.789.802**			**1.800.687**

*reklasifikasi dari aset takberwujud lainnya (Catatan 11).

Seluruh beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dialokasikan sebagai beban pendapatan tol (Catatan 26).

10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Pada tahun 2021, Perusahaan telah mengasuransikan aset konsesi atas hak pengusahaan jalan tol terkait pengoperasian jalan tol terhadap risiko kehilangan pendapatan, tidak dapat digunakan, kerusakan dan termasuk yang diakibatkan oleh huru-hara, sabotase, terorisme dan keadaan kahar *(force majeure)* serta risiko lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Pihak Kreditur kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp1.200.000.000.000 (Rupiah penuh). Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai hak pengusahaan jalan tol pada tanggal 31 Desember 2021.

11. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA - NETO

Rincian aset takberwujud lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021				
	Saldo awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo akhir**
Biaya perolehan					
Perangkat lunak	3.425	-	-	-	3.425
Total	3.425	-	-	-	3.425
Akumulasi amortisasi					
Perangkat lunak	(2.222)	(628)	-	-	(2.850)
Nilai buku neto	**1.203**				**575**

	31 Desember 2020				
	Saldo awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi***	**Saldo akhir**
Biaya perolehan					
Perangkat lunak	3.425	-	-	-	3.425
Pra konstruksi	22.487	-	-	(22.487)	-
Total	25.912	-	-	(22.487)	3.425
Akumulasi amortisasi					
Perangkat lunak	(1.450)	(772)	-	-	(2.222)
Nilai buku neto	**24.462**				**1.203**

*reklasifikasi ke hak pengusahaan jalan tol (Catatan 10).

Seluruh beban amortisasi aset takberwujud lainnya dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset takberwujud lainnya.

12. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak berelasi (Catatan 30)	12.238	5.225
Pihak ketiga		
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	571
PT Bangun Persada	-	178
PT Pulo Airbiru	-	152
PT Husada Putra Pratama	-	68
Lain-lain	5	500
Total	**12.243**	**6.694**

13. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak berelasi (Catatan 30)	**5.299**	**5.299**

Berdasarkan surat keterangan No. 44/NOT/II/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Leolin Jayayanti, utang lain-lain pihak berelasi merupakan utang biaya pra operasi dari para pemegang saham sebesar Rp5.617.277.661 (Rupiah penuh) dikurangi piutang setoran modal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp318.000.000 (Rupiah penuh).

14. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pihak berelasi (Catatan 30)	44.532	32.546
Pihak ketiga		
Pemeliharaan dan keamanan	815	1.705
Biaya bunga	193	237
Jasa profesional	138	213
Insentif kerja	789	-
Beban umum dan administrasi	1.309	107
Total	**47.777**	**34.808**

15. UTANG RETENSI

Utang retensi merupakan akumulasi uang jaminan yang dipotong dari tagihan kontraktor dan konsultan sehubungan dengan jaminan pemeliharaan pembangunan jalan tol. Uang jaminan tersebut akan dibayarkan kembali kepada kontraktor dan konsultan setelah masa pemeliharaan telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak ketiga		
Lain-lain	23	23
Total	**23**	**23**

16. LIABILITAS SEWA

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa kendaraan bermotor dengan periode lebih dari satu tahun. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset hak-guna tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Berikut rincian mutasi liabilitas sewa:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal tahun	354	-
Penerapan awal	-	802
Beban bunga liabilitas sewa	15	38
Pembayaran liabilitas sewa	(291)	(486)
Saldo akhir	**78**	**354**
Porsi jangka pendek	(78)	(354)
Porsi jangka panjang	**-**	**-**

17. UTANG BANK

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kredit Sindikasi Investasi		
Pihak berelasi (Catatan 30)	877.626	954.611
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk.	114.030	124.032
Total kredit sindikasi	991.656	1.078.643
Utang bunga IDC		
Pihak berelasi (Catatan 30)	61.972	67.408
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk.	8.052	8.758
Total utang bunga IDC	70.024	76.166
Total	1.061.680	1.154.809
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.151)	(1.458)
Total utang bank KI	1.060.529	1.153.351
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(130.382)	(93.130)
Utang bank bagian jangka panjang	**930.147**	**1.060.221**

17. UTANG BANK (lanjutan)

Perjanjian fasilitas kredit investasi

Pada tanggal 22 Juni 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit sindikasi No. 79 sebesar Rp1.739.300.000.000 (Rupiah penuh) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"), PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN") dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("BPD Bali") untuk pembiayaan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Addendum V Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 September 2020 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Tujuan penggunaan kredit untuk membiayai pengadaan tanah dan konstruksi jalan tol serta membiayai 70% liabilitas pembayaran bunga dalam periode konstruksi. Suku bunga tetap (f*ixed rate*) selama satu tahun sebesar 10% per tahun yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Setelah pengenaan *fixed rate* selama satu tahun, Perusahaan wajib membayar bunga kepada para kreditur dengan suku bunga acuan ditambah marjin 4% per tahun. Maksimum kredit sebesar Rp1.622.000.000.000 (Rupiah penuh) termasuk IDC sebesar Rp117.300.000.000 (Rupiah penuh).

Jangka waktu kredit berdasarkan perjanjian kredit ini adalah maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini termasuk masa tenggang dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.484.780.000.000 (Rupiah penuh). Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo utang bank Perusahaan adalah sebesar Rp1.061.679.504.248 (Rupiah penuh).

Selama tahun 2021, total angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 93.129.781.104 (Rupiah penuh) dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	23.827
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	23.827
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	23.827
PT Bank Central Asia Tbk.	10.709
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	5.585
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.355
Total	**93.130**

Kredit dari fasilitas ini dikenai suku bunga pertahun sebesar *Reference rate* ditambah 4.25% pada masa konstruksi dan *Reference rate* ditambah 4% pada masa operasi dengan suku bunga fasilitas kredit adalah 6,48% - 7,00% (2020: 7,56% - 9,44%).

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membuka rekening penampungan yang dananya ditetapkan penggunaannya pada bank-bank *Joint Mandated Lead Arranger* (JMLA), yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA (Catatan 5).

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu mewajibkan Perusahaan untuk, antara lain, menyalurkan pendapatan tol dan pendapatan usaha lain ke rekening pengumpulan, menjaga *financial covenant* atau mempunyai kondisi keuangan yang baik yang tercermin didalam laporan keuangan Perusahaan seperti: (i) maksimal *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 70:30; dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)> 1x (lebih besar dari satu kali) selama masa pengoperasian serta tidak memperbolehkan untuk, antara lain, merubah komposisi kepemilikan saham Perusahaan, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup kegiatan usaha Perusahaan, memperoleh kredit atau fasilitas baru dalam bentuk pinjaman dari pihak lain kecuali dari Para Pemegang Saham Perusahaan, melakukan perubahan PPJT, mengalihkan serta menjaminkan sebagian atau semua aset, konsolidasi atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain, membagikan dividen dan melakukan pembayaran utang kepada para pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan keuangan yang diatur dalam perjanjian kredit.

18. UTANG PEMEGANG SAHAM

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("JM")	205.000	-
Total	**205.000**	**-**

Pada tanggal 26 Februari 2021, Perusahaan dan JM menandatangani perjanjian pinjaman adendum IV No. 006.00/PKS-JBT/X/2018 untuk memenuhi kebutuhan arus kas Perusahaan dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok kredit sindikasi serta untuk pembiayaan *capital expenditure*. Pagu pinjaman sebesar Rp205.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Perusahaan wajib membayar bunga kepada JM sesuai dengan suku bunga pinjaman kredit sindikasi ditambah marjin 2% per tahun yaitu 8,33% - 11,81%.

19. PROVISI PELAPISAN JALAN TOL

Jumlah dari provisi pelapisan jalan tol ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	43.316	40.317
Penambahan tahun berjalan (Catatan 26)	3.677	2.999
Realisasi tahun berjalan	(6.292)	-
Saldo akhir	**40.701**	**43.316**
Porsi jangka pendek	-	(9.205)
Porsi jangka panjang	**40.701**	**34.111**

Saldo provisi pelapisan jalan tol per 31 Desember 2021 telah mencukupi untuk kebutuhan pelapisan jalan tol yang timbul atas pemakaian jalan tol tahun berjalan.

20. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak penghasilan		
Pasal 21	168	173
Pasal 23	70	46
Pasal 4 (2)	5	-
Pajak Pertambahan Nilai	-	14
Total	**246**	**238**

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan

Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Rugi sebelum pajak penghasilan	(123.122)	(118.305)
Beda temporer		
Pelapisan ulang jalan tol	3.000	2.249
Imbalan kerja dan lainnya	2.579	(402)
Amortisasi aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol	(85.731)	(80.598)
Beban penyusutan aset tetap	(217)	(142)
Beban akrual insentif	817	(1.476)
Sub total	(79.552)	(80.369)
Beda tetap		
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Biaya natura	1.511	1.117
Biaya pajak	931	562
Biaya representasi dan sumbangan	673	479
Pendapatan jasa giro dan deposito yang dikenakan pajak final	(344)	(959)
Pendapatan sewa lahan yang dikenakan pajak final	(1.233)	(2.156)
Biaya mess	-	115
Amortisasi aset takberwujud - margin konstruksi	-	1.773
Sub total	1.538	931
Rugi fiskal tahun berjalan	(201.136)	(197.743)
Akumulasi rugi fiskal:		
Tahun 2016	-	(143.220)
Tahun 2017	(115.743)	(115.743)
Tahun 2018	(98.692)	(98.692)
Tahun 2019	(131.309)	(131.309)
Tahun 2020	(197.743)	-
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun	**(744.823)**	**(686.707)**

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, rugi fiskal dapat diperhitungkan hingga jangka waktu lima tahun sejak saat rugi fiskal tersebut terjadi. Perusahaan menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (”SPT”). Otoritas pajak dapat meninjau liabilitas pajak Perusahaan dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa SPT Badan tahun buku 2021 akan dilaporkan sesuai dengan perhitungan di atas.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang tercermin di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Rugi sebelum pajak penghasilan	**(123.122)**	**(118.305)**
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%	(27.086)	(26.027)
Efek pajak penghasilan pada beda tetap	338	17.731
Perbedaan temporer dan rugi pajak yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan yang tidak diakui	7.887	(9.436)
Efek perubahan tarif pajak	(13.696)	26.417
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	**(32.557)**	**8.685**

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

	1 Januari 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke ekuitas	31 Desember 2021
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Amortisasi aset takberwujud hak pengusahaan jalan tol	(103.748)	(32.557)	-	(136.305)
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(103.748)**	**(32.557)**	**-**	**(136.305)**

	1 Januari 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke ekuitas	31 Desember 2020
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Amortisasi aset takberwujud hak pengusahaan jalan tol	(112.433)	8.685	-	(103.748)
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(112.433)**	**8.685**	-	**(103.748)**

Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal dan beda temporer sebesar Rp165.224 karena Manajemen berpendapat bahwa akumulasi rugi fiskal dan beda temporer tersebut tidak akan terpulihkan sampai dengan batas waktu dari manfaat rugi fiskal.

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No.35/2021. Sesuai dengan PSAK 24, liabilitas imbalan kerja karyawan diestimasi dengan menggunakan metode projected unit credit. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2021 dan 2020 dihitung dengan metode "*Projected-Unit-Credit"* oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal (2020: PT Bestama Aktuaria), berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022 dan 11 Februari 2021.

Asumsi aktuarial utama yang digunakan oleh aktuaris Perusahaan untuk menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat diskonto	7,6%	7,4%
Tingkat kenaikan gaji	6%	6%
Tingkat kematian tahunan	Tabel Mortalita Indonesia 2019(TMI IV)	Tabel Mortalita Indonesia 2019(TMI IV)
Tingkat cacat	10% dari TMI IV	10% dari TMI IV
Tingkat pengunduran diri	6% (usia 20-29 Tahun) 3% (usia 30-34 Tahun) 1,8% (usia 35-39 Tahun) 1,2% (usia 40-50 Tahun) 0,6% (usia 51-52 Tahun) 0% (usia > 52 Tahun)	6% (usia 20-29 Tahun) 3% (usia 30-34 Tahun) 1,8% (usia 35-39 Tahun) 1,2% (usia 40-50 Tahun) 0,6% (usia 51-52 Tahun) 0% (usia > 52 Tahun)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari imbalan kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas	5.765	3.486
Nilai wajar aset program imbalan karyawan	(2.370)	(2.110)
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	**3.395**	**1.376**

Nilai wajar aset program imbalan kerja merupakan pencadangan uang pensiun karyawan yang disimpan di pihak ketiga yaitu pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia ("DPLK BNI").

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal tahun	1.376	996
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(840)	(635)
Beban imbalan kerja	2.605	771
Pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain	254	244
Saldo liabilitas akhir tahun	**3.395**	**1.376**

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Beban jasa kini	732	635
Beban jasa lalu	616	80
Beban pesangon	1.073	-
Beban bunga	184	56
Beban imbalan kerja	**2.605**	**771**

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	
Asumsi tingkat diskonto	
+ 1,00%	3.237
- 1,00%	3.798
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
+ 1,00%	3.799
- 1,00%	3.232

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total saham (Lembar)	Total (Dalam Jutaan Rupiah)	Kepemilikan %
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	609.193	609.193	64,44
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*	131.048	131.048	13,86
Pemerintah Provinsi Bali	59.707	59.707	6,32
Pemerintah Kabupaten Badung	59.707	59.707	6,32
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.635	59.635	6,31
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	7.454	7.454	0,79
PT Hutama Karya (Persero)	7.454	7.454	0,79
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7.454	7.454	0,79
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	3.782	3.782	0,40
Total	**945.434**	**945.434**	**100,00**

**Dahulu PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)*

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Agio saham	76.309	76.309
Tambahan modal disetor lainnya	35.793	35.793
Total	**112.102**	**112.102**

Agio saham

Agio saham merupakan selisih setoran pemegang saham (Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung) diatas nilai nominal saham.

Tambahan modal disetor lainnya (Rupiah penuh)

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 11 Desember 2013 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., terdapat kelebihan setoran modal diatas modal dasar atau modal ditempatkan oleh para pemegang saham sebesar Rp35.792.588.866 (Rupiah penuh). Sambil menunggu keputusan lebih lanjut maka kelebihan setoran modal pemegang saham tersebut disajikan sebagai tambahan modal disetor lainnya, yang terinci sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah
1.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	18.039.000.000
2.	PT Angkasa Pura I (Persero)	14.908.370.000
3.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2.551.744.970
4.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	146.000.000
5.	PT Hutama Karya (Persero)	146.000.000
6.	Pemerintah Provinsi Bali	566.948
7.	Pemerintah Kabupaten Badung	566.948
8.	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	340.000
Total		**35.792.588.866**

24. PENDAPATAN TOL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, total pendapatan tol masing-masing sebesar Rp40.824 dan Rp55.408.

Sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor: 1234/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 untuk Ruas Jalan Tol Bali Mandara (Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa) efektif mulai tanggal 14 Januari 2020 mengalami penyesuaian tarif tol menjadi:

Ruas	Golongan (Rupiah penuh)					
	I	II	III	IV	V	VI
Nusa Nua - Ngurah Rai - Benoa	12.500	19.000	19.000	25.000	25.000	5.000

25. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Rincian pendapatan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Sewa lahan	1.233	2.155
Lainnya	-	1
Total	**1.233**	**2.156**

26. BEBAN TOL

Rincian beban tol adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Gaji, insentif dan tunjangan	5.008	8.593
Beban pengumpulan jalan tol:		
Jasa Pengoperasian JMTO	8.694	-
Beban pengumpulan tol lainnya	1.589	6.333
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	348	427
Sub total	10.631	6.760
Beban pelayanan pemakaian jalan tol:		
Bahan bakar, listrik dan air	2.440	2.499
Beban pemeliharaan	743	-
Sewa kendaraan patroli	34	2.577
Beban petugas patroli	33	-
Sub total	3.250	5.076

26. BEBAN TOL (Lanjutan)

Rincian beban tol adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Beban pemeliharaan jalan tol:		
Amortisasi hak pengusahaan jalan tol (Catatan 10)	11.250	14.142
Jasa Pengoperasian JMTM	3.012	2.183
Provisi pelapisan jalan tol (Catatan 19)	3.677	2.999
Pajak bumi dan bangunan	1.780	1.815
Beban asuransi jalan dan jembatan tol	1.174	2.672
Beban konsultan teknik	1.122	675
Beban pemeliharaan	959	776
Sub total	22.974	25.262
Total	**41.863**	**45.691**

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Gaji dan tunjangan	12.774	7.703
Sewa	1.850	2.312
Beban rumah tangga	793	700
Beban rapat kerja dan rapat dinas	646	421
Biaya amortisasi (Catatan 11)	628	772
Penyusutan (Catatan 9)	580	889
Biaya listrik, air dan telpon	528	1.214
Representasi	494	320
Konsultan	400	305
Beban publikasi	179	145
Beban bahan bakar kendaraan	171	192
Beban peresmian dan perayaan	130	138
Perjalanan dinas dalam negeri	125	242
Beban fotokopi dan percetakan	66	284
Biaya pembelian dan pemeliharaan	40	133
Beban langganan karcis pegawai	-	240
Beban alat tulis kantor	-	124
Lain-lain	-	285
Total	**19.404**	**16.419**

Manajemen berpendapat bahwa saldo beban umum dan administrasi telah mendapatkan otorisasi dan digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan.

28. BIAYA KEUANGAN

Akun ini merupakan bunga pinjaman bank dan pemegang saham pada tahun dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Pihak berelasi (Catatan 30)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	23.738	24.916
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	23.738	24.916
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	23.738	24.916
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	11.112	16.384
PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero)	5.564	5.840
Subtotal	87.890	96.972
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk.	9.658	11.198
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.333	5.599
Bunga atas utang sewa	15	37
Subtotal	15.006	16.834
TOTAL	**102.896**	**113.806**

29. PENDAPATAN KEUANGAN

Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Pihak berelasi:		
Jasa giro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	230	602
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	104	270
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	81	245
Bunga Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	23
Beban pajak atas pendapatan Keuangan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	(46)	(125)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	(21)	(54
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(16)	(49)
Pihak ketiga:		
Jasa giro		
PT Bank Central Asia Tbk.	19	59
Beban pajak atas pendapatan keuangan		
PT Bank Central Asia Tbk.	(4)	(12)
	347	**959**

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

	Total		Presentase (%) dari total aset/liabilitas	
	2021	2020	2021	2020
Kas dan setara kas (Catatan 4)				
Bank				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	20.769	8.251	1,14	0,45
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	26	29	0,00	0,00
Total	**20.795**	**8.280**	**1,14**	**0,45**
Dana dibatasi penggunaannya (Catatan 5)				
Bagian lancar				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - *E-toll*	1.282	798	0,07	0,04
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - *E-toll*	1.130	1.076	0,06	0,06
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - *E-toll*	276	285	0,02	0,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *E-toll*	3	9	0,00	0,00
Sub total	2.691	2.168	0,15	0,12
Dana dibatasi penggunaannya (Catatan 5) (lanjutan)				
Bagian tidak lancar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - Cadangan pembayaran hutang	4.000	3.886	0,22	0,21
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Cadangan pembayaran hutang	31	30	0,00	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - Cadangan pembayaran hutang	28	28	0,00	0,00
Sub total	4.059	3.944	0,22	0,21
Total	**6.750**	**6.112**	**0,37**	**0,33**
Piutang pendapatan tol (Catatan 6)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	27	10	0,00	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	6	1	0,00	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	4	1	0,00	0,00
Total	**37**	**12**	**0,00**	**0,00**
Piutang lain-lain (Catatan 7)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	23	23	0,00	0,00
Utang usaha (Catatan 12)				
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	8.174	2.787	0,54	0,21
PT Jasamarga Tollroad Operator	4.064	2.142	0,27	0,16
Lain-lain	-	296	0,00	0,02
Total	**12.238**	**5.225**	**0,81**	**0,39**
Utang lain-lain (Catatan 13)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.871	4.871	0,32	0,36
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	189	189	0,01	0,01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	126	126	0,01	0,01
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) *(Indonesia Tourism Development Corporation)*	113	113	0,01	0,01
Total	**5.299**	**5.299**	**0,35**	**0,39**

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (Lanjutan)

	Total		Presentase (%) dari total aset/liabilitas	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
Beban akrual (Catatan 14)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	41.886	30.698	2,77	2,27
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	1.095	-	0,07	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	430	528	0,02	0,03
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	430	528	0,02	0,03
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	430	528	0,02	0,03
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	101	124	0,00	0,00
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	97	118	0,00	0,00
PT Pelindo Daya Sejahtera	63	22	0,00	0,00
Sub total	**44.532**	**32.546**	**2,90**	**2,36**
Kredit Sindikasi Investasi (Catatan 17)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	253.715	275.971	16,78	20,45
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	253.716	275.971	16,78	20,45
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	253.715	275.971	16,78	20,45
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	59.465	64.683	3,93	4,79
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	57.015	62.015	3,77	4,59
Sub total	877.626	954.611	58,04	70,73
Utang bunga IDC (Catatan 17)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	17.916	19.487	1,19	1,45
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	17.916	19.487	1,19	1,45
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	17.916	19.487	1,19	1,45
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	4.198	4.568	0,28	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	4.026	4.379	0,27	0,33
Sub total	61.972	67.408	4,10	5,03
Total	**939.598**	**1.022.019**	**62,15**	**76,29**
Utang pemegang saham (Catatan 18)				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	205.000	-	66,80	0,00
Beban Tol (Catatan 26)				
PT Jasamarga Tollroad Operator.	9.775	-	20,76	-
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	3.012	2.183	7,97	4,77
Sub total	12.787	2.183	28,73	4,77
Biaya keuangan (Catatan 28)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	23.738	24.916	19,18	18,97
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	23.738	24.916	19,18	18,97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	23.738	24.916	19,18	18,97
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	11.112	16.384	8,99	12,47
PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero)	5.564	.840	4,50	4,45
Sub total	87.890	96.972	71,03	73,83
Penghasilan keuangan (Catatan 29)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	230	625	0,54	1,06
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	104	270	0,24	0,46
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	81	245	0,19	0,42
Sub total	415	1.140	0,97	1,94
Beban pajak atas penghasilan keuangan (Catatan 29)				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	46	125	0,04	0,10
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	21	54	0,02	0,04
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	16	49	0,01	0,04
Sub total	83	228	0,07	0,18

30. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Entitas Induk	Piutang lain-lain, Utang lain-lain, dan utang pemegang saham
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pemegang Saham Lainnya	Utang pemegang saham, dan Utang lain-lain
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Pemegang Saham Lainnya	Utang lain-lain
PT Pembangunan Pariwisata Indonesia (Persero)	Pemegang Saham Lainnya	Utang lain-lain
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Anggota dari kelompok usaha yang sama	Utang retensi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Badan usaha yang dikendalikan oleh pemegang saham	Jasa perbankan
PT Jasamarga Tollroad Operator	Anggota dari kelompok usaha yang sama	Utang usaha
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Anggota dari kelompok usaha yang sama	Utang usaha

Manajemen kunci merupakan komisaris dan direksi perusahaan. Imbalan yang diberikan masing-masing sebesar Rp.3.602.313.325 (Rupiah penuh) dan Rp.2.991.351.733 (Rupiah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

31. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian bagi hasil sewa lahan dengan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi

Perusahaan dan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Sewa Lahan Jalan Tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Perjanjian ini dinyatakan di dalam Surat Perjanjian kerjasama No. 008/NST-JBT/SPK/VI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013. PT Nusantara Sarana Telekomunikasi berkewajiban mengembangkan, membangunkan, mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur telekomunikasi di sepanjang ruas Jalan Tol. Perusahaan memperoleh bagian sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi memperoleh bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan atas pendapatan komersil dari pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah terpasang di sepanjang ruas Jalan Tol. Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan sewa bulanan per-tiang dikurangi dengan biaya langsung, yang terdiri dari biaya pemeliharaan dan biaya penggunaan listrik. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun, yaitu hingga tanggal 24 Mei 2016, dan telah diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun, yaitu hingga tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan Addendum I terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2016. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum II sehingga perjanjian berakhir pada tanggal 24 Mei 2022.

b. Perjanjian penerapan sistem pembayaran elektronik (*electronic payment*)

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No: 007/SPK-JBT/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013 sehubungan dengan kerjasama penerapan sistem pembayaran elektronik (*Electronic Payment*) dengan teknologi nir sentuh *(contactless smartcard)*. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun sejak perjanjian ini di tandatangani.

31. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

c. Penggantian lahan

1. Berkaitan dengan penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT Angkasa Pura I dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

Nomor	Dimiliki	Area	NJOP (Rp) (Rupiah penuh)	Harga penilaian (Rp) (Rupiah penuh)
1.	AP I	3.404 m^2	3.581.003.000	29.291.420.000
2.	Pelindo (darat)	522 m^2	1.227.744.000	2.589.120.000
	Pelindo (perairan)	41.490 m^2	-	-
Total			**4.808.747.000**	**31.880.540.000**

Pada tanggal 16 Juni 2017, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Nomor TN09.02-Db/495, perihal Tanah HPL PT Angkasa Pura I, yang ditembuskan kepada PT Jasamarga Bali Tol dengan pokok surat bahwa lahan HPL milik PT Angkasa Pura I tidak dapat diberikan ganti rugi dan penyelesaikan HPL milik PT Pelindo III pada prinsipnya sama dengan penyelesaian lahan HPL milik PT Angkasa Pura I.

2. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di akses masuk tol di jalan pelabuhan Benoa. Luas tanah yang akan dibangun kantor oleh perseroan seluas 1.150 m2. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah membeli tanah untuk gedung kantor berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31 dengan nilai beli tanah sebesar Rp13.200.000.000 (Rupiah penuh). Pada tanggal 1 Februari 2019 terjadi permasalahan hukum antara Pemilik Tanah sebelumnya Saudara Andi Susilo (Penggugat) dengan Kadek Ngurah Agus Wiryana (Tergugat), dalam hal ini Perseroan juga turut menerima Somasi dari Law Office Erwin Siregar selaku kuasa hukum dari Penggugat. Pada tanggal 13 Maret 2019 Perseroan menerima risalah Panggilan (Relaas) Gugatan Perdata dari Pengadilan Negeri Denpasar No 234/Pdt/G/2019/PN.Dps, dalam Perkara Perseroan menjadi Turut Tergugat I.

   Bersamaan dengan diajukannya Gugatan tersebut Andi Susilo juga mengajukan Permohonan Blokir atas tanah SHM 4471 ke BPN Kota Denpasar, sehingga Perseroan tidak dapat mengurus proses perubahan status tanah dari SHM ke HGB, balik nama dan IMB. Saat ini permohonan blokir telah dicabut oleh BPN Kota Denpasar dan Perseroan telah mengurus Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), selanjutnya Perseroan masih dalam proses pengurusan perubahan status tanah dari SHM ke HGB, balik nama dan IMB. Pada tanggal 16 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah membacakan Putusan Perkara Perdata No 234/Pdt.G/2019/ PN.Dps, dengan Amar Putusan yang menyatakan: 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), 3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), 4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp1.586.000 (Rupiah penuh). Menurut keterangan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang tercatat dalam halaman terakhir Putusan, pada tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding. Pada tanggal 13 Juli 2021, Perusahaan menerima salinan putusan Makamah Agung No. 3267/K/Pdt/2020 dengan pokok putusan Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta mengabulkan Gugatan Tergugat untuk Sebagian, dimana SHM 4471 dengan luas 1.150 M2 atas nama Andi Susilo (Penggugat) sekarang beralih atas nama Kadek Ngurah Agus Wiryana (Tergugat) adalah “Sah milik dari Tergugat”.

31. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

c. Penggantian lahan (Lanjutan)

JBT pada akhir Juli 2021 telah mengajukan proses Penurunan Hak dan Balik Nama ke BPN melalui Notaris. Sampai dengan saat ini proses Penurunan Hak dari SHM ke HGB telah selesai, selanjutnya JBT juga telah membayarkan Pajak BPHTB dan menandatangani Akta AJB. Proses Balik Nama HGB telah selesai menjadi atas nama PT Jasamarga Bali Tol per tanggal 23 Agustus 2021 dan mendapatkan Hak Guna Bangunan selama 30 Tahun sampai dengan tanggal 29 Juli 2051.

d. Perjanjian penyediaan sistem pembayaran uang elektronik

Pada tanggal 1 November 2021, Perusahaan mengadakan adendum II atas perjanjian kerjasama dengan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) tentang sistem jasa penyediaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan alat pembayaran elektronik di jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 3 (tiga) tahun, yang berlaku sejak ditandatangani kontrak sampai dengan 31 Oktober 2024. Nilai kontrak untuk pekerjaan terdiri dari; a. Biaya penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak sebesar Rp70.257.000 (Rupiah Penuh) sudah termasuk PPN untuk pembayaran periode November dan Desember 2021, b. Biaya penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pembayaran periode Januari – Maret 2022 sebesar Rp210.771.000 (Rupiah penuh) sudah termasuk PPN, c. Biaya penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pembayaran periode Januari - December 2023 sebesar Rp212.687.100 (Rupiah penuh) sudah termasuk PPN, d. Biaya penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pembayaran periode Januari - Oktober 2024 sebesar Rp212.687.100 (Rupiah penuh) sudah termasuk PPN, atas biaya penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak dibayarkan per triwulan oleh Perusahaan.

e. Perjanjian Jasa Pengoperasian Jalan Tol

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan mengadakan Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas pada Ruas Tol Bali Mandiri antara PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dengan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) yang tertuang pada Surat Perjanjian Kontrak Nomor 007.00/SPP-JBT/XII/2020 dengan jangka waku kontrak selama 4 Tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nilai kontrak pada tahun 2021 sebesar Rp.9.775.080.066 (Rupiah penuh). Nilai kontrak untuk tahun-tahun berikut akan disesuaikan berdasarkan nilai kesepakatan antara JBT dan JMTO setiap tahunnya.

f. Perjanjian Jasa Pemeliharaan Jalan Tol

Pada tanggal 1 April 2020, Perusahaan menandatangani Kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Jalan Tol dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir adalah pada tanggal 1 April 2021 tertuang pada Addendum III atas Kontrak Manajemen Bidang Pemeliharaan Jalan Tol nomor :003.00/SPP-JBT/IV/2020 dengan nilai kontrak pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.11.737.215.187.

31. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

g. Kontrak Tahura

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai Untuk Pembangunan Strategis dan Pengelolaan Jalan Tol Bali Mandara dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor 003.00/PKS/JBT-DisKLH/X/2021 selama 10 Tahun sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2030 yang lingkup pekerjaanya adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai seluas ± 4,24 hektar untuk kegiatan strategis transportasi Jalan Tol Bali Mandara;
b. Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;
c. Rehabilitasi Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

Atas pemafaatan lahan hutan raya tersebut diatas, maka Perusahaan berkewajiban memberikan dana kompensasi sebesar Rp.1.696.000.000 selama 10 Tahun dan dibayarkan setiap Tahun dengan dua kali tahap pembayaran yaitu akhir semester satu dan akhir semester dua setiap tahun berjalan. Dalam kontrak ini pun, Perusahaan berkewajiban membayarkan tunggakan dana kompensasi tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 339.200.000 yang dibayarkan bertahap mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dengan jadwal pembayarannya sebagai berikut:

1. Tahun Ke-1 Tahun 2021 sebesar Rp.169.600.000
2. Tahun Ke-2 Tahun 2022 sebesar Rp 254.400.000 termasuk ½ tunggakan Tahun 2018
3. Tahun Ke-3 Tahun 2023 sebesar Rp 254.400.000 termasuk ½ tunggakan Tahun 2018
4. Tahun Ke-4 Tahun 2024 sebesar Rp 254.400.000 termasuk ½ tunggakan Tahun 2019
5. Tahun Ke-5 Tahun 2025 sebesar Rp 254.400.000 termasuk ½ tunggakan Tahun 2019
6. Tahun Ke-6 Tahun 2026 sebesar Rp.169.600.000
7. Tahun Ke-7 Tahun 2027 sebesar Rp.169.600.000
8. Tahun Ke-8 Tahun 2028 sebesar Rp.169.600.000
9. Tahun Ke-9 Tahun 2029 sebesar Rp.169.600.000
10. Tahun Ke-10 Tahun 2030 sebesar Rp.169.600.000.

h. Perjanjian Kerja Sama Promosi Bersama

Perusahaan pada tanggal 27 April 2021 melakukan Kesepakan Kerja Sama Promosi Bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan PT Jasamarga Bali Tol tertuang pada Perjanjian Nomor 04.00/PKS JBT-Mandiri/IV/2021. Dalam kesepakatan ini, Perusahaan menerima Pendapatan atas jasa sewa gerbang Tol Bali Mandara yang akan dilakukan branding Produk dari Bank Mandiri yang berlangsung selama 1 Tahun dari tanggal 27 April 2021 sampai dengan 26 April 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.200.000.000 sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga sama dengan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan:

	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan lancar		
Kas dan setara kas	21.034	21.034
Dana dibatasi penggunaannya	2.783	2.783
Piutang lainnya	1.296	1.296
Piutang pendapatan tol	66	66
Total aset keuangan lancar	**25.179**	**25.179**
Aset keuangan tidak lancar		
Dana dibatasi penggunaannya	4.092	4.092
Total aset keuangan	**29.271**	**29.271**

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga sama dengan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan:

	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas keuangan jangka pendek		
Utang bank	130.382	130.382
Beban akrual	47.777	47.777
Utang usaha	12.243	12.243
Utang lain-lain	5.299	5.299
Liabilitas sewa	78	78
Utang retensi	23	23
Utang pemegang saham	205.000	205.000
Total liabilitas keuangan jangka pendek	**400.802**	**400.802**
Liabilitas keuangan jangka panjang		
Utang bank	930.147	930.147
Total liabilitas keuangan	**1.330.949**	**1.330.949**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Nilai tercatat piutang usaha dan hutang usaha dianggap mendekati nilai wajarnya.

Hirarki nilai wajar

Perusahaan menggunakan hirarki teknik penilaian berikut dalam menentukan dan mengungkapkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan:

Tingkat 1: harga yang beredar di pasar aktif (tidak disesuaikan) untuk aset atau liabilitas yang identik.
Tingkat 2: teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tingkat 3: teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

b. Kebijakan Manajemen Risiko

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
- Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.
- Risiko pasar pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar karena Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam usaha.

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- Meminimalkan dampak dari perubahan dan risiko pasar atas semua jenis transaksi; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien, atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari bank, dana ditetapkan penggunaannya, dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari Kas dan bank, Piutang pendapatan tol, Piutang lain-lain dan Dana dibatasi penggunaannya.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk kas dan bank, piutang pendapatan tol piutang lain-lain serta dana yang ditetapkan penggunaannya, perusahaan lebih selektif dalam pemilihan bank, yaitu hanya bank-bank ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Tabel di bawah ini menunjukkan risiko kredit maksimum pada tanggal 31 Desember 2021:

	< 1 tahun	**> 1 tahun**	**Nilai Tercatat**
Kas dan bank	21.034	-	21.034
Piutang lain-lain	1.296	-	1.296
Piutang pendapatan tol	66	-	66
Dana dibatasi penggunaannya	2.783	4.092	6.875
Total	**25.179**	**4.092**	**29.271**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Risiko likuiditas (Lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual semula yang didiskontokan.

	31 Desember 2021				
	Saldo	**Jatuh tempo dalam 1 tahun**	**Jatuh tempo antara 1 -3 tahun**	**Jatuh tempo antara 3 – 5 tahun**	**Jatuh tempo lebih dari 5 tahun**
Utang usaha	12.243	12.243	-	-	-
Liabilitas sewa	78	78	-	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi	5.299	5.299	-	-	-
Beban akrual	47.777	47.777	-	-	-
Utang retensi	23	23	-	-	-
Utang pemegang saham	205.000	205.000	-	-	-
Utang bank	1.060.529	130.182	315.690	447.023	167.634
Total	**1.330.949**	**400.602**	**315.690**	**447.023**	**167.634**

Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko perubahan suku bunga pasar yang berkaitan dengan kas dan bank dan utang bank.

Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman, atau mempertimbangkan strategi *hedging* suku bunga. Perusahaan saat ini tidak memiliki aktivitas *hedging* tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko tingkat suku bunga tersebut.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimum.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan.

32. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

	31 Desember 2021			
	1 Januari 2021	Arus kas	Lainnya	31 Desember 2021
Liabilitas sewa	354	(291)	15	78
Utang bank	1.153.351	(93.129)	307	1.060.529
Utang pemegang saham	-	205.000	-	205.000
Total	**1.153.705**	**111.580**	**322**	**1.265.607**

Kolom lainnya merupakan amortisasi atas biaya transaksi pinjaman bank dan akresi bunga atas liabilitas sewa tahun berjalan.

33. TRANSAKSI NON KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi nonkas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Amortisasi biaya transaksi atas utang bank	307	381
Penambahan aset takberwujud	4.225	-

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku efektif 1 Januari 2022

1. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
   Secara umum Amandemen PSAK 22 ini:
   - menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30” .
   - mengubah paragraf 23 dalam PSAK dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjesi yang diakui pada tanggal akuisisi.
   - menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

2. Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
   Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:
   - biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
   - alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (Lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2022 (Lanjutan)

3. Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10%' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan
   Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

4. Penyempurnaan Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa
   Amandemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang menyertai PSAK 73 menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan sewa guna usaha oleh lessor untuk mengatasi potensi keraguan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul mengenai ilustrasi atas insentif sewa dalam contoh tersebut.

Berlaku efektif 1 Januari 2023

1. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek dan jangka Panjang. Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Amendemen tersebut menjelaskan:
   - apa yang dimaksud dengan hak untuk menangguhkan penyelesaian.
   - bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan.
   - klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas.
   - hanya jika suatu derivatif melekat dalam liabilitas konvertibel merupakan instrumen ekuitas saja, penggunaan frasa liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.(lanjutan):

1. Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan
   Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas mengurangi kepada biaya perolehan suatu aset tetap, hasil dari penjualan barang yang diproduksi saat menyiapkan aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat beroperasi dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan barang-barang tersebut, dan biaya untuk memproduksi barang-barang tersebut, dalam laba rugi.

   Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Perusahaan menerima SK Penyesuain Tarif Tol nomor 75/KPTS/M/2022 dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 31 Januari 2022 dengan tarif baru sebagai berikut:

Tahun	Ruas	Golongan (Rupiah penuh)					
		I	II	III	IV	V	VI
2022	Nusa Nua - Ngurah Rai - Benoa	13.000	19.500	19.500	25.500	25.500	5.000
2019	Nusa Nua - Ngurah Rai - Benoa	12.500	19.000	19.000	25.000	25.000	5.000

Penyesuain tarif tersebut berlaku 14 hari setelah SK Penyesuian Tarif dikeluaran tanggal 31 Januari 2022 maka pemberlakukan penyesuian tarif akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022.

36. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2022.

37. KELANGSUNGAN USAHA

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan, yang mengasumsikan bahwa aset akan terealisasi dan liabilitas akan diselesaikan dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan telah melaporkan total rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp155.933, akumulasi rugi sebesar Rp741.738 dan liabilitas lancar melebihi aset lancar sebesar Rp375.267 pada tanggal 31 Desember 2021.

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan keuangan dari pemegang saham

   Di tahun 2021, Pemegang saham telah memberikan bantuan arus kas berupa Pinjaman Pemegang Saham sebear Rp205.000.000.000 (Rupiah penuh) untuk menjaga arus kas Perusahaan tetap *Positif*. Pada tahun 2022, komitmen Pemegang Saham masih tetap memberikan bantuan Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp.275.000.000.000 (Rupiah penuh) hal ini sesuai dengan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 dari Pemegang Saham Mayoritas.

   Berdasarkan Akta Pernyatan Keputusan Pemegang Saham tanggal 18 Desember 2013 nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas, akan memastikan kelangsungan dan penyelesaian Proyek, termasuk dalam hal terjadi *cash deficiency* (kekurangan dana tunai) dan/atau *cost overrun* (kenaikan biaya investasi) dan menjaga ekuitas selalu positif, termasuk memastikan pembayaran kewajiban fasilitas kredit sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran yang terdapat dalam akta perjanjian kredit sindikasi dengan para Kreditur sampai dengan fasilitas kredit tersebut dinyatakan lunas oleh para Kreditur.

1. Pengelolaan biaya yang efisien

   Perusahaan melakukan upaya untuk mengendalikan jumlah tenaga kerja secara efisien, khususnya tenaga kerja di bidang operasional, karena sistem transaksi tol sudah berbasis *E-payment*. Perusahaan juga melakukan upaya untuk mengurangi biaya operasional dengan mencari alternatif biaya yang lebih rendah.

2. Melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan melalui peningkatan volume lalu lintas kendaraan, yaitu antara lain dengan memberikan layanan *drive thru* untuk *top up* uang elektronik dan layanan uang elektronik berbasis server melalui media stiker *Radio Frequency Identification* (RFID).